

MENYELAMATKAN BANGSA DARI **BAHAYA NARKOBA**

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

EDISI NO.03/TH.XII/MARET 2018



MAJELIS

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI



Tiga Pimpinan MPR Tambahan Pun Dilantik

30 Nasional
Indonesia dan Kazakstan
Sepakat Tingkatkan Kerjasama

39 Selingan
Industri Perfilman
Nasional Indonesia

67 Sosialisasi
Generasi Muda Harus
Memiliki Ketahanan Ideologi

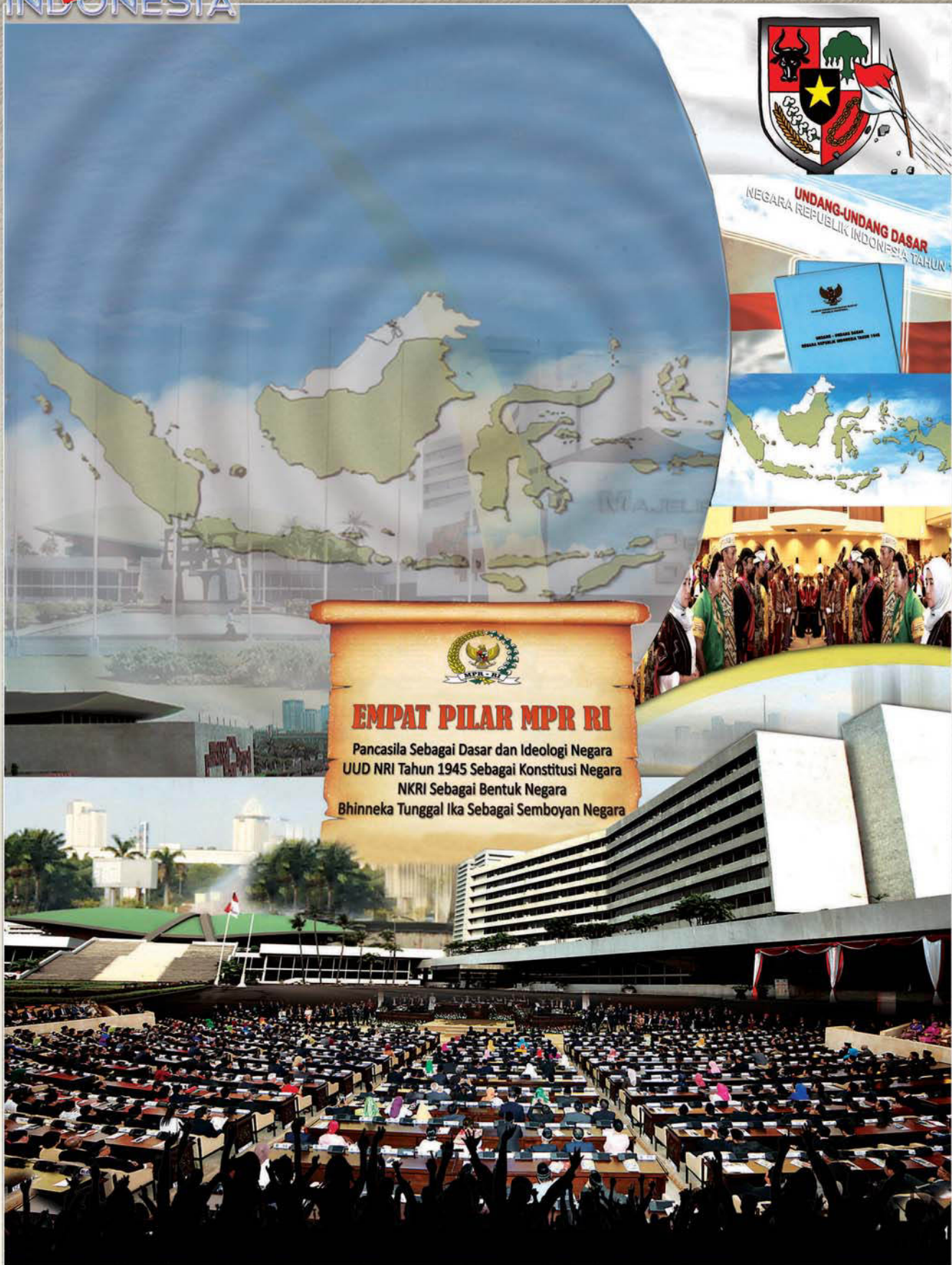
ISSN 0854-6371

9 770854 637158

INI BARU
INDONESIA



INI BARU
INDONESIA



EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



**MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**

MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
**PANDUAN PEMSYARAKATAN
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
Seuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat

MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
**UNDANG - UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
**KEDUDUKAN, TUGAS
DAN WEWENANG MPR**

MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
**KETetapan
MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERUBAHAN TERTAMBAH MATERI DAN STATUS HUKUM
KETetapan MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DAN KETetapan MAJLIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1980 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002**



Daftar Isi

EDISI NO.03/TH.XII/MARET 2018



08 MAJELIS KHUSUS Sidang Paripurna MPR RI

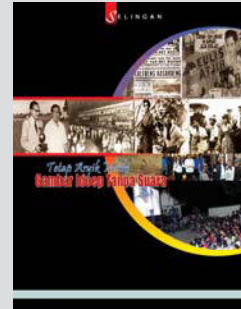
MPR menggelar sidang paripurna penetapan dan pengucapan sumpah tiga pimpinan baru. Penambahan tiga pimpinan baru MPR ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik pada MPR.



12 Majelis Utama Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba



30 Nasional Kunjungan Delegasi Ketua Senat Republik Kazakistan



39 SELINGAN Industri Film Indonesia



78 Profil Hamka Haq

Pengantar Redaksi	04
Opini	06
Kolom	20
Bicara Buku	47
Gema Pancasila	48
Debat Majelis	68
Aspirasi Masyarakat	70
Varia MPR	71
Wawancara	72
Figur	74
Ragam	76
Catatan Tepi	82



COVER

Edisi No.03/TH.XII/Maret 2018
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Indonesia Darurat Narkoba

SEJUMLAH data tentang narkotika dan bahan (obat) berbahaya (narkoba) membuat kita miris dan mengurut dada. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan pengguna (penyalahguna) narkoba di Indonesia sudah mencapai lebih dari 5 juta orang. BNN juga mencatat setiap hari antara 40 sampai 50 orang meninggal akibat narkoba. Belum lagi kerugian materiil yang mencapai Rp 63,1 triliun. Ditambah lagi penyelundupan narkoba ke Indonesia yang tiada henti. Terakhir, pada Februari lalu, aparat berhasil menggagalkan penyelundupan lebih dari dua ton sabu. Malah, data pada 2016 menyebutkan, ada sekitar 250 ton sabu yang masuk ke Indonesia.

Keadaan seperti itu membuat Indonesia tidak hanya darurat narkoba, tetapi sudah dalam

kondisi sangat berbahaya. Inilah persoalan besar bangsa. Pasalnya, sasaran narkoba sudah masuk dalam semua level dan tingkatan, mulai dari anak sekolah dasar, remaja, generasi muda, dan merambah ke semua profesi mulai dari pegawai negeri sipil, tentara, polisi, hakim, pejabat pemerintah, artis, dan lainnya. Narkoba merusak moral dan mengancam masa depan bangsa.

Tentu MPR pun prihatin dengan situasi seperti itu. MPR tidak hanya mengawal ideologi dan konstitusi tapi juga *concern* dengan persoalan bangsa, seperti narkoba, kemiskinan, kesenjangan, dan lainnya. Dalam konteks itulah, majalah *Majelis* edisi ini mengangkat persoalan narkoba dalam laporan utama. □



ILUSTRASI: SUSTHANTO



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

Selfi Zaini

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, M. Rizal,

Suryani, Tugiyana, Heri Herawan,

Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Muhamad Jaya

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Supriyanto, Euis Karmilah,

Sucipto

REPORTER

Indra Ardianto, Ana Suzana,

Mery S. Magdalena, Rahayu

Nafisah, Sugeng Cahyono

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Supriyanto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

STAF DISTRIBUSI

Armansyah, Retno Megahwatie,

Amiruddin, Dhita Fitasari

Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah bertampang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 NKRI Sebagai Bentuk Negara
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara





ISTIMEWA

Kasus Novel Baswedan Harus Dituntaskan

KAMIS pagi, 11 April 2017, usai shalat Subuh di Mushola dekat rumahnya di sebuah wilayah Jakarta, seorang pria berjalan sendirian menuju rumahnya. Pagi itu, ternyata menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh pria tersebut. Tiba-tiba ia diserang oleh dua orang berboncengan sepeda motor dengan menyiramkan air keras tepat ke wajahnya dan mengenai matanya.

Siraman air keras tersebut sangat fatal, pria itu merasakan sakit dan panas luar biasa. Esoknya jagat pemberitaan nasional dan media sosial sangat riuh dan ramai memperbincangkan kasus penyiraman tersebut.

Pria yang menjadi korban ternyata bukan orang sembarangan, ia adalah Novel Baswedan, salah seorang penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat itu sedang mengurus berbagai kasus besar. Publikpun lantas mengaitkan aksi penyerangan tersebut dengan berbagai kasus korupsi besar yang sedang ditanganinya.

Penyidik KPK tersebut lantas diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan mata hingga sembilan bulan lamanya. Selama dalam perawatan, kasusnya seperti menjadi misteri tak terpecahkan. Pihak kepolisian ternyata sudah melakukan aksi untuk mengungkap kasus tersebut. Kepolisian mengungkapkan telah memeriksa lebih dari 68 orang saksi dan mengklaim telah memeriksa ratusan rekaman kamera pengawas serta menyita sejumlah barang bukti lain.

Kamis (22/2/2018), Novel Baswedan kembali ke Jakarta meski kondisi mata kirinya belum pulih total. Begitu mendarat di bandara, Novel langsung menuju gedung KPK. Di sana telah berkumpul ratusan aktifis penggiat antikorupsi dan seorang Pimpinan KPK Laode Syarief, serta beberapa mantan Pimpinan KPK ikut pula menyambut kedatangan Novel.

"Saya berharap dalam waktu tidak lama, pengobatan mata saya bisa tuntas dan saya bisa bertugas lagi di KPK seperti biasa. Saya

juga berharap pihak kepolisian bisa segera menuntaskan kasus ini, segera menangkap pelaku dan menemukan motif penyerangan sebenarnya. Saya harap kawan-kawan di KPK pasca kejadian yang menimpa diri saya jangan takut dan menurunkan produktifitas kerja, malah harus semakin berani untuk memberantas korupsi. Jangan sampai kemenangan di tangan mereka," harap Novel Baswedan.

Kabar kembalinya Novel Baswedan ke Jakarta memantik beberapa respon dari beberapa tokoh nasional, salah satunya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhasan. Zulhasan menegaskan bahwa kasus yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan harus segera dituntaskan, jangan dibiarkan berlarut-larut.

"Saya harap kasus yang sudah lama, ya sekitar hampir 1 tahun atau tepatnya 10 bulan, ya harus ada penjelasan total. Saya rasa harus dituntaskan itu kasusnya, karena jika tidak akan berdampak negatif merugikan pemerintah. Publik akan mengira-ngira ada apa atau malah berasumsi yang tidak-tidak.," kata Zulhasan di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Zulhasan mengaku, sangat miris melihat perkembangan kasus Novel yang belum ada titik terangnya. "Harus dijelaskan kenapa tidak tuntas. Jika memang sulit, kendalanya apa, sulitnya dimana? Jika memang tidak bisa dituntaskan, kenapa? Ini perlu penjelasan semua. Jika dibiarkan berlarut-larut terus menjadi 'PR' pemerintah, dan akan terus membayangi hingga pilkada dan pilpres," tandasnya.

Dalam kesempatan lain, Komisioner KPK Laode Syarief menjelaskan, dari informasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz bahwa perkembangan penanganan kasus Novel masih berjalan, tim masih bekerja. "Semoga tersangka penyerangan bisa ditemukan secepatnya," katanya. □

DER

Indonesia Darurat Narkoba

SELURUH masyarakat Indonesia tersentak, kaget, dan hampir tak percaya kabar masuknya lebih dari 1 ton narkoba jenis sabu-sabu bernilai lebih dari 1 triliun rupiah oleh warga negara Taiwan menggunakan kapal berbendera Singapura MV Sunrise Glory ke wilayah Indonesia. Untungnya, upaya penyelundupan barang

haram itu berhasil digagalkan aparat hukum gabungan TNI, BNN, Polri dan Direktorat Bea Cukai di Batam, Kepulauan Riau pada Minggu (11/2/2018).

Dengan jumlah sebesar itu, masyarakat Indonesia sangat khawatir bahwa Indonesia sudah menjadi pangsa pasar narkoba



ISTIMEWA

internasional. Menkopolkam RI Jenderal TNI (purn.) Wiranto juga mengaku kaget dengan hasil tangkapan sabu-sabu tersebut. “Satu gram sabu-sabu saja bisa membuat 5 orang teller, bagaimana kalau sampai 1 ton lebih. Artinya, TNI, Polri, dan BNN berhasil menyelamatkan 5 juta manusia Indonesia,” katanya di Jakarta.

Menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso, kekekhawatiran ke arah tersebut sangat beralasan. Pihak BNN pun cukup kesulitan dalam menangkal serbuan masuknya narkoba ke wilayah NKRI yang luas. “Kondisi geografis Indonesia sangat memungkinkan para pengedar menyelundupkan narkotika melalui banyak jalur ‘tikus’. Tapi, kami bersama lembaga terkait akan terus berusaha menghadang dan memberantas narkoba walaupun sesulit apapun,” katanya.

Kerja keras dan luarbiasa BNN, TNI dan Polri serta Bea Cukai

pantas diberikan penghargaan setinggi-tingginya, sebab berhasil menggagalkan upaya perusakan bangsa Indonesia dengan narkoba. Tapi, jangan pula berpuas diri, pengedar-pengedar narkoba di luar sana pasti akan kembali mencari celah untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Kewaspadaan tinggi perlu ditingkatkan, bukan hanya oleh aparat berwenang, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Indonesia darurat narkoba ternyata sudah dinyatakan sejak zaman orde baru.

Komjen Budi Waseso mengungkapkan, Indonesia dinyatakan darurat narkoba sejak 1971. Ketika itu, Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menyatakan, Indonesia sedang dalam kondisi darurat narkoba. Dan, sampai kini, perjuangan Indonesia dalam memerangi masuknya narkotika masih terus berlangsung. □

DER

Tahun Politik, Medsos ASN Akan Dipantau Pemerintah

TAHUN politik 2018 dan 2019 adalah momen penting buat bangsa Indonesia dalam konteks pelaksanaan demokrasi. Berbagai fenomena dan kejutan seputar tahun politik muncul, diantaranya keluarnya surat edaran pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tentang akan adanya pemantauan medsos para Aparatur Sipil Negara (ASN), juga para pimpinan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur dan Bupati/Walikota.

Soal akan ada pemantauan medsos ASN memang tidak secara eksplisit dituangkan dalam surat edaran bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani Menteri PAB-RB Asman Abnur. Surat tersebut hanya mengingatkan terkait netralitas ASN dalam proses Pilkada dan Pilpres.

Dalam surat tersebut disebutkan soal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil yang menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah ‘netralitas’. Ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Terkait hal itu, medsos ASN/PNS akan dipantau pemerintah.

“PNS// dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan/gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial,” ujar Asman sesuai bunyi surat edaran.



ISTIMEWA

“Jika melanggar ketentuan tersebut akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin. Dalam surat yang ditetapkan pada 27 Desember 2017 itu disebutkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Sanksinya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun,” tambahnya.

Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, informasi *hoax* belakangan ini sangat membanjiri public. Jika tidak disikapi dengan baik akan sangat berbahaya, konflik dimulai dari kesalahpahaman. Mediana bermacam-macam, salah satu yang paling luarbiasa adalah di ranah media sosial.

“Munculnya *hoax* ini antara lain karena etika kehidupan berbangsa diabaikan. Padahal MPR memiliki Ketetapan (Tap) tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang masih berlaku, itu mesti dipahami dan dipraktik oleh masyarakat,” katanya di Jakarta, awal Maret 2018.

HNW menekankan, semua elemen masyarakat Indonesia harus mewaspadaai itu semua apalagi di tahun politik. □

DER

Sidang Paripurna MPR

Ketua MPR Pimpin Sidang Paripurna Pelantikan Tiga Pimpinan Baru MPR



MPR menggelar sidang paripurna penetapan dan pengucapan sumpah tiga pimpinan baru. Penambahan tiga pimpinan baru MPR ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik pada MPR.

KETUA MPR Zulkifli Hasan memimpin sidang paripurna penetapan dan pengucapan sumpah tiga pimpinan baru di Ruang Rapat Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/3/2018). Tiga pimpinan MPR yang dilantik adalah DR. H. Ahmad Basarah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), H. Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan

Drs.H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penambahan tiga pimpinan baru MPR ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), tepatnya pada Pasal 427A. Adapun petikan keputusan MPR tersebut bernomor No 7/2018 tentang Penambahan Pimpinan MPR Masa Jabatan 2018-2019.

Sidang paripurna pelantikan tiga pimpinan baru MPR ini dihadiri para Wakil Ketua MPR, yaitu Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta, serta sembilan fraksi di MPR dan Kelompok DPD. "Fraksi PPP telah mengirim surat untuk tidak hadir dalam rapat paripurna ini. Sembilan fraksi dan kelompok DPD hadir," kata Zulkifli

Hasan saat membuka rapat paripurna.

Sidang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua MPR. Pengucapan sumpah dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan," ucap Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar bersamaan saat mengucapkan sumpah.

Pelantikan ini disaksikan sejumlah menteri kabinet kerja, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ruang Rapat Paripurna I



Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Hadir pula Wakil

Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra.

Dalam sambutan usai pengucapan sumpah, Zulkifli Hasan berharap, kehadiran

tiga Wakil Ketua MPR yang baru akan memperkuat kelembagaan dan kinerja MPR untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Berbagai pendapat termasuk juga hasil survei maupun hasil riset hampir sama, yaitu tingkat kepercayaan yang rendah pada lembaga-lembaga legislatif,” katanya.

Zulkifli mengajak pimpinan dan para anggota MPR untuk memperbaiki kepercayaan publik. “MPR sebagai lembaga akan fokus pada upaya-upaya kongkret untuk memperbaiki kepercayaan publik,” ujarnya.

“Wakil Ketua baru saat ini adalah tambahan tenaga atau sumber daya untuk memperbaiki kinerja MPR,” ucap Zulkifli. □

DER

Ratusan Jurnalis Liput Pelantikan Tiga Pimpinan Baru MPR



PELANTIKAN tiga wakil ketua MPR yang baru periode 2014 – 2019 merupakan peristiwa politik yang langka. Tak heran pengucapan sumpah tiga wakil ketua MPR, yaitu Dr. Ahmad Basarah (PDIP), H. Ahmad Muzani (Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB) dalam sidang paripurna MPR di Ruang Rapat Gedung Nusantara, Senin (26/3/2018), menarik perhatian para jurnalis dari berbagai media online, cetak, maupun elektronik.

Ratusan wartawan memenuhi depan Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara maupun balkon di dalam gedung itu. Mereka dengan setia mengikuti dan menunggu narasumber yang hadir.

Salah satu wartawan dari Harian Warta Kota, Henry Lopulan, bahkan harus bergeser dari pos liputannya demi meliput pelantikan tersebut. Henry biasa meliput di Istana Negara namun pada hari itu oleh pihak redaksi ditugaskan ke Komplek Parlemen.

Kesempatan tersebut rupanya juga dimanfaatkan oleh Henry untuk bertemu salah satu wakil ketua baru MPR idolanya, yakni Muhaimin Iskandar. Menurut Henry, politikus dari PKB itu sudah digadag-gadag menjadi calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2019. "(Cak Imin) pernah tercatat sebagai anggota DPR termuda, dan sekarang menjadi Wakil Ketua MPR," puji Henry.

Bila Cak Imin mempunyai penggemar, Ahmad Basarah pun juga mempunyai fans. Salah seorang pewarta mengungkapkan dirinya adalah adik kelas Ahmad Basarah saat kuliah di IISIP, Jakarta. Menurutnya politikus dari PDI Perjuangan itu merupakan sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus. "Sudah menonjol sejak masa kuliah dan ketika menjadi Ketua GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)," ujar pewarta yang tak mau diungkap namanya itu. □

EFP



Inilah profil singkat tiga pimpinan MPR tambahan:

Dr. H. Ahmad Basarah

Zulkifli Hasan: Ahmad Basarah, MPR adalah Tempat Terbaik Bagi Profesor Pancasila



AHMAD Basarah (49) adalah satu dari tiga kandidat Pimpinan MPR tambahan yang kerap disebut oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Tanpa ragu, Ketua MPR mengatakan, Basarah adalah "Profesor Pancasila". Karena itu, tempatnya yang paling tepat adalah di MPR. Bahkan, saat bertemu Megawati Soekarnopuri, Zulkifli tak segan-segan meminta agar Basarah lah yang menjadi Wakil Ketua MPR

tambahan, mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Entah karena permintaan itu atau bukan, nyatanya Basarah lah yang dilantik menjadi Pimpinan MPR tambahan, bersama Ahmad Muzani dari Gerindra dan Muhaimin Iskandar dari PKB. Tetapi, melihat rekam jejak dan sepak terjangnya, tidak berlebihan jika pada akhirnya, pria yang akan berulang tahun ke 50 pada 16 Juni nanti ini menjadi Wakil Ketua MPR mewakili PDI Perjuangan.

Rasanya, sanjungan Ketua MPR terhadap Basarah tidaklah berlebihan. Terlebih setelah melihat keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Diponegoro, Semarang. Basarah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude setelah menempuh studi S-3 selama 2 tahun 39 hari, dengan nilai kumulatif 3,94. Ia berhasil mempresentasikan disertasinya yang berjudul Eksistensi Pancasila sebagai Tolok Ukur dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai politisi, Basarah bukanlah sosok kemarin sore. Ia adalah salah satu politisi di PDI Perjuangan yang sudah malang melintang merasakan asam garam dunia politik. Baskara, begitu sapa akrabnya, sudah tiga periode duduk di kursi legislatif DPR RI (1999-2004, 2009-2014, dan 2014-2019). Oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Basarah juga dipercaya memegang amanat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR dan Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Capaian keberhasilan Basarah di ranah politik tak lepas dari pengalaman panjangnya sebagai aktivis mahasiswa. Ia adalah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Basarah pernah menjabat Sekretaris Jenderal Presidium GMNI tahun 1996-1999. Baskara tercatat sebagai tokoh aktivis pergerakan yang kritis. Ia berani melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Basarah termasuk generasi awal mahasiswa tahun 1990-an yang terlibat langsung lahirnya Era Reformasi.

Pria yang sering berbaju batik ini tampaknya memang telah memilih jalan ideologi sebagai cara perjuangannya. Baskara sengaja memilih jalan sunyi ideologi yang memang kurang diminati oleh sebagian besar anggota parlemen lainnya. Menurutnya, karut marut sistem bernegara Indonesia yang terjadi saat ini justru bersumber dari hulunya, yakni dilupakannya Pancasila sebagai dasar falsafah, batu pijakan dan bintang penuntun bangsa.

Untuk memantapkan jalan ideologinya itu, Ahmad Basarah juga telah menerbitkan buku berjudul BUNG KARNI, ISLAM DAN PANCASILA. Buku tersebut adalah intisari dari karya disertasi doktoralnya yang ia dedikasikan untuk menjadi jembatan pemikiran antara Islam dan Nasionalisme dan juga antara golongan Islam dan golongan Nasionalis. □

MBO

H. Ahmad Muzani

Ortega Jadi Wakil Ketua MPR



SEIRING berakhirnya pembahasan revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang kemudian menghasilkan UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 beberapa waktu lalu, nama Ahmad Muzani disebut-sebut dari satu dari tiga calon (tambahan) Wakil Ketua MPR RI mewakili Fraksi Gerindra. Kepastian Muzani yang menduduki jawaban itu setelah ada konfirmasi dari Wakil Ketua Umum DPP Partai

Gerindra, Dr. Fadli Zon.

Munculnya nama suami Himmatul Aliyah ini sebagai calon Wakil Ketua MPR tambahan sebenarnya tidak begitu mengherankan. Pasalnya, pria kelahiran Tegal, 15 Juli 1968, ini merupakan salah satu orang kepercayaan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan kedekatan Muzani dengan Prabowo terjadi jauh sebelum Partai Gerindra lahir. Ia juga pernah bekerja menjadi manajer perkebunan kelapa sawit milik putera bagawan ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Tidak itu saja, Muzani juga terlibat aktif dalam membidani lahirnya Partai Gerindra. Jadi, wajar jika nama Ahmad Muzani dipilih dan ditunjuk menjadi pimpinan MPR di penghujung periode 2014-2019.

Meski relatif muda, Muzani bukanlah sosok yang minim pengalaman dalam dunia politik. Sebelum di Gerindra, dia sudah bergabung dengan partai Bintang Reformasi, partai yang diprakarsai oleh da'i sejuta umat, K.H. Zainuddin MZ (alm). Di partai ini Muzani tercatat sebagai salah seorang pendiri, dan pernah menjabat wakil sekretaris jenderal.

Pergulatannya di dunia politik banyak didukung oleh pengalaman masa remajanya yang memang aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah memimpin organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), sebelum melanjutkan pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta. Dari situ Muzani menekuni dunia kewartawanan, dan makin banyak memiliki relasi dengan tokoh-tokoh nasional.

Pada 2009, Muzani mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I, meliputi Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, dan Metro. Usahanya menjadi anggota legislatif berjalan mulus. Ia berhasil melenggang ke Senayan dengan perolehan suara 24.723. Kini, di tahun keempat pada periode keduanya (2014-2019) sebagai anggota DPR, Muzani dilantik menjadi Wakil Ketua MPR. Berbekal sebagai anggota DPR, Sekjen DPP Partai Gerindra, dan Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Muzani diharapkan mampu menjalankan tugas politik kebangsaan yang selama ini didengung-dengungkan oleh MPR.

Muzani sendiri berharap, kehadiran sebagai pimpinan MPR yang baru bersama Ahmad Basarah dan Muhaimin Iskandar sebagai mampu meningkatkan kinerja MPR, sehingga menghasilkan *output* yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ini penting agar anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai penambahan pejabat negara tak sia-sia. Semoga. □

MBO

Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si

Politisi Yang Piawai Memainkan Perannya



DI AWAL tahun politik 2018, nama Muhaimin Iskandar (51), ramai dibicarakan khalayak. Bukan karena keanggotaannya di DPR RI atau jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi karena dukungan para simpatisannya untuk mendeklarasikan Cak Imin sebagai kandidat Wakil Presiden pada Pemilu 2019.

Pembicaraan tentang Cak Imin ini makin kuat bersamaan waktu dengan semakin maraknya spanduk dukungan terhadap pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966 ini. Di berbagai tempat, mulai kota hingga desa di Jawa dan luar Jawa bertebaran baliho pencalonan sosok yang menamakan dirinya "panglima santri" sebagai calon wakil presiden.

Sementara isu pencapresan ini terus bergulir, lalu muncul rencana penambahan pimpinan MPR seiring dengan perubahan UU No. 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Lalu, nama Cak Imin, begitu Muhaimin Iskandar biasa disapa, disebut sebagai salah seorang yang menduduki pos pimpinan MPR (tambahan).

Kepastian tentang hal itu terjadi setelah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, beberapa hari sebelum pelantikan, mengumumkan bahwa Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB termasuk di antara calon tambahan pimpinan MPR. Dan, benar, Senin (26/3/2018), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) era SBY ini termasuk di antara tiga pimpinan MPR yang mengucapkan sumpah janji sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Pengalaman organisasi dan karier politik Cak Imin yang panjang membuat dia layak menjadi satu Pimpinan MPR. Di bidang organisasi, Cak Imin tercatat pernah menjabat Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial UGM Jogjakarta (1989), anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fisip UGM (1990), Ketua Cabang PMII Jogjakarta (1990-1991), dan Ketua Umum PB PMII (1994-1997).

Sebelum aktif di dunia politik, Cak Imin pernah menjadi staf pengajar di Pesantren Denanyar Jombang (1980-1983), sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LIKS) Jogjakarta (1989), dan Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum Jakarta (1992-1994). Selain itu, ia pernah aktif di Hellen Keller International (1998), serta sekretaris Yayasan Semesta Ciganjur (2001).

Karir politiknya dimulai dengan ikut mendirikan PKB bersama para senior Nahdlatul Ulama (NU). Saat itu ia menjadi anggota Tim Asistensi bentukan PB NU, dengan tugas membantu Tim Lima PBNU dalam melakukan inventarisasi dan merangkum usulan dari warga Nahdliyin yang ingin membentuk partai politik. Cak Imin kemudian dipercaya menjabat Sekjen DPP PKB periode awal, mendampingi Matori Abdul Djali.

Sebagai politisi Muhaimin dikenal licin memainkan perannya. Ia bisa berkoalisi dengan siapa saja, asal sesuai dengan garis partai dan kemaslahatan umat. Namun, ia juga bisa bersikap tegas, termasuk untuk menghadapi pamannya sendiri, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. □

MBO

Menyelamatkan Bangsa dari Bahaya Narkoba

Indonesia bukan lagi sekadar darurat narkoba, namun sudah benar-benar dalam keadaan bahaya. Untuk itu, harus ada penanganan yang tegas. Penegak hukum dan masyarakat saling bahu-membahu melawan peredaran narkoba.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BADAN Narkotika Nasional (BNN) berganti nahkoda. Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Heru Winarko menjadi Kepala BNN menggantikan Komjen Pol Budi Waseso. Heru Winarko sebelumnya menjabat Deputi Penindakan KPK sejak Oktober 2015. Pelantikan Kepala BNN di Istana Negara pada Kamis, 1 Maret 2018, menandai berakhirnya sekap terjeng Budi Waseso dalam pemberantasan narkoba. Padahal, dua bulan sebelumnya, Januari dan Februari, Budi Waseso berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba besar-besaran ke Indonesia.

Dalam dua bulan pada 2018 ini, persisnya Januari hingga 22 Februari, BNN dan Kepolisian bekerjasama dengan Bea Cukai berhasil mengungkap 58 kasus penyelundupan narkoba. Tidak tanggung-tanggung, total narkoba jenis sabu yang diamankan mencapai 2.931,95 kilogram atau setara 2,9 ton. Contoh kasus itu misalnya pada 7 Februari 2018 ketika kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Sigorut-864 menangkap MV Sunrise Glory di sekitar perairan Batam, Kepulauan Riau. Kapal berbendera Indonesia dan Singapura itu mengangkut 41 karung berisi sabu seberat 1,37 ton. Berlanjut pada 20 Februari 2018, tim gabungan Satgas Khusus Mabes Polri

dan Ditjen Bea Cukai menangkap kapal ikan asal Taiwan di perairan Karang Helen Mars, yang membawa 81 karung berisi 1,6 ton sabu.

Jelaslah bahwa Indonesia menjadi target penyelundupan narkoba. Apalagi posisi Indonesia sebagai pasar potensial berdekatan dengan sindikat narkoba di segitiga emas (*the golden triangle*) meliputi Thailand, Laos, dan Myanmar. Ditambah lagi, produsen sabu di Cina. Inilah yang membuat peredaran narkotika dan bahan (obat) berbahaya (narkoba) semakin marak (*lihat bagian kedua, "Indonesia Dikepung Narkoba"*).

Ancaman itu sudah terbukti. BNN menyebutkan sedikitnya ada sekitar 5 juta pengguna (penyalahguna) narkoba di Tanah Air. Parahnya, setiap hari sekitar 40 sampai 50 orang meninggal akibat narkoba. Selain itu, kerugian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp 63,1 triliun. Menurut catatan BNN, di Indonesia terdeteksi ada sekitar 60 jaringan pengedar narkoba. Sepanjang 2017 lalu, BNN telah menangkap 58.365 orang dan telah dijadikan tersangka. Pada tahun yang sama BNN mengungkap 400 ribu kasus narkoba. Dari jumlah itu sebanyak 79 orang ditembak mati.

BNN tidak pernah kendur memberantas narkoba. Namun, narkoba



hasil tangkapan BNN diperkirakan jumlahnya lebih kecil dibanding narkoba yang berhasil lolos dan diedarkan ke konsumen. Mengutip data BNN, pada 2016, sabu buatan Cina yang masuk ke Indonesia mencapai 250 ton. Sabu sejumlah itu gampang diserap pasar. Peralnya, jumlah pengguna narkoba, menurut penelitian Universitas Indonesia, mencapai 6,4 juta orang. Bila setiap pekan seseorang mengkonsumsi 1 gram narkoba jenis sabu, maka pasar sabu di Indonesia membutuhkan pasokan 300 ton.

Hal lain yang menjadi masalah serius adalah narkotika jenis baru yang juga berkembang pesat. Saat ini dunia tengah diguncang oleh narkotika jenis baru (new psychoactive substance/NPS). Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODS) mencatat

ada 739 NPS. Sementara itu, BNN mencatat hingga akhir 2017, di Indonesia terdapat 71 jenis NPS yang beredar. Celaknya, dampak negatif NPS ini jauh lebih membahayakan ketimbang narkotika konvensional. Sekadar contoh, ganja sintetis dengan nama populer seperti tembakau gorilla, hanoman, sun go kong, komodo, dan ganesha menimbulkan efek telor yang lebih dahsyat dibandingkan tanaman ganja. Pengguna ganja sintetis ini berpotensi melukai orang, bahkan sampai depresi dengan keinginan bunuh diri.

Ancaman yang Sangat Membahayakan

Sudah tepat bila Indonesia dikatakan darurat narkoba. Sebutan itu bukan lagi sebagai slogan semata, tapi benar-benar berada pada kondisi sangat berbahaya. Masa depan bangsa sedang terancam

dengan membanjirnya narkoba, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam jumlah yang luar biasa. Tak heran bila Pimpinan MPR pun ikut wanti-wanti mengingatkan bahaya dan ancaman narkoba ini, karena sudah menyangkut persoalan besar bangsa.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengakui bahwa narkoba ini sudah menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan bangsa. "Dalam pidato saya berulang kali mengatakan bahwa ancaman terbesar bangsa ini adalah serangan narkoba. Bangsa asing menggunakan narkoba untuk mengintervensi bangsa kita," ujarnya kepada *Majelis*.

Menurut Oso, panggilan Oesman Sapta, negara asing melakukan intervensi melalui narkoba untuk merusak generasi muda Indonesia. Padahal generasi muda Indonesia memiliki nilai-nilai yang tidak mudah

dihancurkan bangsa asing. Karena itu, negara asing menggunakan cara yang paling mudah, yaitu merusak moral generasi muda melalui narkoba. “Kalau generasi muda sudah rusak moralnya karena terkena narkoba, maka masa depan bangsa itu pun akan hancur,” tegas Oso.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding juga memiliki pandangan yang sama dengan Oso. Dia sangat prihatin dengan peredaran narkoba yang sudah menjangkau anak-anak sekolah dasar. “Peredaran narkoba ini sangat profesional dan targetnya sudah menasar anak-anak sekolah, anak-anak bangsa usia dini. Bahkan ada anak-anak perempuan SMP yang menjadi target bandar narkoba. Ini sudah mengerikan. Ini merupakan upaya perusakan luar bisa, merusak anak-anak kita luar dan dalam,” paparnya kepada *Majelis*.

Tentu saja, anggota Komisi III DPR ini prihatin dengan peredaran narkoba sekarang ini. Dia melihat para pengedar narkoba jeli karena anak-anak remaja sedang mencari jati dirinya sehingga menjadi target narkoba. “Pergaulan remaja juga menjadi wadah dan medan para pengedar narkoba mencari konsumen. Bisa saja awalnya gratis, atau meskipun harus membeli tapi dengan harga murah. Tapi ketika



Deding H. Iskak



Abdul Kadir Karding

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sudah ketagihan dan kecanduan, mereka akan tergantung pada pengedar,” katanya.

Tak jauh berbeda, anggota MPR dari Partai Golkar Deding H. Iskak mengungkapkan bahwa mafia pengedar narkoba sudah menguasai Indonesia. Dengan jumlah pemakai narkoba yang sudah melebihi 5 juta orang, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para bandar narkoba internasional. “Ini merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak jenis kejahatan lain, seperti miras, memperkosa, membunuh dan mencuri. Indonesia sudah masuk katagori darurat narkoba,” ujarnya kepada *Majelis*.

Deding juga melihat bahwa peredaran narkoba di Indonesia bukan sekadar kepentingan bisnis belaka. Sependapat dengan Oso, Deding menyebut ada kepentingan lain dalam peredaran narkoba, yaitu ingin melemahkan Indonesia melalui narkoba. “Sebab, semua level masyarakat sudah terkena, mulai dari anak muda, kiai, hakim, tentara, polisi, artis, pejabat, dan lainnya,” ucapnya.

Lalu bagaimana melindungi anak-anak muda, generasi penerus bangsa, dari ancaman narkoba yang sangat membahayakan itu? Jawabnya adalah melalui pendidikan. Menurut Abdul Kadir Karding, keberadaan BNN memang penting dalam melawan peredaran narkoba, namun yang lebih penting lagi adalah pendidikan yang baik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan

mencantumkan pelajaran terkait dengan bahaya narkoba. Artinya, memasukkan pengetahuan tentang bahaya narkoba dalam kurikulum pendidikan.

“Penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya mengancam kalangan remaja dan pemuda, tapi juga mengancam anak-anak. Bahkan ditemukan ekstasi bergambar boneka kecil warna warni yang menarik. Ini berbahaya. Karena itu pendidikan (tentang narkoba) sangat penting sekali,” katanya.

Seto Mulyadi, psikolog dan pendidik, juga berpendapat sama. Pendidikan menjadi penting dalam menangkal narkoba, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah. “Mulai sekarang pendidikan itu penting, terutama di sekolah dan di rumah-rumah. Peran guru dan orang tua juga sangat dibutuhkan. Sebab, kemasan narkoba sekarang sangat bermacam-macam. Ada yang berbentuk permen. Makanan kecil itu berbahaya sekali. Dan itu sangat jahat sekali. Karena itu para orang tua mesti mewaspada,” katanya kepada *Majelis*.

Venna Melinda, anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, juga melihat akar permasalahan diawali dari keluarga. Dalam hal ini dia melihat peran orang tua menjadi penting. “Kita dihadapkan pada peran orang tua. Selain anak berada di sekolah, di bawah bimbingan guru maka tanggung jawab ada pada orang tua,” katanya kepada *Majelis*.

Orang tua, menurut Venna Melinda, harus

peduli atau paham tentang narkoba di zaman sekarang ini seperti peredaran narkoba lewat permen-permen. “Orang tua harus paham jenis-jenis narkoba saat ini juga memahami psikologis anaknya, seperti perubahan perilaku pada anak. Pada dasarnya narkoba adalah akibat pergaulan atau awalnya hanya coba-coba,” ujarnya.

“Orang tua harus menjadi pejuang untuk menyelamatkan anaknya dari kecanduan narkoba, sekalipun anaknya sudah sembuh maka dia harus memberikan testimoni kepada orang tua lain, bentuknya sosialisasi anti narkoba,” sambungnya.

Dalam konteks pendidikan, MPR bisa berperan dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR. Sosialisasi ini memberi pemahaman kembali akan nilai-nilai luhur bangsa. Penanaman nilai-nilai Empat Pilar ini diharapkan menjadi karakter yang dengan sendirinya bisa membentengi terhadap gempuran godaan narkoba apapun bentuknya.

“MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar yang di dalamnya ada Pancasila. Saya rasa sosialisasi itu masuk dalam pendidikan atau membentuk karakter bangsa sehingga menjadi sosok yang berkarakter dan berbudi luhur. Anak yang berkarakter akan semakin mudah membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya dan lingkungannya,” jelas Seto Mulyadi.

Tindakan Tegas

Selain pendidikan sebagai upaya preventif menangkal narkoba yang dilakukan sejak dini di sekolah, pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak keadilan juga harus bersikap tegas menghadapi narkoba. Sikap tegas, seperti menjatuhkan hukuman mati atau seberat-beratnya bagi bandar narkoba, diperlukan untuk menimbulkan efek jera. Bahkan, ada keinginan untuk melakukan “tembak mati” kepada bandar narkoba.

Seto Mulyadi setuju dengan tindakan keras terhadap bandar narkoba. “Saya sangat setuju pengedar atau bandar narkoba dihukum berat bahkan dihukum mati. Sebab kerusakan yang ditimbulkan akibat narkoba ini sangat merusak mental, jasmani, dan jiwa anak bangsa. Generasi penerus bangsa



Venna Melinda

akan menjadi rusak,” tegasnya.

Soal penegakan hukum terhadap pelaku kasus narkoba juga menjadi perhatian Deding Iskak. Dia melihat kejahatan narkoba ini sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Karena itu, perlu tindakan tegas terhadap kejahatan seperti ini. “Saya setuju tembak mati bagi pengedar atau bandar narkoba. Untuk kasus narkoba tidak ada pilihan lain kecuali tindakan keras untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya,” tandas Deding.



Seto Mulyadi

Namun, bagi Venna Melinda, tembak mati kepada pengedar dan bandar narkoba belum perlu dilakukan. Secara pribadi Venna Melinda tidak setuju dengan tembak mati bagi pengedar narkoba. Ia lebih memilih tindakan pencegahan dan menyatakan negara dalam keadaan darurat narkoba. Kemudian melakukan gerakan nasional melawan narkoba bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Perempuan dan Anak.

Memang, dalam pemberantasan narkoba ini semua pihak harus bertanggung jawab. Pemberantasan narkoba bukan hanya diserahkan kepada BNN, tapi juga melibatkan kepolisian, TNI, aparat penegak hukum lainnya. Masyarakat pun harus dilibatkan dalam pemberantasan narkoba. Menurut Oso, Indonesia akan tetap menjadi sasaran empuk dalam peredaran narkoba oleh jaringan internasional.

“Indonesia menjadi sasaran empuk bagi mafia narkoba internasional. Sebab, jumlah penduduk Indonesia 250 juta dengan 35% generasi muda. Setiap hari tercatat sekitar 50 orang mati karena narkoba. Coba bayangkan, berapa besar pemakai narkoba setiap hari. Jadi, pengedar dan bandar narkoba ini memang harus dihajar,” katanya dengan geram.

Tindakan tegas dan keras kepada pengedar dan bandar narkoba sangat perlu untuk menimbulkan efek jera. Padahal para pengedar dan bandar narkoba mengetahui sanksi hukum sesuai dengan UU tentang Narkotika dan UU tentang Psicotropika. “Mereka mengetahui bahwa ada hukuman mati. Jadi kita tidak perlu basa-basi dalam pemberantasan narkoba,” ujarnya.

Apakah UU tentang Narkotika perlu direvisi seperti keinginan banyak pihak? Oso menjawab, “Apa yang diatur dalam UU tentang Narkotika sudah lebih dari cukup. Persoalannya adalah pelaksanaan UU itu harus konsisten. Pelaksanaan UU tentang Narkotika ini belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan.” □

Tim Majelis

Indonesia Dikepung Narkoba

Narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari 11 negara dan dikendalikan oleh 72 jaringan internasional. Negara penyuplai itu di antaranya Cina, Taiwan, Myanmar, Laos, India, Afrika Barat, Afrika Timur, Malaysia, dan Singapura.



BERBICARA tentang narkoba, perlu pemahaman lebih dulu perbedaan antara narkotika dan bahan berbahaya. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan bahan (obat) berbahaya. Semula narkoba merupakan jenis bahan atau zat yang digunakan dalam pengobatan. Narkotika digunakan untuk obat bius, sedangkan bahan berbahaya fokusnya pada psikotropika (untuk kesehatan jiwa), seperti obat penenang, dan sejenisnya. Tapi kemudian bahan atau zat yang semula untuk obat itu disalahgunakan.

Narkotika terdiri dari tiga golongan besar, yakni ganja (*cannabis sativa*) beserta turunan atau derivatnya, candu (dari tanaman *papaver somniferum*) beserta turunannya, serta koka (dari tanaman *erythroxylon coca*) beserta turunannya. Sedangkan jenis-jenis psikotropika terdiri dari golongan I (LSD, MDA, MDMA, dan lain-lain), golongan II (PCP, metamfetamin, dan

lain-lain), golongan III (amobarbital, katina, dan lain-lain), dan golongan IV seperti diazepam, dan lain-lain. Di pasaran, MDMA dikenal sebagai ekstasi, sedangkan metamfetamin dikenal sebagai sabu-sabu.

Pada umumnya narkotika untuk jenis ganja berasal dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Indonesia. Sedangkan narkotika jenis candu dan turunannya seperti heroin berasal dari Afghanistan dan Pakistan. Narkotika jenis koka dan turunannya, seperti kokain berasal dari Peru, Bolivia, dan Kolombia. Sedangkan untuk bahan berbahaya (psikotropika) banyak berasal dari Cina.

Narkotika dan bahan (obat) berbahaya menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, yaitu menyebabkan ketergantungan psikis dan fisik atau adiksi bahkan menyebabkan kematian jika overdosis. Oleh karena itu, bahan dan zat itu diatur dalam undang-undang. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan UU No. 5 Tahun 1997 mengatur tentang Psikotropika.

Mengutip World Drug Reports yang dikeluarkan United Nation Office on Drugs and Crima tahun 2012, penggunaan narkoba jenis kokain mengalami tren peningkatan di Asia Tenggara. Tren peningkatan karena melimpahnya ketersediaan dan meningkatnya permintaan itu menciptakan pasar baru

di kawasan ini. Tren peningkatan ini juga berbanding lurus dengan peningkatan produksi amphetamine-type stimulans (ATS) seperti sabu dan ekstasi di Asia Tenggara. Menurut data Global Smart Programme tahun 2013, beberapa negara dengan penyalahgunaan ATS terbesar adalah Kamboja, Malaysia, dan Indonesia.

Sudah sejak dulu sebenarnya Indonesia menjadi sasaran atau target kejahatan narkoba, baik narkotika, psikotropika, atau bahan-bahan berbahaya. Ini disebabkan letak Indonesia yang strategis. Apalagi, secara ekonomi, Indonesia dengan penduduk yang besar merupakan negara dengan aktivitas perdagangan tersibuk di kawasan Asia Tenggara. Sejak 1990-an, narkoba jenis psikotropika seperti sabu-sabu dan ekstasi membanjiri pasar gelap di sejumlah wilayah kota besar di Indonesia. Belakangan, penyelundupan narkoba semakin mengkhawatirkan.

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan peningkatan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Pada 2012, Bea Cukai melakukan penindakan terhadap 132 kasus penyelundupan seberat 546,54 kilogram narkotika dan psikotropika. Selanjutnya pada 2013 ada 215 kasus dengan tangkapan 517,50 kilogram. Pada 2014, ada 212 kasus dengan tangkapan 316 kilogram, sedangkan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



pada 2015 ada 172 kasus dengan jumlah barang bukti 599,75 kilogram.

Tahun berikutnya, 2016, jumlah kasus penyelundupan narkoba meningkat dua kali lipat, menjadi 286 kasus dengan tangkapan 1.169,43 kilogram (1,1 ton). Pada 2017 meningkat menjadi 342 kasus dengan tangkapan 2.132,07 kilogram (2,1 ton).

Lebih parah lagi, hanya dalam dua bulan pada 2018 ini, persisnya Januari hingga 22 Februari, sudah ada 58 kasus penyelundupan narkoba yang diungkap Bea-Cukai bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian RI. Total sabu yang diamankan dari operasi itu tak tanggung-tanggung: 2.931,95 kilogram (2,9 ton).

Pada 7 Februari 2018, kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Sigurot-864 menangkap kapal MV Sunrise Glory di sekitar perairan Batam, Kepulauan Riau. Kapal berbendera Indonesia dan Singapura itu mengangkut 41 karung berisi sabu seberat 1,37 ton. Disusul pada 20 Februari 2018, tim gabungan Satgas Khusus Mabes Polri dan Ditjen Bea-Cukai menangkap kapal ikan asal Taiwan di perairan Karang Helen Mars, yang membawa 81 karung berisi 1,6 ton sabu.

Bea-Cukai juga menemukan narkotika dan psikotropika jenis baru dan tidak umum disalahgunakan di Indonesia, seperti

methylenedioxypropylone, dimethyl-tryptamine, Alprazolam, Midazolam, Diazepam, Lorazepam, Zolpidem, Triazepam, cloromethcathinone (4-CMC), 5-Fluoro AKB 48, AB-Fubinaca, dan ethylpentylone.

Dalam lima tahun ini, pelaku penyelundupan yang ditangkap masih didominasi warga negara Indonesia. Pelaku terbanyak lainnya dari Malaysia, Cina, dan Hong Kong. Selebihnya dari negara Asia Tengah, Afrika, dan Eropa. Malaysia merupakan negara asal narkotika yang paling banyak ditangani Bea-Cukai. Tapi, berdasarkan kualitas narkotika dan psikotropika terbaik, Cina dan Taiwan berada di urutan atas.

Ancaman penyelundupan narkoba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, tak bisa dilepaskan dari keberadaan sindikat narkoba di the golden triangle (segitiga emas), yang meliputi negara Thailand, Laos, dan Myanmar. Penyelundup dari tiga negara ini memang secara aktif mengedarkan narkoba, khususnya jenis kokain dan heroin. Sementara itu, produsen sabu masih berada di Cina.

Namun pabrik pengolahan sabu yang sebelumnya dipusatkan di China sepertinya mulai bergeser. Kini Taiwan dan Myanmar pun mulai memproduksi sabu dan metamfetamin. Kendati demikian, BNN belum bisa menyimpulkan sabu hampir 3 ton yang

terungkap belakangan berasal dari Cina atau Taiwan.

Sabu tangkapan hasil kerja sama BNN, Bea-Cukai, dan TNI AL beberapa waktu lalu juga disinyalir merupakan produk Myanmar. Negara Myanmar sudah lama menjadi pemasok bahan baku mentah, berupa daun, getah, dan pepohonan yang akan diolah sebagai sabu di Cina. Saat ini Myanmar justru bisa memproduksi sendiri sabu tersebut. Myanmar dan Taiwan berani membuat sendiri karena melihat pangsa pasar di Indonesia yang lebih menarik.

Indonesia menjadi tempat menarik bagi sindikat narkoba internasional karena di Indonesia tidak ada persaingan jaringan atau kartel narkoba. Berbeda dengan jaringan atau kartel narkoba di negara lain, yang saling membunuh karena persaingan bisnis. Sebut saja di Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika Latin.

Menurut BNN, narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari 11 negara dan dikendalikan oleh 72 jaringan internasional. Negara penyuplai itu di antaranya China, Taiwan, Myanmar, Laos, India, Afrika Barat, Afrika Timur, Malaysia, dan Singapura. Negara itu juga merupakan jaringan yang terkait dengan jaringan dari Pakistan, Belanda, dan Jerman. □

BSC



Oesman Sapta, Wakil Ketua MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Semua Pihak Harus Menyatakan Perang Terhadap Narkoba

PEREDARAN narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) semakin marak. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, pengguna narkoba mencapai 5 juta orang. Bahkan, setiap hari 40 – 50 orang meninggal akibat narkoba. Kerugian akibat narkoba mencapai Rp 63,1 triliun. Sepanjang 2017, BNN telah menangkap 58.365 orang. BNN juga telah mengungkap 400 ribu kasus narkoba pada 2017. Dari kasus-kasus itu, sebanyak 79 orang ditembak mati. BNN juga telah menyita 4,7 ton narkoba, lebih tinggi dari tahun 2016 yang berjumlah 3,6 ton.

BNN tak kendur memberantas narkoba. Namun, pengedar narkoba tak jera. Hampir setiap saat ada saja yang terjaring kasus narkoba. Penyelundupan narkoba dari luar pun kian gencar. Modus peredaran narkoba semakin beragam. Peredaran narkoba semakin meningkat setiap tahun.

Indonesia tidak lagi menjadi tempat transit peredaran narkoba, melainkan sudah menjadi pangsa pasar yang luar biasa. Tampaknya, Indonesia bukan lagi sekadar darurat narkoba, tapi sudah benar-benar dalam keadaan bahaya.

Bagaimana pandangan Pimpinan MPR tentang kondisi darurat narkoba itu? Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta seputar narkoba. Berikut petikannya.

Indonesia sekarang iniibanjiri narkoba. Belum lama ini terungkap penyelundupan sekitar satu ton narkoba jenis sabu di perairan Batam. Bagaimana Bapak melihat ancaman bahaya narkoba saat ini?

Saya melihat ancaman narkoba ini sangat berbahaya sekali. Tentu narkoba ini menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan

bangsa kita. Berulang kali dalam pidato, saya mengatakan bahwa ancaman terbesar bangsa ini adalah serangan narkoba. Bangsa asing menggunakan narkoba untuk mengintervensi kepentingan-kepentingan bangsa kita. Intervensi asing ini harus kita pertanyakan. Negara-negara asing yang menyelundupkan narkoba harus dikenai sanksi agar mereka tidak lagi menyelundupkan narkoba. Kita tentu harus bisa menekan mereka dengan banyaknya peristiwa penyelundupan narkoba.

Ada bandar narkoba yang mengaku apes karena tertangkap. Artinya, lebih banyak lagi bandar yang lolos. Bagaimana menurut Bapak?

Bisa jadi seperti itu. Umpamanya kita baru bisa menangkap 10%, berarti 90% lainnya lolos. Kenapa ada dugaan seperti ini? Kenapa 90% diduga bebas dan hanya 10% yang tertangkap? Apakah benar demikian. Harus

ada ukurannya untuk menyimpulkan seperti itu. Nah, kesimpulan itulah disesuaikan dengan cara mencegahnya. Sebab, kalau yang tertangkap hanya tiga ton, artinya masih ada berapa ton yang lolos. Kita tidak tahu. Jadi harus diungkap secara transparan. Kalau setiap hari 50 pemakai narkoba meninggal, tentu pemakainya sangat besar.

Kepala BNN pernah menyebutkan, masih ada narkoba yang tertahan di Timor Timur untuk masuk ke Indonesia. Jumlahnya juga hitungan ton?

Saya tidak tahu pasti. Kalau sudah disebutkan Kepala BNN Budi Waseso, tentu kita harus waspada dan mencegahnya. Kita harus upayakan jangan sampai masuk ke Indonesia. Kita memang harus hati-hati dan mewaspadai masuknya narkoba.

Apakah Bapak melihat penyelundupan narkoba ini hanya sekadar bisnis atau ada maksud lain untuk merusak generasi muda bangsa?

Narkoba merupakan intervensi dari negara asing untuk merusak bangsa kita. Sesungguhnya bangsa kita kuat karena kita mempunyai nilai-nilai. Kekuatan itulah tidak bisa dihancurkan bangsa lain. Karena itu mereka mencari cara yang paling mudah, yaitu merusak moral generasi muda kita melalui narkoba. Kalau generasi muda sudah rusak karena terkena narkoba maka masa depan bangsa itu pun akan hancur.

Jadi maraknya penyelundupan narkoba dan peredaran narkoba sekarang ini adalah untuk merusak generasi muda, bukan sekadar bisnis mencari keuntungan semata?

Ya. Bukan hanya bisnis. Ada undang di balik batu dari peredaran narkoba sekarang ini.

Bagaimana penanganan peredaran narkoba ini? Dalam penanganan terorisme dibentuk Densus 88 dan hasilnya sangat efektif memberantas terorisme. Kita sudah memiliki BNN, tetapi mengapa peredaran narkoba tidak berkurang?

Densus 88 urusannya memang detasemen khusus untuk menangani kasus-kasus terorisme. Kalau penanganan narkoba sudah dibentuk BNN. Jadi, memang

jangan hanya mengandalkan BNN dalam pemberantasan narkoba. Semua pihak dan komponen bangsa harus terlibat. Misalnya, dalam soal penyelundupan narkoba dari luar. Wilayah Indonesia sangat luas. Banyak jalur tikusnya. Penyelundupan narkoba bisa dilakukan lewat laut, bisa lewat udara. Karena itu semua pihak harus membuka mata terhadap bahaya narkoba ini. Semuanya harus menyatakan perang terhadap narkoba.

Apakah Bapak melihat pemerintah kurang tegas menghadapi bahaya narkoba?

Saya kira pemerintah sudah khawatir

memengaruhi penegakan hukum.

Menurut Bapak bagaimana jalan keluar dari darurat narkoba ini?

Semua pihak harus bertanggungjawab dalam pemberantasan narkoba. Bukan hanya diserahkan kepada BNN saja, tetapi juga melibatkan polisi, TNI, baik di darat maupun udara. Masyarakat juga harus dilibatkan. Sasarannya adalah Indonesia, negara dengan pasar yang paling empuk. Jumlah penduduk 250 juta dengan 35% adalah generasi muda. Setiap hari tercatat 50 orang mati karena narkoba. Coba bayangkan berapa besar pemakai narkoba setiap hari. Jadi narkoba ini memang harus



karena terjadi peningkatan kasus narkoba. Tapi pemerintah sudah menunjuk BNN. Kasus narkoba ini adalah intervensi dari luar yang sudah sangat mengkhawatirkan karena merusak generasi bangsa. Mungkin juga ada kerjasama dengan orang yang ada di dalam negeri. Itu sudah sangat berbahaya.

Mengapa sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap tersangka kasus narkoba masih lunak sehingga tidak menimbulkan efek jera. Bahkan ada kasus peredaran narkoba dilakukan dari dalam penjara?

Saya kira bukan karena hukumannya terlalu ringan. Para pelaku mengetahui ada hukuman mati. Tapi kita juga mengetahui bahwa hukuman mati bagi narapidana narkoba beberapa kali tertunda. Ini juga bisa

dihajar.

Apakah perlu penambahan personel dan anggaran untuk BNN?

Ini bukan soal personel dan anggaran. Ini adalah soal sistem, rencana kerja, pengawasan, soal tindakan dan keputusan-keputusan yang tegas. Jadi tidak bisa kita pakai basa-basi lagi dalam pemberantasan narkoba.

Kalau dilihat dari perundang-undangan, ada yang ingin merevisi UU tentang narkoba. Bagaimana menurut Bapak?

Apa yang diatur dalam UU tentang Narkoba sudah lebih dari cukup. Persoalannya adalah pelaksanaan UU itu harus konsisten. Pelaksanaan UU tentang Narkoba ini belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan. □



Baharuddin Aritonang

Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI

Narkoba

SEBELUM sampai pada uraian tentang Narkoba ini, ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama adalah keterkaitan Majalah *Majelis* sebagai majalahnya MPR dengan persoalan Narkoba. Ketika persoalan Narkoba sudah merupakan masalah bangsa maka MPR agaknya perlu menaruh perhatian. Dan tampaknya, kini sudah memasuki tahapan ini. Bahwa masalah Narkoba ini telah memasuki persoalan bangsa dan negara. Dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, tentang Narkoba itu sendiri. Banyak pihak yang agaknya memerlukan pemahaman tentang Narkoba. Yang merupakan singkatan dari Narkotika dan Bahan Berbahaya. Tentang bahan berbahaya ini, semula fokusnya pada psikotropika, bahan yang semula digunakan untuk kesehatan jiwa (seperti obat penenang, obat tidur, dan sejenisnya). Tapi terkadang dapat diperluas dengan bahan kimia berbahaya lainnya. Misalnya pestisida atau bahan peledak.

Awalnya Narkoba merupakan jenis bahan atau zat yang umum digunakan di dalam pengobatan. Narkotika misalnya, digunakan untuk obat bius. Tapi yang semula digunakan sebagai obat ini disalahgunakan oleh berbagai pihak. Makanya kemudian melahirkan persoalan dalam penyalahgunaan Narkotika dan Bahan (obat) Berbahaya.

Dampaknya yang paling lumrah karena menyebabkan ketergantungan, baik psikis (disebut habituasi) dan fisik (adiksi). Dampak yang terakhir ini bisa amat dahsyat, menyebabkan penggunaannya "sakau" dan mengingau, serta perilaku di luar kesadarannya. Tidak sedikit yang menyebabkan kematian, terutama di kala mengalami overdosis.

Itulah sebabnya, bahan-bahan ini diatur melalui Undang Undang. Tentang Narkotika, semula diatur melalui Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lantas Psikotropika diatur melalui Undang Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Di Undang Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika itu dilampirkan sejumlah bahan dari 3 jenis tanaman serta berbagai bahan atau zat yang merupakan turunannya. Ketiga jenis tanaman ini adalah Ganja (*Cannabis sativa*), tanaman Candu (*Papaver somniferum*) dan tanaman Koka (*Erythroxylon coca*). Ketiga jenis tanaman beserta bagian-bagiannya dimasukkan dalam Golongan I. Sedang Golongan II dan Golongan III terdiri dari zat atau bahan yang terdapat di dalam ketiga tanaman itu, seperti Tebaina, Kodeina, atau Morfina.

Sedang di Undang Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam berbagai pengobatan jiwa yang dibagi dalam 4 golongan, yakni: Golongan I (LSD, MDA, MDMA, dll), Golongan II (PCP, Metamfetamin dll), Golongan III (Amobarbital, Katina, dll) dan Golongan IV (seperti Diazepam, dll). Di pasaran nama-nama ini lebih dikenal dengan nama jalanannya (street name), seperti MDMA yang dikenal sebagai ekstasi atau metamfetamin yang dikenal sebagai sabu-sabu.

Di dalam lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembagian seperti itu sudah berubah. Karena berbagai bahan yang dikenal sebagai Psikotropika sudah termasuk dalam daftar Narkotika. Bahkan beberapa diantaranya seperti PCP, Metamfetamin, Katinona, dan MDMA termasuk dalam Golongan I. Sedang Morfin, Petidin, dan lain-lain termasuk Golongan II, serta Kodeina dan campuran



berbagai bahan-bahan termasuk Golongan III.

Artinya, pemisahan antara Narkotika dengan Psicotropika sudah tidak jelas lagi. Yang pasti, ketentuan pidana mati senantiasa ditekankan. Di UU No. 35 Tahun 2009 antara lain ditemukan pada pasal 116, pasal 118, pasal 119, pasal 121 dan beberapa pasal lainnya. Juga pidana denda yang mencapai miliaran rupiah.

Betapun amat merugikan, dalam kenyataannya banyak sekali yang menyalahgunakan. Karena sumbernya, pada umumnya berasal dari negeri lain, perdagangan gelapnya semakin mengkhawatirkan. Jika dulu, hanya diseludupkan dalam jumlah yang terbatas (sehingga korbannya juga terbatas) kini lumrah diseludupkan dalam jumlah besar. Lihatlah misalnya, kapal yang ditangkap di daerah Riau Februari 2018 lalu, membawa sabu-sabu seberat 1,03 ton dan 1,6

ton. Sebelumnya juga ditangkap di daerah Banten dengan membawa 1,1 ton sabu-sabu. Jika Narkotika berasal dari Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Indonesia (untuk jenis Ganja), Afganistan dan Pakistan (untuk jenis Candu dan turunannya, seperti Heroin), atau Peru, Bolivia, Kolombia dll (untuk jenis Koka dan turunannya, seperti Kokain), maka sabu-sabu yang ditangkap itu berasal dari Cina. Perdagangan gelap ini juga melibatkan uang yang amat besar, sampai hitungan triliun.

Dengan semakin dahsyatnya jumlah yang diseludupkan maka tentulah korbannya akan semakin besar. Penggunaanya sudah hampir 6 juta orang. Pada umumnya adalah anak-anak muda yang menjadi generasi penerus bangsa. Melalui penyalahgunaan Narkotika maka kualitasnya bisa mengalami penurunan. Bahkan akan menjadi beban masyarakat dan negara. Di samping produktifitasnya menurun, juga menjadi beban rehabilitasi yang biayanya juga mahal.

Sesungguhnya aturan yang telah disusun dan beberapa kali mengalami revisi sudah cukup memadai. Termasuk juga untuk menghadapi munculnya Narkotika yang dikatakan jenis baru, yang seringkali merupakan turunan dari golongan yang sudah ada. Atau modifikasi bentuknya, misalnya bentuk cairan, serta hasil "otak atik" dengan mencampurkan bahan lain. Daftar Narkotika jenis baru ini cukuplah ditampung melalui Peraturan Menteri Kesehatan.

Artinya, persoalan utamanya bukanlah pada peraturan perundang-undangannya. Dan, janganlah selalu menyalahkan peraturan. Akan tetapi bagaimana pelaksanaannya. Kalau menyangkut hukum, bagaimana menerapkannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, maka diperlukan para pelaksana yang memiliki integritas yang tinggi, serta dibantu dengan peralatan yang lebih memadai.

Jangan lupa peran seluruh anggota masyarakat. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat luas. Peran bersama seluruh unsur masyarakat dan pemerintah (termasuk penegak hukum) inilah yang dapat menghadapi persoalan penyalahgunaan Narkotika ini. □

Kunjungan Parlemen Iran

Bersama Iran Indonesia Bisa Damaikan Kawasan Timur Tengah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam kunjungannya di Indonesia, Parlemen Iran mengadakan tukar pikiran dengan beberapa lembaga negara. Saat di MPR, Zulkifli Hasan mengajak Iran untuk bersama-sama mendamaikan kawasan Timur Tengah dan memerdekakan Palestina.

KETUA MPR Zulkifli Hasan menyambut ramah dan terbuka kehadiran delegasi Parlemen Iran di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, 9 Maret 2018. “Selamat datang di Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan kepada Ketua Parlemen Iran Mahmoud Sadeghi didampingi anggota Parlemen Iran lainnya.

Di hadapan delegasi parlemen dari negeri Mullah tersebut, Zulkifli Hasan mengatakan, hubungan kedua negara, Indonesia-Iran, terjalin sejak lama. Pria yang biasa dipanggil Zulhasan ini berharap,

hubungan kedua negara dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kebudayaan, perdagangan, parlemen, dan antaralima perlu ditingkatkan.

“Iran merupakan sahabat dan teman bagi Indonesia,” ujar Zulhasan. Selanjutnya, dia mengungkapkan, MPR telah beberapa kali mengadakan kegiatan dengan berbagai komponen masyarakat Iran, seperti ulama. Dalam kesempatan tersebut, pria asal Lampung itu memuji keindahan negeri Iran. “Kota Isfahan, salah satu kota di Iran, sangat indah,” ujar Zulhasan.

Di hadapan para wakil rakyat Iran, Zulkifli Hasan memaparkan, Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, agama, dan budaya. “Islam agama mayoritas, namun di sini juga ada Kristen, Katolik, Hindhu, Budha, dan Konghucu,” ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia adalah negeri yang luas. Dari wilayah paling barat hingga timur kalau ditempuh perjalanan udara memerlukan waktu 9 jam. Ia menegaskan, meski Indonesia beragam namun masyarakat bisa hidup damai dan rukun.

Tidak hanya di Indonesia, namun juga di kawasan Asia Tenggara.



Kawasan Asia Tenggara yang berbeda-beda, seperti Thailand mayoritas Budha, Filipina yang mayoritas Katolik, juga penuh perdamaian. Hal demikian, menurut Zulkifli Hasan, berbeda dengan kawasan Timur Tengah. Apa yang terjadi di Suriah dan Irak

saat ini, menurut Zulhasan, bisa membuat peradaban di sana mundur seratus tahun.

Menghadapi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah, Zulhasan berharap, Indonesia dan Iran berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. "Meski tak

mudah, namun perlu dilakukan," ujar Zulkifli Hasan. Kunci menyelesaikan masalah, menurut Zulkifli Hasan, adalah saling menghormati dan menghargai. "Bila saling menghormati maka konflik di Timur Tengah bisa diselesaikan," ujarnya. "Kita harus mencegah kerusakan dan bahaya yang lebih besar di Timur Tengah," tambahnya.

Perdamaian dan menghapus penjajahan, menurut Zulkifli Hasan, bagi Indonesia bukan basa-basi, tetapi ini merupakan perintah konstitusi. Untuk itu, ketika Indonesia mendukung Palestina merdeka, itu sesuai perintah konstitusi. "Menghapus penjajahan di dunia merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945," tegasnya. Untuk itu, Zulkifli Hasan mengajak Iran untuk berjuang memerdekakan Palestina. □

AWG

Milad I Bang Japar

Zulhasan Dinobatkan Jadi Tokoh Nasional Pembela Umat

Ketua MPR Zulkifli Hasan mangajak masyarakat untuk tidak berdiam diri terhadap upaya adu domba dengan menyebarkan fitnah dan isu-isu.



DI HADAPAN peserta milad pertama *Bang Japar*, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan, saat ini ada kelompok masyarakat yang sengaja berbuat onar. Mereka berupaya memecah belah masyarakat dengan cara menyebarkan fitnah, isu tak benar, dan mengadu domba. Kelompok itu juga melakukan penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama dan rumah ibadah.

Kegiatan seperti itu, menurut Zulkifli Hasan, tidak bisa dibiarkan karena dapat memicu perpecahan. Karena itu masyarakat tidak boleh berdiam diri, dan harus memberikan perlawanan agar upaya adu domba dengan cara menyebarkan fitnah dan isu, itu tidak memakan korban semakin banyak. Juga agar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap utuh.

Pernyataan itu disampaikan Zulhasan — begitu Zulkifli Hasan biasa disapa — saat menjadi pembicara kunci sekaligus sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan peserta milad satu tahun kebangkitan Jawara dan Pengacara (*Bang Japar*). Acara

tersebut berlangsung di Aula Rumah Dinas Anggota DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/2).

Hadir pada acara tersebut Ketua DPD Oesman Saptia; Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon; Gubernur Jakarta Anies Baswedan; Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma'ruf Amin; dan beberapa tokoh nasional lainnya.

Kedatangan Zulhasan ke tempat acara tersebut disambut penuh antusias oleh anggota dan simpatisan *Bang Japar*. Bahkan Ketua MPR dielu-elukan oleh anggota *Bang Japar*. Suara rebana dan teriakan takbir serta dan salawat mengiringi Zulhasan memasuki ruangan acara.

Dalam sambutannya, Zulhasan mengajak *Bang Japar* untuk menjaga persatuan masyarakat. Tidak mudah terhasut oleh isu-isu tak benar, dan tidak gampang diadu domba dengan kelompok masyarakat yang lain.

“Saya selalu mendukung *Bang Japar*, karena saya tahu *Bang Japar* punya tujuan mulia. Mari kita lawan upaya orang lain yang

ingin memecah belah. Mari kita jaga ulama dan tokoh agama kita dari ancaman persekusi. *Bang Japar* harus lawan siapapun yang mengadu domba kita”, seru Zulhasan.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menyerukan masyarakat untuk mendukung dan berada di belakang *Bang Japar*, karena organisasi ini tak pernah lelah melawan miras, narkoba dan LGBT. Selain itu, *Bang Japar* juga selalu mengawal kepentingan masyarakat, serta keselamatan ulama.

Pada kesempatan itu, *Bang Japar* menganugerahkan gelar Tokoh Nasional Pembela Umat kepada Ketua MPR. Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pembina *Bang Japar*, Fahmi Idris, dan Ketua Umum *Bang Japar*, Fahira Idris.

Ketua Umum *Bang Japar*, Fahira Idris, menyampaikan terima kasih kepada Zulhasan yang telah mengambil inisiatif membuka kotak pandora pembahasan LGBT yang sedang dibahas DPR. “Karena *Bang Zul* kita semua sadar bahwa bahaya LGBT mengancam Indonesia,” tutur Fahira. Dan, syukur Alhamdulillah setelah *Bang Zul* bicara, lanjut Fahira, akhirnya semua partai setuju menolak LGBT.

Fahira menyebut acara milad pertama ini merupakan bagian dari dukungan Zulkifli Hasan untuk *Bang Japar*. “*Bang Zul* mendukung penuh *Bang Japar* untuk membela umat, merekat persatuan dan menjaga merah putih. Konsistensi beliau menjadi alasan kami memberikan penghargaan untuk *Bang Zul*,” ujar Fahira.

Bang Japar adalah ormas kebangkitan jawara dan pengacara. Ormas ini berdiri pada 25 Februari 2016, jelang masa kampanye Pilgub Jakarta. *Bang Japar* dipimpin anggota DPD Dapil Jakarta Fahira Fahmi Idris. □

MBO

Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia

Sesjen MPR Apresiasi Mahasiswa Paham Soal Legislasi

Melalui forum lembaga legislatif mahasiswa, generasi muda dan mahasiswa diharapkan menjadi sadar untuk berkonstitusi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

FORUM Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI) menggelar Musyawarah Nasional X di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) pada 26 Februari 2018 hingga 3 Maret 2018. Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengapresiasi kegiatan yang diadakan FL2MI. Kegiatan ini memberi pemahaman kepada generasi muda dan mahasiswa terhadap legislasi Indonesia.

taat terhadap peraturan perundang-undangan. FL2MI juga menjadi forum yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan kritis akademik mahasiswa.

“Dengan pikiran yang kritis, masukan serta aspirasi mahasiswa maka legislasi ke depan akan lebih baik lagi. Legislasi yang baik adalah legislasi yang respon terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat, terutama mampu mengakomodir kehendak

dan sejalan dengan masyarakat atau bahkan mungkin mencederai kepentingan masyarakat maka ada saluran yang diatur dalam sistem tata negara kita, yaitu melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). “UU MD3 harus disikapi secara arif. UU lain pun selama ini juga mendapatkan dinamika yang sama. Tidak apa-apa masuk ke MK karena memang itu salurannya. Tidak ada masalah,” ujar Ma'ruf.

Selain itu, lanjut Ma'ruf, ada saluran lain untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi problematika terkait UU, misalnya melalui ruang-ruang akademis, ruang aspirasi masyarakat (daerah maupun pusat), termasuk juga datang ke lembaga perwakilan di tingkat pusat. “Mahasiswa harus tahu domain-domain penting dari pengambilan kebijakan legislasi,” ucapnya.

Domain-domain itu adalah: *Pertama*, entitas akademik sebagai pikiran-pikiran ideal dan konsep akademik. Karena itu, yang



“Saya kira forum ini menjadi forum yang strategis karena terkait dengan pemahaman generasi muda dan mahasiswa terhadap legislasi Indonesia,” kata Ma'ruf Cahyono dalam panel diskusi bertema “Peran Pemuda dan Masyarakat dalam Berdemokrasi di Indonesia” sebagai salah satu rangkaian kegiatan Munas FL2MI, di UNP, Padang, Senin (26/2/2018).

Munas FL2MI ini dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi dan universitas anggota FL2MI. Tampak hadir Rektor UNP Prof Ganefri, M.Pd, Ph.D, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni.

Lebih lanjut, Ma'ruf Cahyono mengatakan, dengan kegiatan ini generasi muda dan mahasiswa akan paham legislasi dan diharapkan menjadi sadar berkonstitusi dan

masyarakat,” katanya.

Forum berlangsung dinamis dan banyak pikiran-pikiran yang disampaikan mahasiswa, baik tentang pelaksanaan konstitusi maupun implementasinya. Peserta forum juga mengkritisi revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan menjadi UU pada Senin (12/2/2018). “Itu adalah bagian dari demokrasi. Ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Tapi UU itu sudah mendapatkan persetujuan bersama. Ada rambu-rambu konstitusi, kalau memang UU itu tidak ditandatangani presiden maka 30 hari setelah mendapat persetujuan bersama, UU bisa diundangkan dan berlaku,” papar Ma'ruf merespon diskusi UU MD3 yang berkembang dalam forum itu.

Ma'ruf menambahkan apabila ada hal-hal substansial dalam UU MD3 yang tidak sesuai

dimunculkan legislasi adalah naskah akademik. *Kedua*, entitas aspirasi masyarakat untuk mengenali kehendak masyarakat. *Ketiga*, entitas legislasi itu sendiri baik proses maupun mekanismenya.

“Itulah yang harus ditempuh. Sehingga mahasiswa, sesuai haknya, bisa menyuarakan aspirasi yang disampaikan secara produktif, konstruktif, dengan cara-cara ke-Indonesia-an yang santun. Menjadi tanggungjawab generasi muda untuk melakukan perbaikan ke depan, tidak hanya dalam bidang legislasi dan kebijakan nasional, tapi juga bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, Empat Pilar MPR menjadi penting karena legislasi tidak bisa keluar dari *track* ideologi, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya. □

BSC

Pidato Kebangsaan

Demokrasi Pancasila Semestinya Tidak Lahirkan Politik Rente

Indonesia mesti bangga dan menjaga Pancasila, sebab mata internasional banyak tertuju pada Pancasila dan memuji Pancasila serta implementasinya.



SELAMA 20 tahun reformasi bergulir sebenarnya sudah banyak yang dicapai bangsa Indonesia ini. Bahkan dunia internasional sangat memerhatikan Indonesia, memerhatikan implementasi demokrasi di Indonesia. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya sangat dikagumi dunia internasional, bahkan ingin belajar demokrasi dari Indonesia.

Ternyata diam-diam mata internasional, termasuk negara maju sekalipun sangat

memerhatikan Indonesia dalam hal demokrasi. Uniknyanya, banyak rakyat Indonesia sangat mengagumkan dunia Barat. Faktor utama yang membuat internasional kagum adalah rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam atau muslim.

Yang menjadi fokus perhatian mereka adalah, pertama Indonesia terdiri dari keberagaman yang luarbiasa, bayangkan ribuan pulau dengan berbagai macam bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, agama yang berbeda-beda, suku

yang berbeda serta uniknya sebagian besar rakyatnya beragama Islam, apakah demokrasi Pancasila Indonesia mampu berjalan dan kompatibel dengan sebagian besar rakyat yang muslim.

Selanjutnya, apakah demokrasi Pancasila seiring dengan pertumbuhan ekonomi, apakah demokrasi Pancasila bisa seiring dengan tertib politik, dan apakah demokrasi Pancasila bisa menimbulkan kesetaraan keadilan. Itu mestinya menjadi satu kebanggaan tersendiri. Pancasila menjadi satu kebanggaan kolektif bangsa Indonesia.

Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan, menyampaikan hal itu dalam pidato Kebangsaan Tokoh Nasional sekaligus Peluncuran Buku Nalar Politik Rente karya Dahnil Anzar Simanjuntak di Aula KH. Ahmad Dahlan, Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Intinya, menurut Zulhasan, sebenarnya banyak yang sudah kita capai. Kalau dirasa buruk, tapi tidak juga semua buruk. Banyak yang telah kita capai, seperti otonomi daerah dan kebebasan berkumpul, dan menyuarakan pendapat sangat bebas, dan siapapun memiliki kesempatan sama menjadi apapun. "Itu harus kita syukuri, apalagi jika dibanding dengan penerapan demokrasi negara lain, contohnya beberapa negara di Timur Tengah yang berkonflik," ungkap Zulhasan.

Lebih jauh, Zulkifli Hasan mengatakan, memang dalam catatan ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, termasuk demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi Pancasila sebenarnya dan semestinya sesuai tujuan mullianya melahirkan ksetaraan dan keadilan, bukan melahirkan kesenjangan sosial serta menghasilkan politik rente. "Itu mesti diperhatikan betul, menempatkan demokrasi Pancasila sesuai tujuan mullianya," tandasnya. □



DER

Perayaan Imlek 2569

Katakan Tidak Upaya Pemecah Belah Bangsa

Indonesia lahir dari keberagaman. Walaupun berbeda agama, ras, bahasa, warna kulit, tapi semua disatukan menjadi saudara dalam berbangsa dan bernegara.



KETUA MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, sudah menjadi satu kesepakatan bersama berawal, dari keberagaman lahirlah satu negara bernama Indonesia. Masalah perbedaan semestinya sudah selesai puluhan tahun silam, yang berakhir dengan terbentuknya negara Indonesia.

"Karena sudah menjadi kesepakatan bersama maka intoleransi dan radikalisme semestinya selamanya tidak boleh ada di negara ini," katanya, saat menghadiri acara Perayaan Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili Nasional yang diselenggarakan Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin) di teater Garuda Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Selaian Zulkifli Hasan, juga hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI Oesman Sapta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Idrus Marham, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsudin, serta tokoh nasional Prof. Jimly Asshiddiqie.

Selanjutnya, Zulkifli Hasan mengingatkan, agar rakyat waspada karena saat ini ada

sinyalemen, potensi, dan bahkan sudah secara nyata ada upaya-upaya adu domba agar warga bangsa ini satu sama lain bisa saling bermusuhan, saling berkonflik, saling koyak mengoyak.

"Berdasarkan itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali agar bersama-sama mengatakan tidak. Tidak ingin bangsa ini terkoyak. Kita lawan semua mereka yang ingin merusak persatuan dan kesatuan Indonesia," seru Zulkifli Hasan.

Namun, Zulkifli Hasan menekankan agar masyarakat Indonesia jangan hanya menjadi 'penonton' belaka. Seluruh anak bangsa adalah 'pelaku' dan harus terjun melibatkan diri dalam upaya dan usaha menolak segala bentuk upaya merusak bangsa Indonesia. "Sekali lagi jangan jadi penonton. Bersama-sama kita perkuat Indonesia kita," tandasnya.

Sementara Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsudin menegaskan bahwa persatuan dan kebersamaan segenap umat beragama di Indonesia adalah refleksi dari keberuntungan rakyat Indonesia untuk hidup di Indonesia, dan sebuah kesempatan atau anugerah yang diberikan

oleh Tuhan.

Tokoh nasional Jimly Asshiddiqie mengutarakan, bangsa Indonesia harus menyadari penting dan perlunya semua anak bangsa bergaul secara inklusif dan jangan berusaha untuk mengungkung diri dalam komunitas sendiri, sehingga tidak bergaul dengan komunitas lain.

Menurut Jimly, bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling plural di dunia dengan keberagamannya yang sangat luar biasa. Ada daerah yang mayoritas Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lainnya serta kawasan yang sangat beragam dengan berbagai macam adat istiadat. "Jadi, jika kita masing-masing mengungkung diri dalam komunitas sendiri saja maka persepsi tentang kebenaran untuk fakta yang sama itu akan dibangun di masing-masing komunitas," ujar Jimly.

Selanjutnya Jimly memaparkan kunci kalau kita mau maju. "Bangsa kita harus bersatu. Untuk bersatu kita harus mau bergaul inklusif di semua bidang. Intinya, bangsa ini harus menunjukkan komitmen kita semua mesti cross cultural, cross religius, dan juga cross ethnic," tandasnya. □

DER

Kerjasama Setjen MPR dan BPKP

Perbaiki Pengendalian Intern di Lingkungan Setjen MPR

Sekretariat Jenderal MPR berkomitmen melakukan upaya perbaikan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya di bidang sistem pengawasan internal.

DALAM rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk itu Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana, di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Dalam penandatanganan MoU yang disaksikan pejabat eselon II dan III di



lingkungan Setjen MPR dan BPKP, Sekretariat Jenderal MPR berkomitmen melakukan upaya perbaikan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya di bidang sistem pengawasan internal.

"Penandatanganan ini menjadi hal yang strategis supaya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk sistem pengawasannya, akan semakin baik," kata Ma'ruf Cahyono usai penandatanganan MoU antara Setjen MPR dan BPKP. Ma'ruf Cahyono mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan inisiatif kedua lembaga, yakni Setjen MPR dan BPKP.

Selama ini, Ma'ruf mengungkapkan, Setjen MPR juga memiliki unit pengawasan internal,

yaitu Bagian Pengawasan. Ke depan, menurut Ma'ruf, Bagian Pengawasan itu akan ditingkatkan statusnya menjadi Inspektorat. "Memang fungsinya sama, tapi paling tidak dengan statusnya sebagai Inspektorat, secara kelembagaan akan lebih mampu menampung misi dari pengawasan yang diharapkan lebih bagus lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana mengatakan, tugas BPKP adalah menjaga dan mengawal akuntabilitas. Ini yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Pengawasan akuntabilitas dilakukan dari dua pihak, yaitu dari sistem pengendalian intern pemerintah dan pihak aparatur pengawasan.

Ardan menyatakan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan negara. "Uang dipakai untuk mencapai tujuan bernegara. Pengelolaannya harus mengikuti praktik-praktik yang terbaik. Mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga bagaimana hasil penggunaan uang tersebut harus dikendalikan melalui SPIP," katanya.

Ardan menjelaskan bahwa di masa pemerintahan ini, SPIP mulai lebih diukur

kualitasnya menggunakan suatu pengukuran yang disebut dengan Maturitas SPIP. "Dengan Maturitas SPIP yang baik, organisasi mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak penyimpangan. Dengan kata lain, organisasi memiliki kemampuan menjaga diri," jelas Ardan.

"Sekretariat Jenderal MPR sangat berkepentingan untuk menjaga kualitas sistem pengendalian intern pemerintah dan aparatur pengawasan intern pemerintah. Kalau Setjen MPR akan membentuk inspektorat maka ini akan memperkuat pilar-pilar yang menjadi penjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dari Setjen MPR," sambungnya.

Dengan penandatanganan MoU ini, lanjut Ardan, BPKP bersama Setjen MPR akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal sistem pengawasan internal. "Tentu apa yang sudah baik akan terus disuport BPKP dengan peningkatan-peningkatan. Apalagi Setjen MPR sudah mendapat penghargaan dalam pengelolaan keuangan. Tentu ini menjadi modal yang sangat bagus bagi Setjen MPR karena tidak semua lembaga bisa mendapat penghargaan itu," ujarnya. □

BSC

Kunjungan Ketua Senat Republik Kazakstan

Indonesia dan Kazakstan Sepakat Tingkatkan Kerjasama

Sebelum menjalin kerjasama dengan negara Asean lainnya, Kazakstan menganggap penting terlebih dulu menjalin kerjasama dengan Indonesia.



KETUA MPR RI Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR Mahyudin dan E. E. Mangindaan menerima dengan hangat kunjungan Senat Republik Kazakstan. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Selasa (13/3). Delegasi Senat Republik Kazakstan dipimpin oleh ketuanya, Kassym-Jomart.

Kepada Ketua MPR, Kassym-Jomart antara lain menyampaikan keinginan pemerintahnya untuk bisa meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara, terutama di sektor ekonomi perdagangan, budaya, dan pendidikan. Karena itu, Kassym-Jomart mengundang Ketua MPR untuk berkunjung ke Kazakstan, agar bisa menjajaki peningkatan kerjasama kedua negara yang

sudah berjalan selama 20 tahun.

Selain itu, Kassym-Jomart juga meminta bantuan Ketua MPR agar ikut mendorong agar Presiden Joko Widodo dapat memenuhi undangan pemerintah Kazakstan untuk berkunjung ke negara pecahan Uni Soviet itu. Apalagi presiden Indonesia terdahulu juga pernah melakukan kunjungan ke sana.

Menurut Kassym-Jomart, Indonesia





adalah negara yang sangat penting bagi kawasan Asean. Sebanyak 37% perekonomian di Asean ditopang oleh Indonesia. Karena itu, Kazakstan menganggap penting untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, sebelum melakukan kerjasama dengan negara-negara Asean lainnya.

Di tahun-tahun akan datang, kerjasama Indonesia Kazakstan, menurut Kassym-Jomart, bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dibanding sebelumnya. Peralpnya, saat ini Kazakstan memiliki akses yang sangat besar terhadap salah satu pelabuhan

di Tiongkok. Dia berharap, persoalan jarak yang selama ini menjadi persoalan kerjasama kedua negara bisa diatasi.

Selain membahas peluang kerjasama kedua negara, Kassym-Jomart juga bertukar pikiran mengenai masalah politik dalam negeri. Di Kazakstan, menurut Kassym, pemerintahnya memprioritaskan pembangunan ekonomi. Karena itu, mereka banyak menghasilkan UU terkait ekonomi perdagangan. Dalam setahun, setidaknya ada 100 UU Ekonomi Perdagangan yang mereka tandatangani. Karena itu, selama 25

tahun terakhir Kazakstan menerima kucuran investasi, mencapai US\$ 265 miliar. Sedangkan pada 2017 saja mereka memperoleh investasi mencapai US\$ 16 miliar.

Keberhasilan itu bisa diraih karena Kazakstan memiliki presiden yang kuat, parlemen yang memiliki wewenang penuh, dan pemerintah yang akuntabel. Tetapi, Kassym-Jomart mengaku, negaranya tak bisa menjalankan demokrasi yang sangat bebas seperti Indonesia. Karena Kazakstan lebih membutuhkan seorang presiden yang kuat daripada sistem demokrasi yang bebas.

Menjawab harapan tamunya, Ketua MPR Zulkifli Hasan sepakat untuk mendorong peningkatan kerjasama kedua negara, termasuk kerjasama masyarakat di antara kedua negara. Apalagi, sejauh ini sudah banyak masyarakat Kazakstan yang berwisata ke Indonesia.

“Selama ini kita sudah punya hubungan yang dekat dengan Kazakstan. Mudah-mudahan berkat kunjungan ini hubungan kedua negara akan semakin lebih dekat lagi. Intinya, kedua negara harus saling menguatkan, dan juga saling menguntungkan”, harap Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menyatakan setuju, kerjasama kebudayaan dan pendidikan di antara kedua negara sangat perlu ditingkatkan, termasuk melalui program pertukaran pelajar antarkedua negara. □



Bogor Street Festival Cap Go Meh 2018

Implementasi dari Kebhinnekaan

Menghormati kebudayaan dan kepercayaan umat lain adalah bentuk toleransi sekaligus bentuk realisasi riil kebhinnekaan Indonesia

KETUA MPR Zulkifli Hasan membuka secara resmi 'Bogor Street Festival Cap Go Meh 2018', di area Vihara Dhanagun, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/3/2018). Hadir dalam acara tersebut, Plt Walikota Bogor Usmar Hariman, para paslon Walikota dan Wakil Walikota Bogor, tokoh lintas suku/adat, tokoh lintas agama, dan ribuan masyarakat umum.

Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Bogor Street Festi-

katanya.

"Tapi di tengah bangsa yang ingin hidup dengan rasa kebhinnekaan yang tinggi, akhir-akhir ini muncul upaya agar bangsa yang rukun ini saling bertengkar, saling bermusuhan, dengan menyebarkan virus intoleransi. Ada yang ingin menciptakan perpecahan ditengah masyarakat," ungkap Zulhasan mengingatkan.

Untuk meredam upaya-upaya memecah belah masyarakat itu, Zulkifli Hasan

katanya. Jadi, tegas Zulhasan, jika rakyat bersatu dan memiliki komitmen tersebut maka upaya-upaya jahat untuk menghancurkan kebhinnekaan Indonesia akan gagal total.

Dalam momen tersebut, Zulkifli Hasan juga berbicara seputar hoax atau kabar bohong. Zulhasan sangat mendukung upaya pemerintah melawan *hoax* dan penebar kebencian. Hanya saja dia meminta dalam melawan *hoax* jangan tebang pilih. "Saya



val CGM 2018 adalah sebuah pesta rakyat yang diikuti dan dinikmati masyarakat dari berbagai suku, adat, dan agama. "Festival ini bisa menjadi role model implementasi kebhinnekaan bangsa Indonesia. Perpaduan yang sangat Indah, itulah Indonesia yang sebenarnya. Saya sangat apresiasi dan mendukung," ungkap Zulhasan, begitu Zulkifli Hasan bisa disapa.

Lebih lanjut Zulkifli Hasan menyatakan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang saling mencintai sesama anak bangsa, saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda-beda. Rakyat Indonesia adalah berbeda-beda, tapi hidup dalam satu rumah yang sama, yakni Indonesia. Tak bisa dipungkiri, semua adalah saudara sebangsa. Hal tersebut bukan hanya terjadi saat ini, tapi dari dulu memang sudah begitu. "Itulah Indonesia, bangsa yang ramah,"

mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak upaya-upaya jahat tersebut. "Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melawan segala upaya negatif tersebut. Saya mengajak masyarakat Bogor untuk menjadi pelopor melawan hal tersebut, dan menjadi pelopor menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Zulhasan.

Untuk itu, Zulhasan berharap, jangan ada masyarakat hanya menjadi atau diam saja menghadapi upaya-upaya jahat, tapi bersama masyarakat lain melakukan perlawanan terhadap upaya jahat tersebut. "Ingat di Indonesia yang paling hebat bukan orang kaya, tapi orang yang hebat adalah orang yang paling tinggi komitmennya untuk menjaga NKRI. Caranya, saling menghormati, bukan saling mengecilkan, dan berkomitmen menjaga toleransi,"

setuju pemerintah memberantas *hoax* dan karenanya hukum juga harus berlaku untuk semua. Siapapun yang memproduksi berita *hoax*, fitnah, dan menebar kebencian harus ditangkap semuanya, tanpa kecuali," katanya.

Zulhasan berharap, dari kalangan manapun penyebar *hoax* dan pengadu domba itu penegakan hukum tetap berlaku untuk semua. Pokoknya, semua penyebar *hoax* dari kubu mana saja harus ditindak tegas.

"Saya juga berharap kepolisian fokus memburu produsen berita *hoax*. Pasti ada aktor utama yang bergerak untuk mengendalikan berita *hoax* agar disebarkan oleh yang tidak tahu apa-apa. Ini yang prioritas untuk diburu dan ditahan," tandasnya. □

DER

Festival Cap Go Meh

Bukti Indonesia Bangsa Toleran, Bukan Radikal

Indonesia memang sudah beragam sejak dulu. Dengan keragaman itu bangsa Indonesia saling menghargai dan menghormati.



KETUA MPR Zulkifli Hasan ikut menjadi bagian dari kemeriahan Festival Cap Go Meh Glodok 2018 di LTC Glodok, Jakarta, Minggu (4/3/2018). Selain Ketua MPR, para tokoh lainnya seperti Menko PMK Puan Maharani, Menkominfo Rudiantara, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) ikut meramaikan festival yang diadakan dalam rangka perayaan Imlek. Para tokoh mulai menghadiri lokasi festival di Jalan Hayam Wuruk sekitar pukul 13.40 WIB. Para tokoh yang datang mengenakan batik merah.

Dalam sambutannya di acara tersebut, Zulkifli Hasan kembali menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran, bukan bangsa yang radikal. "Sejak dulu kita adalah bangsa yang toleran. Kita bukan bangsa yang radikal. Kita saling menghargai dan menghormati," kata Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhasan, sudah ratusan tahun lalu bangsa Indonesia bersikap toleran. Indonesia terdiri dari 600 suku, ribuan pulau. "Indonesia memang sudah beragam sejak dulu," ucapnya. Dengan keragaman itu, lanjut Zulhasan, bangsa Indonesia saling menghargai dan menghormati. "Kita adalah bangsa yang toleran, bukan bangsa yang

intoleran. Bukan bangsa yang radikal," kata Zulhasan menegaskan.

Sekarang ini, Zulhasan mengungkapkan, ada upaya pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan mengoyak-ngoyak Indonesia. Zulhasan mengajak warga bangsa untuk melawan pihak-pihak yang mengadu domba. "Kita katakan 'tidak' untuk mereka yang mengadu domba dan mengoyak-ngoyak kebangsaan kita. Kita lawan orang yang ingin mengadu domba dan mengoyak-ngoyak," tandasnya.

Zulhasan menambahkan bahwa orang yang hebat sekarang ini adalah mereka yang komitmen menjaga NKRI. "Orang yang hebat adalah orang mempunyai komitmen kuat menjaga NKRI," pungkasnya. Ia lantas menyampaikan ucapan hari raya imlek kepada para pengunjung karnaval.

Selain Zulkifli, Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPD Oesman Sapta Odang alias Oso juga menyampaikan hal serupa. Ketua Umum Partai Hanura itu bahkan menyampaikan ucapan hari raya Imlek dengan bahasa mandarin.

"*Ni hao ma, gong xi fa cai. Kamsia,*" ucap Oso yang disambut tawa pengunjung karnaval.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Menurutnya, para

pahlawan yang dulu berjuang untuk Indonesia tak pernah mempermasalahkan perbedaan suku, agama, hingga warna kulit. "Saat bangsa Indonesia perjuangkan Indonesia, mereka tidak pernah tanya agamamu apa, asal usulmu, warna kulitmu, tapi cuma satu tekad, merdeka!" serunya.

Karnaval budaya Cap Go Meh 2018 berpusat di depan LTC Glodok Jakarta dengan panggung cukup besar berdiri tepat di depannya. Festival Cap Go Meh dimeriahkan dengan karnaval kesenian. Rute karnaval adalah 3,5 kilometer mulai dari Jalan Hayam Wuruk hingga ke Jalan Gajah Mada.

Sejumlah komunitas dari berbagai budaya meramaikan Parade Buaya Nusantara. Beberapa yang tertulis di poster adalah Reog, Sisingaan, tarian Papua, Ondel-ondel, Korps polisi berkuda, mobil hias hingga kesenian Betawi.

Meskipun acara Cap Go Meh tersebut membuat lalu lintas di kawasan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk tersendat, suka cita serta kebahagiaan masyarakat, khususnya yang merupakan keturunan Tionghoa terlihat dari keramaian dan keriuhan suara saat menyaksikan karnaval budaya kebhinekaan yang dihadirkan. □

BSC

Pelantikan MN KAHMI

Ketua MPR Dorong KAHMI Menjadi Perekat Persatuan

Pengurus KAHMI Periode 2017-2022 dibentuk. Zulkifli Hasan ditetapkan menjadi salah satu anggota Dewan Pakar. Dia berharap, KAHMI menjadi perekat persatuan bangsa.



BERSAMA dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Ketua MK Mahfud MD, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri pelantikan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) masa bakti 2017-2022, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 11 Maret 2018. Dalam

periode ini ada 9 pengurus presidium. Mereka adalah Kamarussamad, Ade Komaruddin, Ahmad Reza Patria, Ahmad Doli Kurnia, Viva Yoga Mauladi, Harry Azhar Azis, Siti Zuhro, Herman Haeron, dan Sigit Pamungkas. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan ditetapkan menjadi salah satu anggota Dewan Pakar KAHMI.

Saat di-*doorstop* wartawan, Zulkifli Hasan

mengucapkan selamat kepada pengurus baru KAHMI. "Selamat ya," ujarnya. Dia mengatakan, KAHMI terdiri dari beragam latar. "Semua partai ada di KAHMI," ujarnya. Di masa-masa seperti saat ini, di saat kesenjangan sosial yang dalam dan ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba antarmasyarakat, Zulhasan berharap, KAHMI menjadi pelopor persatuan. "Saya berharap KAHMI menjadi pelopor persatuan. KAHMI harus bisa menjadi pererat bangsa," katanya.

Lebih lanjut, Zulhasan menegaskan, KAHMI harus jadi contoh bahwa keberagaman itu bisa jadi kekuatan. "Semua partai ada di KAHMI, tapi tetap kompak untuk Indonesia," ujarnya. Menghadapi tahun politik ini, Zulkifli Hasan berharap, segenap elemen di KAHMI sigap menghadapi siapapun yang hendak mengadudomba umat beragama. "Di tahun politik, saya harapkan KAHMI harus berada paling depan untuk tegaskan bahwa pilihan boleh beda, tapi Merah Putih kita sama," tutupnya.

Sementara Jusuf Kalla dalam pidatonya mengatakan, alumni HMI terdiri dari beragam profesionalitas. "Semua profesi ada di KAHMI," ujar Jusuf Kalla. Untuk itu, Kalla berharap, pengurus KAHMI menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tujuan organisasi.

Saat ini, menurut Zulhasan, dunia mempunyai banyak tantangan. Menghadapi tantangan tersebut semua tergantung bagaimana kita menguasai ilmu dan pengetahuan. "Apa yang diperoleh di kampus, ilmu dan pengetahuan merupakan modal untuk kemajuan ke depan," ujarnya.

Ketua Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Siti Zuhro, dalam kesempatan yang sama mengatakan, acara malam itu bukan untuk kami, KAHMI, tetapi buat kita. KAHMI memiliki visi dan misi untuk merawat NKRI dan mempercepat tujuan dan cita-cita Indonesia.

Dia mengatakan, sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita sudah majemuk. "Dalam kemajemukan itu memiliki tujuan yang sama," ujar Siti Zuhro seraya menekankan, kita harus bisa melaksanakan Sila V Pancasila. "Tanpa keadilan sosial, bangsa Indonesia bisa menjadi kenangan, seperti Uni Soviet," ujarnya. □

AWG



Jatinangor, Jawa Barat

Penganugrahan Gelar Doktor Untuk Megawati

Zulkifli Hasan hadir dalam penganugrahan gelar Doktor HC kepada Megawati di Kampus IPDN. Dalam orasi ilmiahnya, Presiden kelima itu menyebut pentingnya Indonesia memiliki haluan negara.

PAGI itu di Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 8 Maret 2018, terlihat kesibukan agak luar biasa. Di luar kampus, puluhan polisi dan pegawai IPDN, selain mengatur arus lalu lintas juga mempersilahkan kendaraan roda empat yang hendak masuk ke kampus. Berada di halaman kampus, puluhan mahasiswa IPDN

Menurut Rektor IPDN, Prof. Ermaya Suradinata, Megawati merupakan orang pertama yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari kampusnya. Putri Presiden I Soekarno itu mendapat gelar dalam bidang Politik Pemerintahan. Dia mengungkapkan, gelar itu diberikan setelah mendapat pertimbangan dan saran dari para ahli. "Ibu Megawati berhak mendapat gelar Dr (HC)

berat topi (toga)," ujar Megawati tersenyum.

Selepas proses penganugrahan, Zulkifli Hasan memberi ucapan selamat kepada Megawati. "Selamat atas gelar terhormat Dr (HC) kepada Ibu Mega," ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan saat *door stop*. "Ibu Megawati sudah kesekian kalinya mendapat gelar Dr (HC)," tambahnya.

Dia mengatakan, saat orasi ilmiah, dirinya



yang berbaju putih berjajar memberi hormat kepada setiap orang melintas sembarikan mengucapkan selama pagi kepada setiap orang yang melintas.

Kesibukan yang terjadi di kampus pencetak aparatur pemerintahan pada pagi itu, sebab perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri itu punya agenda menganugraahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Karena yang diberi gelar tokoh penting maka undangan yang hadir dalam acara itu juga para tokoh nasional, seperti mantan Wakil Presiden Try Soetrisno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Mensesneg Pranomo Anung, Menteri Koperasi dan UKM Puspa Yoga, para politisi dan undangan lainnya.

oleh promotor dan para ahli karena dalam masa pemerintahannya beliau mendorong *good governance*, mengagagas desentralisasi, dan memperkuat otonomi daerah," ujarnya. Dari alasan tersebut maka Tim Promotor mempunyai alasan kuat untuk menganugraahkan gelar Dr (HC) sesuai aturan yang ada.

Dalam orasi ilmiah di hadapan ribuan undangan, Megawati mengatakan, politik tak boleh diskriminatif. Harus dibuka semua akses untuk rakyat agar mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. "Ini bisa terjadi bila pemerintah mampu menjalankan dan menjamin partisipasi rakyat," ujarnya. "Hal demikian juga sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," tambahnya.

Setelah mendapat gelar Dr (HC) dari IPDN, Megawati menyandang gelar serupa hingga tujuh gelar. "Terimakasih kepada IPDN. Semakin banyak gelar membuat semakin

mendengar Megawati menyebut MPR dan namanya sebanyak 5 kali. Dalam sambutannya, Megawati mengakui, Indonesia penting untuk memiliki haluan negara. Sebagai hal yang dibahas di MPR, Zulkifli Hasan mengakui, pembahasan mengenai haluan negara saat ini tengah *mandeg*. "Meski semua partai politik dan kelompok DPD sepakat pentingnya haluan Negara, namun mengenai masalah itu belum dituntaskan," ujarnya.

Menyepakati soal haluan Negara, menurut Zulkifli Hasan, tidak mudah. Setelah ada orasi ilmiah dari Megawati, Zulkifli Hasan akan mengingatkan masalah itu kepada anggota MPR dan akan dibawa ke rapat gabungan fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Dia sepakat dengan Megawati bahwa haluan negara merupakan suatu hal yang penting agar bangsa ini bisa merancang pembangunan 50 tahun hingga 100 tahun ke depan. □

AWG

Forum Komunikasi PLP

Jadikan Pilkada Ajang Adu Ide dan Gagasan



MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerja sama dengan Forum Komunikasi Persaudaraan Lampung Perantauan (FK PLP) menggelar Diskusi Publik bertema: “Membedah Janji Politik dan Komitmen Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Lampung”. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Jum’at (9/3).

Ikut hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI dapil Lampung Almuzamil Yusuf, wakil ketua Komnas HAM yang juga Sekjen FK PLP, Dr. Ansori Sinungan SH, LLM., dan Bupati Lampung Selatan Zaenuddin Hasan, serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

beserta perwakilan masyarakat Lampung di Jakarta.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga putera Lampung didaulat menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut. Bagi Zulhasan, panggilan akrab Zulkifli Hasan, Pilkada harus jadi ajang adu ide dan gagasan, bukan saling menghina dan menebar kebencian.

“Kenapa acara ini dilaksanakan di MPR agar jadi contoh bahwa Pilkada harus mengutamakan persatuan. Pilihan boleh beda, tapi merah putih kita sama,” kata Zulhasan. Ia berharap Pilkada Lampung bisa menjadi contoh untuk daerah lain, karena itu Pilkada Lampung harus berjalan secara tertib, damai, dan pemenangnya bisa merangkul

semua.

Ketua MPR RI juga mengingatkan, menjadi kepala daerah bukanlah cara untuk cepat menjadi kaya. Kalau ingin cepat kaya, jangan jadi pejabat, lebih baik menjadi pengusaha. Karena sebelum menduduki jabatannya, seorang kepala daerah pasti akan bersumpah. Salah satu isi sumpahnya adalah akan taat dan patuh pada konstitusi.

“Pancasila tidak membenarkan seseorang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingannya sendiri, khususnya menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Itulah salah satu janji yang diucapkan seseorang pejabat negara sebelum menduduki jabatannya, dan itu tidak boleh dilanggar, karena janji adalah hutang”, kata Zulkifli Hasan.

Orang yang terpilih menjadi pejabat negara, kata Zulkifli, juga mengucapkan sumpah akan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bukan hanya mereka yang telah memilihnya saja, tetapi juga mereka yang tidak memberikan suaranya pada saat pemilihan. Karena itu, tidak benar jika ada kepala daerah yang tidak membangun daerah tertentu, dengan alasan karena mereka tidak memberikan suaranya saat pemilihan.

“Karena itu kalau ada anak tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya, berarti pejabatnya telah melanggar konstitusi. Atau, kalau ada masyarakat yang tidak bisa dirawat di rumah sakit karena tidak bisa membayar, pejabatnya telah melanggar konstitusi. Karena dia telah melanggar sumpah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia”, katanya.

Harapan serupa dikemukakan Dr. Ansori Sinungan SH, LLM., wakil ketua Komnas HAM dan Sekjen FK PLP. Menurut Ansori, demokrasi Pancasila harus menghasilkan kesejahteraan, dan kebersamaan. Kalau yang lahir adalah kesenjangan itu bukan demokrasi Pancasila, tetapi liberalisme. Karena itu, ia mengingatkan, siapapun yang terpilih menjadi gubernur harus mengutamakan kesejahteraan bagi rakyat. □

MBO

Hari Kopi Nasional

Zulhasan Dinobatkan Jadi Bapak Pencinta Kopi Indonesia

Masa kejayaan kopi Indonesia penuh seiring munculnya program sawahisasi di era Presiden Soeharto.



JARINGAN pengusaha, eksportir dan pengambil kebijakan yang tergabung dalam Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) menobatkan Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai Bapak Pencinta Kopi Indonesia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Dewan Kopi Indonesia, Anton Apriyantono, beserta Sekretaris Dewan Kopi Indonesia, Jamil Musanif, dan disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pemberian gelar kepada Ketua MPR RI berlangsung dalam rangkaian acara pencaanangan Hari Kopi Nasional dan Ikrar Pengurus Dewan Kopi Indonesia. Acara tersebut digelar di Intermark Hall, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Minggu (11/3).

Ketua Dekopi Anton Apriyantono menyatakan, gelar Bapak Pencinta Kopi Indonesia diberikan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan merupakan salah satu upaya melibatkan tokoh-tokoh bangsa untuk ikut membangun industri kopi di Indonesia. "Kalau industri kopi maju petani kopi sejahtera. Bang Zul adalah tokoh nasional yang sering mengampanyekan, kalau kopi lokal jauh lebih nikmat daripada kopi impor," kata Anton.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan didaulat menyerahkan bibit kopi Arabica varietas Sigarantang kepada petani kopi asal Nunukan Kalimantan Utara.

Usai menerima penobatan Bapak Pencinta Kopi Indonesia, Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan, kopi sudah jadi bagian dari hidupnya. Sejak kecil ia sudah dekat dengan petani dan pedagang kopi di daerah asalnya, yakni di Kabupaten Kalianda, Lampung Selatan. Bahkan, ia memiliki kenalan seorang pengepul kopi yang menampung kopi hasil kebun orangtuanya.

"Dulu di kampung saya kopi jadi alat tukar dengan komoditas lain. Jadi sejak kelas 1 SD sambil keliling menjual dagangan emak, ya saya sudah berinteraksi sama petani dan pedagang kopi," cerita Zulhasan, begitu Zulkifli Hasan biasa disapa.

Kopi Indonesia, kata Zulhasan, sudah menjadi komoditas unggulan Indonesia yang menarik pedagang Eropa datang ke Indonesia. Bahkan, orang Eropa rela datang jauh-jauh demi komoditas unggulan. Yaitu, cengkeh, lada, pala, rempah-rempah, dan juga kopi. Artinya, ini pengakuan bahwa kopi Indonesia merupakan salah satu

komoditi yang terbaik.

Sebagai pencinta kopi lokal, Zulhasan mengajak petani, pengusaha, dan para pengambil kebijakan untuk mengembalikan masa kejayaan kopi Indonesia. Terutama, memanfaatkan momen kebijakan pemerintah Amerika yang memberikan pajak tinggi terhadap ekspor berbagai logam ke sana.

"Kopi adalah keunggulan komparatif bangsa ini, yang tak dimiliki negara lain. Ketika negara lain proteksi dan prioritaskan produk dalam negerinya, Indonesia harusnya juga berani. Itu cara kembalikan kejayaan kopi Indonesia di pasar dunia," ungkap Zulhasan.

Pada kesempatan itu Zulhasan mengucapkan selamat kepada kepengurusan Dewan Kopi Indonesia yang baru dilantik dengan ketua mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. "Semakin banyak yang terlibat semakin baik supaya gotong royong majukan industri kopi nasional," katanya.

"Selamat untuk pengurus Dewan Kopi Indonesia. Industri kopi Indonesia harus jadi tuan di negerinya sendiri. Ini kerja kita bersama mendorong kopi Indonesia kuasai pasar kopi dunia," ajak Zulkifli Hasan. □

MBO

Milad ke-54 IMM

IMM Tetap Menjadi Pelopor dan Melakukan Pencerahan

Lima puluh tahun sudah IMM berkiprah untuk umat dan bangsa. Malam puncak Milad IMM berlangsung, 14 Maret, di Jogjakarta dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan.



MALAM pun tiba. Area Sportorium, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta (UMJ), Kota Jogjakarta, biasanya sepi, tapi malam itu suasananya ramai. Kalau biasanya di jalan sekeliling Sportorium itu hanya ada orang berjalan kaki, bersepeda, mengendarai sepeda motor atau mobil, namun malam itu, 14 Maret 2018, di depan Sportorium itu berkumpul puluhan mahasiswa mengenakan jaket atau baju warna merah darah. Mereka memadati area sekitar, seperti taman yang terdapat di depan Sportorium.

Mereka adalah anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), sejak sore (14 Maret 2018) itu memadati gedung Serbaguna Kampus UMJ tersebut. Mereka itu, selain berasal dari Jogjakarta dan sekitarnya, juga datang dari Solo, Surabaya, Banyumas, Malang, Semarang, dan kota lainnya di Indonesia. Mereka memadati area sekitarnya, seperti taman yang ada di depan Sportorium. Mereka yang berada di kawasan itu mayoritas adalah anggota IMM.

Malam itu, mereka berkumpul di Kota Gudeg atau tepatnya di kampus favorit UMJ ini memperingati puncak Milad ke-54 organisasi IMM. Sebelum malam puncak, organisasi yang berada di bawah naungan Muhammadiyah itu sudah melakukan berbagai acara, seperti diskusi dengan mantan Ketua Muhammadiyah

Dien Syamsuddin. Selain Ketua MPR Zulkifli Hasan hadir pula Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Rais, Rektor UMJ Gunawan Badiyanto, dan undangan lainnya.

Malam puncak Milad ke-54 IMM itu, selain diisi kegiatan budaya, juga diisi berbagai sambutan dan orasi kebangsaan. Ketua PP IMM, Ali Muthohirin, dalam sambutan mengatakan, milad yang digelar malam ini untuk mengingatkan para kader agar terus bergerak nyata. Lima puluh empat tahun perjalanan organisasi IMM, menurut Ali, merupakan perjalanan waktu yang panjang dalam pengabdian. "Kita harus meneguhkan janji untuk berbuat amal dan kebajikan," ujarnya.

Ali Muthohirin menyebutkan, globalisasi mempunyai dampak kepada kondisi bangsa. Dalam era ini kapitalisme telah merasuk ke dalam berbagai sendi kehidupan. "Sayangnya kita menghadapi tanpa persiapan. Akibatnya, masyarakat mudah mencaci dan mencela," ungkap Ali Muthohirin. Untuk itu, lanjut Ali, kader IMM perlu berbuat nyata untuk kehidupan berbangsa yang lebih baik.

Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam amanatnya menyatakan, semua perubahan yang terjadi di Indonesia selalu melibatkan mahasiswa. Dia memaparkan, pada 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1998 mahasiswa

mempunyai peran penting. Karena itu, Zulhasan – sapaan Zulkifli Hasan – berharap, IMM agar tetap berdinamika sehingga mampu menjadi pelopor dan melakukan pencerahan. Menjadi pelopor dan melakukan pencerahan, menurut Zulhasan, penting sebab bangsa ini tengah mengalami kesenjangan sosial, korupsi, dan *distrust*. "Saat ini aspirasi partai politik sering tidak nyambung dengan keinginan masyarakat," ungkapnya.

Di hadapan ribuan kader organisasi itu, pria asal Lampung, itu menekankan agar generasi muda mengetahui asal usul dan latar belakangnya. "Kalian harus tahu dari mana asal daerah kalian," ujarnya. "Bila daerah sendiri saja tidak hafal, bagaimana bisa tahu Indonesia," ujarnya. Dengan memahami asal usul disertai mengerti sejarah Indonesia maka kita akan menjadi patriot.

Menurut Zulhasan, bangsa ini hadir tidak serta merta. "Indonesia lahir dengan perjuangan panjang," ujarnya. Bangsa yang lahir dengan penuh perjuangan, kata Zulhasan, perlu dijaga dan dimajukan. Dia menyebut ada 3 hal membuat sebuah bangsa maju, yaitu: Memiliki pondasi yang kokoh, menguasai ilmu, dan mempunyai nilai-nilai. "Saya berharap hal ini ada pada IMM," tegasnya seraya mengucapkan selamat milad kepada IMM. □

AWG



Tetap Asyik Meski Gambar Idoep Tanpa Suara

Industri perfilman nasional tumbuh di masa kolonialisme. Di tengah masa penjajahan, berbagai film diproduksi, salah satunya Loetoeng Kasarung. Dengan teknologi yang masih minim membuat film yang ditonton tanpa suara alias film bisu. Mereka mengatakan, film dengan sebutan gambar idoep. Pada masa penjajahan Jepang, produktifitas film menurun bahkan mandeg. Sensor yang ketat membuat para aktris dan aktor beralih menjadi pemain panggung sandiwara. Selera penonton dari dulu hingga sekarang tetap sama, harga karcis murah dan film yang ditonton berjenis action, drama, dan kisah kasih.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

“FILM-FILM Indonesia sekarang lebih kreatif sehingga masyarakat banyak pilihan untuk menonton,” ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan sebelum nonton bareng Film *Dilan 1900* di Hoollywood XXI, Jakarta, 20 Februari 2018. Ia mengatakan, pada masa lalu, dirinya ingat film *Gita Cinta Dari SMA* yang dibintangi oleh Rano Karno dan Yessi Gusman. “Juga ada film tentang anak jalanan Ali Topan,” tambahnya.

Box office-nya *Dilan* tidak hanya membuat Ketua MPR sudi datang ke bioskop. Lima hari kemudian atau tepatnya 25 Februari 2018, Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama, yakni nonton *Dilan* di sebuah

Berjuta-juta orang datang ke bioskop untuk menonton film Indonesia, tentu sangat mengembirakan. Sebab, ini bukti produksi dalam negeri juga layak dan menarik untuk ditonton sehingga film produksi Indonesia bisa bersaing dengan film produk Hoollywood, Boollywood, Mandarin, dan film dari negara lainnya.

Untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, untuk saat-saat ini, tentu film-film Indonesia harus berjuang, meski kadang harus mengalami jatuh-bangun serta kelesuan lainnya. Sebuah kejadian tidak enak itu pernah dialami. Perfilman Indonesia yang saat ini bisa dikatakan masa panen karena

Pada masa itu di mana teknologi perfilman belum secanggih seperti saat ini, namun masyarakat sudah sangat senang dengan apa yang ditonton, walaupun tanpa suara. Dari sinilah maka film yang ada disebut dengan ‘gambar idoeop’. *Lakon* yang ada pun belum serumit saat ini. Kala itu film yang diputar hanya dokumenter aktivitas Ratu dan Raja Belanda di Deen Haag.

Pada pertunjukan awal pertunjukan perfilman di nusantara ini tidak sukses. Faktornya bukan karena cerita film tak menarik, namun karena harga karcis terlalu mahal sehingga jumlah penonton tak sesuai dengan yang diharapkan. Agar masyarakat



Ketua MPR Zulkifli Hasan



Presiden Joko Widodo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bioskop yang ada di Senayan City, Jakarta. Joko Widodo menonton film yang diangkat dari novel karya Pidi Baiq itu bersama anaknya, Kahiyang Ayu dan menantunya Bobby Nasution.

Di awal-awal 2018, *Dilan* menjadi fenomena tersendiri dalam perfilman di Indonesia. Menjadi fenomena tersendiri sebab sejak diputar di bioskop pada 25 Januari 2018 hingga 24 Februari 2018, jumlah penonton yang tercatat mencapai 6.001.000 orang. Dengan demikian film ini mengungguli film-film *box office* sebelumnya, seperti *Laskar Pelangi*, *Habibie & Ainun*, *AADC 2*, dan *Ayat-Ayat Cinta*.

telah menempuh proses panjang. Ada yang menyebut perfilman mulai ada di nusantara ini pada tahun 1900. Pada 5 Desember 1990 di harian *Bintang Betawi* terpampang iklan sebuah film yang diputar pada sebuah bioskop di Tanah Abang, Batavia.

Pada masa penjajahan di mana pemerintah kolonial mengkastakan penduduk menjadi beberapa bagian maka bioskop yang ada pun tersegmentasi. Ada tiga segmentasi bioskop pada masa itu, yakni bioskop khusus untuk orang Eropa, bioskop untuk orang berstatus menengah ke atas, dan bioskop untuk orang-orang berstatus bawah.

sudi untuk datang ke bioskop maka pada pertunjukan kedua, 1 Januari 1901, harga karcis diturunkan hingga 75%.

Untuk lebih menarik penonton agar berduyun-duyun ke bioskop, kiat yang dilakukan tidak hanya dengan memberi potongan harga karcis, namun pengelola bioskop mendatangkan film-film dari Amerika. Strategi ini berhasil, masyarakat yang datang ke bioskop pun membludag. Pada tahun berikutnya tak hanya *Cowboy* yang dinikmati masyarakat di bioskop, film Mandarin, China, yang terkenal dengan film-film kungfu-nya juga didatangkan ke nusantara. Hadimnya dua film dari belahan benua yang berbeda itu



tentu memberi tawaran yang beragam kepada masyarakat dalam dunia hiburan.

Melihat animo masyarakat yang begitu tinggi dalam dunia hiburan (film), di sebuah surat kabar *De Locomotif*, 1925, tertulis: Ada keinginan dari orang-orang Belanda yang ada di nusantara untuk membikin film sendiri. Keinginan tersebut ditindaklanjuti setahun kemudian, oleh pembuat film, L. Heuveldorp dan G. Kruger. Sebelum *shooting*, lebih dulu mereka mendirikan *production house* (PH) *NV Java Film Coy*. Menariknya, dua orang itu mengangkat cerita yang ada, bukan dari negerinya namun dari tanah Sunda. Legenda yang sangat populer di masyarakat, *Loetoeng Kasarung*, diangkat oleh mereka ke layar lebar. Setelah beberapa hari dilakukan pengambilan gambar, film bisu tersebut dilempar ke pasar. Dua bioskop yang ada di Bandung, yakni *Metropole* dan *Majestic*, tempat di mana *Loetoeng Kasarung* diputar mulai 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.

Film ini terbilang sukses dan memberi keuntungan bagi Heuveldorp dan Kruger. Buktinya, dua orang itu kembali memproduksi film pada 1927. Kali ini mereka mengangkat kisah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)



dalam judul *Eulis Atjih*. Sebuah kisah yang menggambarkan kepedihan seorang istri yang disia-siakan oleh suami.

Dunia perfilman pada masa itu sebagai dunia yang baru, sepertinya dunia yang menjanjikan untuk dilakukan investasi. Buktinya, para pengusaha Cina pada 1928 mulai ikut berbisnis dalam dunia perfilman. Nelson Wong datang ke nusantara dari Shanghai membuat *PH South Sea Film Co*. Dari perusahaan ini, ia membikin film berjudul *Lily Van Java*. Langkah Nelson itu disusul oleh dua adiknya, Joshua dan Otniel Wong. Mereka membikin *Halimoen Film*. Mereka memproduksi film tak hanya di Bandung,

namun di Semarang juga ada PH berlabel *Central Java Film Coy*. PH ini mampu membuat film berjudul *Setangan Berlumur Darah*.

Seiring perkembangan teknologi, era film bisu, di mana penonton hanya film gambar bergerak tanpa suara pun berakhir. Berakhirnya film bisu itu ditandai dengan hadirnya film berjudul *Atna de Vischer*. Film produksi dua perusahaan film, *Tans Comnpany* dan *Kruegers Bedrif*, yang diproduksi pada 1931 itu sudah mampu menggabungkan antara gambar dan suara. Dengan teknologi baru tersebut membuat masyarakat semakin asyik menonton film. Tak hanya *Atna de Vischer* yang sukses dengan film bicara. Film produksi *Halimoen* yang berjudul *Indonesia Malaise* pun juga sudah menggunakan teknologi serupa.

Sebelum film bicara, *Atna de Vischer* dan *Indonesia Malaise*, hadir, The Teng Chun sebenarnya pernah mencoba memadukan antara gambar dan suara dalam film yang berjudul *Boenga Roos Dari Tcikembang*. Namun hasil dari perpaduan yang dilakukan belum menghasilkan sesuatu yang diinginkan.

Kisaran 1926 hingga 1931, dunia perfilman di Jawa pada waktu itu sudah terbilang produktif bila diukur dengan masih minimnya teknologi dan media yang ada. Tercatat di kisaran tahun itu ada 21 judul film yang telah diputar di bioskop. Geliat film tidak hanya sebatas di gedung bioskop. Ada industri penunjang yang menambah maraknya perfilman. Industri penunjang itu adalah hadirnya majalah film, *Filmrueve*. Majalah itu pernah mengabarkan pada 1936 ada 227 bioskop yang tersebar di kota-kota besar di nusantara.

Selera pasar masyarakat penggemar film pada masa lalu sepertinya sama dengan masa kini. Hal demikian bisa dilihat dari kisah



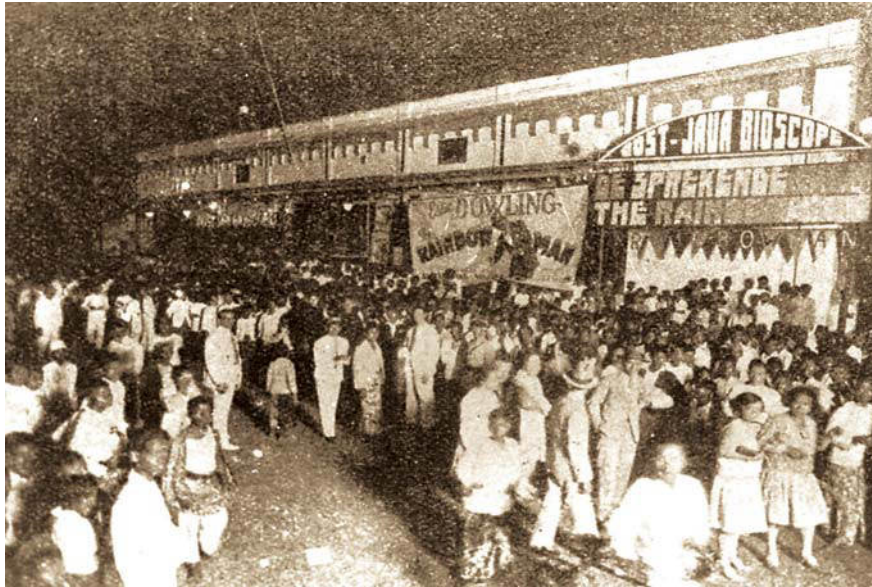


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Albert Balink. Balink adalah seorang wartawan yang mengenal film hanya lewat bacaan. Pada 1934, dia mengajak Wong bersaudara membuat film yang berjudul *Pareh*. Film ini bisa jadi obsesi besar dari Balink, buktinya ia sampai mendatangkan ahli film dokumenter dari Belanda, Manus Franken. Franken, ahli film dokumenter, banyak membuat film yang menampilkan hal-hal yang sifatnya dokumentasi tentang kejadian atau peristiwa (keindahan alam Hindia Belanda). Bagi masyarakat, keindahan alam adalah hal yang biasa mereka rasakan dan nikmati sehingga *Pareh* tak menarik bagi masyarakat. Akibatnya, film

ini kurang mendapat respon di pasar.

Meski gagal memproduksi film sesuai harapan, Balink tak putus asa. Dirinya terus membikin film. Masih tetap bersama Wong bersaudara, ia membuat film berjudul *Terang Boelan*. Nah, film ini baru mendapat sambutan bagus dari masyarakat. Jadi, masyarakat menyukai film yang mempunyai alur *action* atau drama daripada sekadar dokumenter.

Bila pada masa penjajahan Belanda, insan perfilman diberi ruang yang bebas dalam berkreasi. Lain halnya dengan masa pendudukan Jepang, semua hal dijadikan sebagai alat propaganda, termasuk film. Pada

masa-masa itu, sensor yang dilakukan sangat ketat. Bioskop yang ada hanya diizinkan untuk memutar film-film yang berbau propaganda Jepang. Kalaupun ada film selain itu, itu adalah produksi lama. Jadi pada masa itu *Loetoeng Kasarung* diputar ulang. Pada masa ini cineas keturunan Belanda dan Cina (pihak swasta) tak bisa beraktivitas karena sentimen Jepang pada mereka. Kondisi demikian membuat produksi film menurun bahkan *mandeg*. *Production House* milik Jepang, *Nippon Eiga Sha*, selama masa pendudukan Negeri Matahari terbit itu hanya mampu membuat tiga judul film, yakni: *Pulo Inten*, *Bunga Semboja*, dan *1001 Malam*.

Larangan ketat membuat film mengakibatkan dunia keartisan sepi dari tawaran kerja. Agar mereka tetap bisa mengembangkan *acting*-nya, selain agar dapurnya tetap *ngebul* maka aktris dan aktor yang ada pindah media dari layar lebar ke panggung sandiwara. Berduyun-duyunnya aktris dan aktor film ke panggung sandiwara inilah yang membuat lahirnya grup-grup sandiwara, seperti *Bintang Surabaya*, *Pancawarna*, dan *Cahaya Timur*. Salah satu tokoh perfilman pada masa itu, Usmar Ismail, pun ikut mendirikan grup sandiwara. Namun grup sandiwara ini sifatnya seperti 'sekolah akting'. □

AWG/dari berbagai sumber





Ismail dan Malik, Peletak Dasar **Perfilman Nasional**

Tahun 1950-an disebut tahun kebangkitan perfilman nasional. Pada tahun itu (1950) diproduksi film *Darah & Doa*. Film ini semuanya dikerjakan oleh putra bangsa. Pada 1955 digelar kali pertama FFI. Usmar Ismail dan Djamaludin Malik merupakan tokoh yang meletakkan dasar-dasar perfilman nasional.



Usmar Ismail dan Djamaludin Malik

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BILA di tahun 1900 hingga 1949, film-film yang beredar atau dibuat di Indonesia adalah produksi orang-orang dari luar, maka di tahun 1950 orang Indonesia asli sudah mulai berkreasi di dunia perfilman. Tahun 1950 disebut sebagai titik bangkit perfilman di Tanah Air, sebab pada hari, bulan, dan tahun itu, 30 Maret 1950, kali pertama dilakukan *shooting* film yang disutradarai oleh Usmar Ismail.

Pria kelahiran 20 Maret 1921 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, itu adalah penggiat film dan teater mulai 1940-an. Dirinya pernah menjadi ketua Badan Permusyawaratan Kebudayaan Jogjakarta (1946-1948), Ketua Serikat Artis Sandiwara Jogjakarta (1946-1948), Ketua Akademi Teater Nasional Indonesia Jakarta (1955-1965), dan ketua Badan Musyawarah Perfilman Nasional (BMPN). Sebelum membuat film *Darah & Doa*, Usmar sudah mempunyai pengalaman dalam dunia

perfilman saat terlibat dalam produksi film yang berjudul *Gadis Desa*, *Harta Karun*, dan *Tjitra*. Film-film itu dibuat pada tahun 1949.

Tahun 1950 disebut sebagai titik bangkit perfilman Indonesia, karena film *Darah & Doa* (*Long March of Siliwangi*) disebut sebagai film yang benar-benar bercirikan Indonesia, disutradarai oleh orang Indonesia asli, serta diproduksi oleh PERFINI (Perusahaan Film Nasional Indonesia).

Film yang dibintangi oleh Farida, Del Juzar, Aedy Moward, Sutjipto, itu skenarionya dibuat oleh sastrawan Sitor Situmorang. Film ini mengambil latar saat terjadi Agresi Militer Belanda, Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948, dibumbui dengan kisah cinta. Sinopsis *Darah & Doa* adalah sebagai berikut: Prajurit Divisi Siliwangi yang dipimpin Kapten Sudarto yang diperankan oleh Del Juzar diperintahkan kembali ke Bandung. Perintah ini diberikan sebab Jogjakarta telah diduduki kembali

pasukan Belanda. Saat itu, tentara, rakyat, dan pemerintah Indonesia tidak hanya direpotkan oleh agresi militer Belanda, namun di saat bersamaan juga terjadi Pemberontakan PKI Madiun.

Sebagai film perang tak heran dalam alur cerita yang ada tergambar bagaimana rakyat dan tentara bahu membahu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan judul filmnya yang lain *Long March of Siliwangi* maka dalam film itu ada gambar perjalanan jauh yang dilakukan pasukan Siliwangi, Jogjakarta-Bandung, sejauh 343 km. Pada masa dahulu di mana tentara keadaannya belum seperti saat ini, maka mereka membawa bekal seadanya. Meski didera rasa lelah, namun mereka tetap sabar dan mempunyai harapan agar kemerdekaan yang ada tetap dipertahankan.

Akhir dari film ini adalah ketika Sudarto ditembak mati oleh gerombolan PKI yang hendak ditumpas. Sebelum nafas terakhir dihembuskan, Sudarto dengan kalimat terpatah-patah sembari menahan perih mengatakan: "Jangan diulangi lagi, biar aku saja". Setelah dirinya berpesan pada bangsa dan negara, Sudarto gugur membela bangsa dari pemberontakan PKI.

Usmar Ismail dan Sitor Situmorang sebelum membuat film tentu telah berdiskusi dan berpikir agar film yang dibuat itu menarik, tak menjenuhkan, dan menampilkan sisi-sisi manusiawi yang lumrah. Untuk itu, dalam film yang berdurasi 128 menit ini ada kisah-kisah Sudarto dalam perjuangan. Diceritakan, meski Sudarto sudah mempunyai istri namun



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dalam perjuangan ia jatuh hati kepada dua perawat, Widyha dan seorang gadis dari Jerman. Mereka bertemu saat di pengungsian.

Kebangkitan film Indonesia tidak hanya ditandai oleh lahirnya film *Darah & Doa* garapan putera bangsa, namun juga meningkatnya jumlah bioskop yang ada. Pada tahun itu, 1951, salah satu bioskop yang hadir adalah *Metropole*. Bioskop yang megah pada masanya sekarang lebih akrab disebut *Metropole XXI* dan *Metropole Premier*, Kompleks Megaria, Cikini, Jakarta.

Semakin membludaknya bioskop membuat pengusaha atau pengelola merasa perlu

untuk berhimpun. Untuk itu, pada 1955 lahirlah Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Agar tidak terjadi dualisme organisasi akhirnya mereka menyatu dan menghimpun diri dalam Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia.

Di tahun-tahun yang sama, tidak hanya bertambahnya jumlah gedung bioskop, produksi film pun terus bermunculan. Lihat saja dua pembuat film, Usmar Ismail dan Djamiludin Malik, sangat produktif berkarya. Selepas *Darah & Doa*, Usmar Ismail masih banyak membuat film seperti *Enam Djam di Djogja*, *Dosa Tak Berampun*, *Terimalah*

Laguku, *Kafedo*, *Krisis*, *Lewat Djam Malam*, *Lagi-Lagi Krisis*, dan *Tamu Agung*. Sedang karya Djamiludin Malik adalah *Sedap Malam*, *Rodrigo de Villa*, *Leilani*, *Tabu*, *Tarmina*, *Ratu Asia*, dan *Tauhid*.

Meski produksi film Indonesia sudah dihasilkan oleh sineas-sineas sendiri, namun kebanggaan tersebut harus berhadapan dengan masuknya film-film dari luar. Tidak hanya dari Cina dan Amerika, namun juga dari India dan Malaysia. Tantangan yang dihadapi bukan soal kualitas cerita, namun selera pasar masyarakat. Di satu sisi film India yang kesohor dengan lagu dan tarinya mampu menarik jutaan masyarakat kalangan bawah. Di sisi yang lain, bioskop elit pada masa itu, *emoh* memutar film Indonesia. Mereka lebih memilih film-film dari Paman Sam.

Menghadapi yang demikian, selain untuk mendorong terjadinya kompetisi kreatif sembari mempromosikan film-film Indonesia maka Usmar Ismail dan Djamiludin Malik menginginkan adanya festival film Indonesia. Keinginan dua insan film tersebut disambut baik oleh Gubernur Jakarta Sudiro, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Yamin. Dukungan gubernur dan menteri itulah yang akhirnya digelar Festival Film Indonesia (FFI). Kali pertama acara festival itu dibuat sangat sederhana, berlangsung mulai 30 Maret hingga 5 April 1955 di Rumah Dinas Wali Kota Jakarta Raya, Jl. Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam FFI I ada dua aktris dan dua aktor yang menyabet predikat sebagai pemeran terbaik. Abdul Hadi meraih gelar sebagai pemeran utama pria terbaik dalam film *Tarmina*. Kemudian A.N. Alcaff dalam film *Lewat Djam Malam*. Sedang Fifi Young meraih pemeran utama wanita terbaik dalam *Tarmina*. Sedang Dhalia pemeran utama terbaik wanita dalam *Lewat Djam Malam*. □

AWG/dari berbagai sumber



Layar Tancap: Merasakan, Dikenang, dan Dilestarikan

Layar tancap pernah menjadi hiburan yang populer di tengah masyarakat. Kemeriahan yang ada menjadi kenangan banyak orang. Mereka ingin kenangan itu tetap dinikmati bahkan diteruskan. Meski dalam acara terkadang terganggu kendala teknis dan hujan, namun setiap acara itu digelar, ribuan orang datang ke lapangan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MEREKA yang lahir di tahun 1970-an ke bawah, pasti pernah merasakan nonton film layar tancap. Menurut kamus bahasa Indonesia, layar tancap berarti 'pertunjukan film di alam terbuka dengan layar yang tiangnya ditancapkan di tanah.' Dari sinilah maka layar tancap diadakan di alun-alun, lapangan sepakbola, atau di lapangan terbuka lainnya.

Di tahun 1970-an dan 1980-an, layar tancap merupakan hiburan amat populer di masa itu. Bila di alun-alun, misalnya, ada layar tancap maka masyarakat dari berbagai penjuru datang berduyun-duyun ke sana, entah dengan jalan kaki, naik sepeda, sepeda motor, bahkan ada yang sampai patungan nyewa truk untuk nonton layar tancap.

Pada masanya layar tancap sangat digemari dan ditunggu-tunggu, terutama masyarakat kampung, sebab pada waktu itu hiburan yang bisa dinikmati sangat terbatas. Ada televisi namun selain

pemiliknya terbatas, ragam hiburan yang ada cuma hadir pada malam minggu, yakni *Film Akhir Pekan*. Meski ada bioskop, namun daya beli masyarakat masih rendah. Uang yang ada lebih baik digunakan untuk keperluan lain daripada untuk menonton film. Untuk itulah maka layar tancap menjadi hiburan yang murah, meriah, sambil bisa *mejeng*. Tak heran bila layar tancap digelar, tempat yang ada penuh dengan lautan manusia.

Layar tancap biasa digelar pada malam-malam libur, hari-hari besar nasional, hajatan, atau saat ada kegiatan pemerintah. Layar tancap digelar selain untuk menghibur masyarakat, terkadang digunakan untuk menyosialisasikan pembangunan dan atau untuk mempromosikan produk-produk komersial. Bila layar tancap diadakan oleh pemerintah, mobil proyektor yang ada pasti ada tulisan *Departemen Penerangan*.

Dengan teknologi yang masih terbatas, terkadang dalam penyelenggaraan layar

tancap ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Seperti kejadian ketika film hendak diputar, tiba-tiba proyektor mengalami gangguan atau saat film tengah asyik-asyiknya berlaga tiba-tiba terputus suplai listriknya. Tentu hal yang demikian membuat penonton bersorak protes. Tidak menjadi masalah bila gangguan yang terjadi bisa diatasi secepatnya, namun bila gangguan itu sampai berjam-jam tentu akan membuat penonton kecewa.

Tak hanya soal teknis yang membuat keasyikan nonton layar tancap menjadi rusak. Faktor alam, seperti hujan, juga membuat acara bisa bubar. Ketika hujan atau gerimis penonton bubar maka layar tancap juga disebut *Misbar* alias gerimis bubar. Hal demikian pula yang juga membuat penonton kecewa.

Seiring perkembangan zaman, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan teknologi semakin membaik maka layar tancap

mengalami masa-masa surut. Bahkan, saat ini bisa jadi menjadi kenangan bagi orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Semakin banyak orang mampu membeli televisi ditambah dengan perlengkapan video, maka hal demikian membuat bisnis layar tancap menjadi *seret*.

Hadirnya bioskop-bioskop baru dengan film yang menarik pada masa itu, seperti *Joko Sembung*, *Warkop*, *Sundel Bolong*, juga menjadi pengaruh pada keberadaan layar tancap. Apalagi sekarang, ragam acara televisi, *youtube*, media sosial, dan bioskop yang modern lebih membuat keberadaan layar tancap semakin lenyap.

penggemar film India maka *Dilwale* menjadi film pilihan. Bila tidak film India, biasanya film Indonesia lama yang ceritanya mengenai silat dan pendekar yang dipilih. Untuk menggelar acara itu Murdi mengeluarkan ongkos pemutaran kisaran Rp 700.000 hingga Rp 800.000.

Bila Murdi menggelar layar tancap untuk memeriahkan acara sunatan, lain halnya dengan warga RT 12 RW 05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Warga di sana dalam memperingati HUT 17 Agustus 1945 di tahun 2015 memeriahkan dengan acara nonton bareng layar tancap. Sama seperti perasaan Murdi yang ingin mengenang masa

juga di Pamulang, Tangerang Selatan; Serua Depok; Citayam, Bogor; dan tempat lainnya.

Fenomena sosial layar tancap tersebut rupanya sebuah kajian, bahan diskusi, dan menjadi tradisi yang perlu tetap dirawat atau dilanjutkan. Agar layar tancap tidak punah maka ada sebuah forum yang dinamakan *Kineforum Misbar*. Forum ini adalah sebuah acara pemutaran film di ruang terbuka di tengah masyarakat urban perkotaan. Dalam *Kineforum Misbar 2014*, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Irawan Karseno, mengatakan, acara itu digelar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan tontonan berkualitas juga



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Meski demikian pagelaran layar tancap ini masih terjadi sesekali di tengah masyarakat. Pada *kompas.com*, 4 Februari 2017, dikabarkan ada pertunjukan layar tancap di Tegal Rotan, Tangerang Selatan, Banten. Layar tancap ini diadakan untuk memeriahkan hajatan sunatan anak kedua dari Murdi. Pria yang sekarang berumur 38 tahun itu bisa memilih acara lain untuk memeriahkan sunatan anaknya, namun karena dirinya penggemar layar tancap sejak kecil maka kebiasaan itu selain dikenang juga tetap dilakukan.

Malam itu, masyarakat di sana menonton Shahrukh Khan menari-nari, bergoyang-goyang, di layar tancap. Karena Murdi

lalu, salah seorang warga di sana, Heri, menyatakan, dia nonton layar tancap selain untuk memeriahkan HUT 17 Agustus 1945 juga ingin mengenang masa lalu (*detik.com*, 30/8/15). Acara itu diakui oleh Heri sukses, sebab mampu menarik para warga untuk nonton bareng. Dengan kesuksesan tersebut maka dirinya menyarankan untuk memeriahkan HUT 17 Agustus 1945 lebih baik menggelar nonton layar tancap daripada lomba-lomba yang biasa diadakan.

Meski Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan di Indonesia, namun pagelaran layar tancap ini masih kerap terjadi di banyak tempat. Selain di Mampang dan Tegal Rotan,

murah. “Kami mencoba menangkap keresahan masyarakat yang tengah mencari alternatif hiburan,” ujarnya seperti yang tertulis di *cnnindonesia.com*, 23/11/2014.

Acara yang digelar di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, itu menurut Irawan untuk menunjukkan bahwa film bisa dinikmati siapa saja. Dirasakan industri film saat ini seolah-olah menjadi sajian eksklusif yang hanya diputar di mal-mal mewah. Dalam acara yang digelar selama dua minggu itu ada 40 film Indonesia yang diputar, baik klasik maupun kontemporer. Setiap malam ada dua kali pertunjukan, jam 19.00 dan 21.00 WIB. □

AWG/dari berbagai sumber

Mengantisipasi **Ancaman** dari **Wilayah Perbatasan**

BUKU ini menarik untuk dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan pembangunan,” ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin saat memberi sambutan dalam acara *Wakil Rakyat Bicara Buku*, Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, Jakarta, 6 Maret 2018. Lebih lanjut dikatakan, buku yang berjudul *Suka Cita Mengabdikan Di Perbatasan* itu penting dibaca bagi semua orang.

Mahyudin memaparkan dengan membaca buku ini kita akan tahu langsung kondisi perbatasan dari orang yang langsung mengalami. “Dari orang yang langsung mengabdikan di sana,” ujarnya. Mengabdikan di perbatasan diakui ada suka dan duka. Dia berharap lebih banyak sukanya, meski fasilitas di perbatasan diakui banyak kesulitan. “Yang

“Tak boleh sejenkal tanah pun hilang dari NKRI,” tegasnya.

Meski pembangunan perbatasan masih ada kendala, namun dia bersyukur pemerintah saat ini tengah giat membangun perbatasan. Ia mencontohkan pembangunan perbatasan di Kalimantan Barat, Entingkong, Indonesia kalah bagus dibanding Malaysia, namun saat ini, setelah pembangunan dilakukan, Indonesia menjadi lebih bagus. “Sekarang kita lebih bagus,” ucapnya.

Salah satu pembahas dalam acara itu, Ketua Departemen Sejarah UI Abdurachman, mengatakan, buku yang saat itu dibedah sebagai gambaran UI dan alumninya melakukan pengabdian masyarakat. “Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kawasan perbatasan,”



Judul buku:
Suka Cita Mengabdikan Di Perbatasan
Tebal buku:
260 halaman
Editor :
Yuyun R. Intarti
Penerbit :
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

mau bertugas di perbatasan pasti menyukai pengabdian dan pekerjaan,” paparnya. Bagi Mahyudin, orang yang mencintai pekerjaan pasti akan menikmati bila bertugas di perbatasan.

Berbicara soal perbatasan, pria yang sudah sering melakukan kunjungan kerja di perbatasan itu mengakui, memang fasilitas di kawasan perbatasan sangat terbatas. Wilayah perbatasan bagian Malaysia disebut lebih bagus sehingga masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berbelanja kebutuhan sehari-hari ke Malaysia. “Uang yang beredar di kawasan perbatasan pun ringgit,” ungkapnya.

Membangun kawasan perbatasan diakui banyak kendala. Dia mencontohkan di Pulau Sebatik ada wilayah yang diperuntukkan untuk kawasan hutan, sehingga tak bisa membangun pabrik CPO. Akibatnya, petani sawit menjual produknya ke Malaysia. “Dari sinilah akhirnya Malaysia yang mendapat keuntungan,” ungkapnya. Hal demikianlah, menurut Mahyudin, harus diselesaikan. Untuk itu dia menyarankan agar kawasan perbatasan dibangun sebagai kawasan ekonomi khusus. Ini dilakukan untuk menjaga dan merawat NKRI.

ujarnya.

Abdurachman mengaku, buku *Suka Cita Mengabdikan Di Perbatasan* dibahas oleh wakil rakyat sehingga semua bisa mengetahui kondisi perbatasan. “Membangun perbatasan merupakan kunci dari pembangunan yang penuh tantangan,” ujarnya. Dia tidak ingin hilangnya Pulau Sipadan-Ligitan akan terulang. Ancaman menyempitnya wilayah Indonesia, menurut Abdurachman, bisa terjadi hal ini terkait dengan adanya pemanasan global.

Dengan adanya pemanasan global mengakibatkan 2000 pulau kecil bisa tenggelam. “Hilangnya pulau-pulau itu pasti akan berdampak pada perbatasan,” ungkapnya. Untuk itu dia meminta perhatian kepada semua akan masalah-masalah yang ada di perbatasan. “Sehingga wilayah kita bisa dilindungi,” paparnya.

Buku setebal 260 halaman ini diterbitkan oleh *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*. Buku ini menceritakan berbagai hal pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih menjelaskan fakta yang ada, di buku ini dilampirkan *tabel* dan gambar. □

AWG

Hoeng Iman Santosa

Polisi **Teladan** Sepanjang Zaman



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PRESIDEN keempat KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur banyak meninggalkan anekdot yang membuat orang lain tersenyum atau bahkan dibuat menahan amarah. Salah satu anekdot Gus Dur yang terus dikenang masyarakat adalah terkait Kepolisian Republik Indonesia. Dalam anekdotnya, Gus Dur mengatakan: Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hoeng Iman Santosa.

Hoeng adalah sosok seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinilai jujur. Ia patut diteladani seluruh anggota korp baju coklat alias anggota Polri. Hoeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Dia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5, menjabat sejak 9 Mei 1968 – 2 Oktober 1971.

Di sepanjang usianya, Hoeng hidup sangat bersahaja. Karena itu, istri Hoeng, Merry Roeslani, membuka toko bunga untuk membantu mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga. Nyatanya, toko bunga yang dikelola Merry Roeslani cukup laris dan terus berkembang.

Namun, menjelang pengangkatan suaminya menjadi Kepala Jawatan Imigrasi (kini jabatan itu disebut Dirjen Imigrasi) pada 1960, Hoeng meminta istrinya menutup

toko bunga tersebut. Karuan saja, permintaan itu menjadi tanda tanya besar bagi Merry. Tetapi sang Istri hanya bisa menuruti permintaan suaminya, apalagi Merry adalah tipe istri yang mendukung kejujuran suaminya.

Dikemudian hari Merry baru tahu bahwa dia harus menutup toko bunga itu dengan alasan suaminya (Hoeng) tidak mau kalau semua orang yang berurusan dengan imigrasi, memesan bunga pada toko kembang tersebut karena hal itu dianggap tidak adil bagi toko bunga yang lain.

Sebagai pejabat negara, Hoeng tak luput dari godaan suap. Salah satu di antaranya godaan dari seorang pengusaha perempuan penyelundup. Ceritanya begini, seorang perempuan nan cantik jelita yang terlibat kasus penyelundupan datang menemui Hoeng Iman Santoso. Si perempuan itu minta agar kasus yang dihadapinya tak dilanjutkan ke pengadilan.

Berbagai muslihat dilakukan perempuan pengusaha ini, termasuk berusaha mengajak damai. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hoeng. Namun, semua hadiah itu ditolak dan dikembalikan oleh Hoeng. Hanya saja Hoeng heran kenapa kok koleganya di kepolisian dan kejaksaan meminta agar ia melepaskan

wanita itu. Belakangan diketahui bahwa wanita itu selalu berusaha lepas dari jerat hukum dengan berbagai cara. Dia juga tidak segan-segan tidur dengan pejabat demi memuluskan usahanya.

Sebagai orang pertama di jajaran kepolisian, Hoeng benar-benar memberi teladan bagi seluruh anggotanya. Bukan hanya soal kejujuran dan antikorupsi, Hoeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat menjabat Kapolri dengan pangkat jenderal berbintang empat, ia tak segan turun ke jalan mengatur lalu lintas yang macet.

Ia berpendapat, seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari pangkat terendah sampai tertinggi tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Dengan tekad seperti itu maka Hoeng tidak pernah malu untuk turun tangan mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak di tempat. Ia rela turun langsung di perempatan yang terkena kemacetan, lengkap dengan atribut baju dinas Kapolri.

Sum Kuning

Dugaan aparat hukum menjadi beking tempat maksiat bukan hanya terjadi sekarang ini. Sejak dulu, bahkan saat Hoeng yang

dikenal jujur itu menjadi Kapolri, dugaan adanya aparat hukum menjadi beking perjudian dan tempat maksiat sudah banyak buktinya. Tetapi, hanya sedikit yang berani mengobrak-abrik praktik seperti itu. Mungkin hanya Hoegeng yang paling berani memporakporandakan praktik seperti itu.

Saat itu, 1955, Kopol Hoegeng dipindahtugaskan ke Medan, Sumatera Utara. Tugas berat menantinya. Penyelundupan dan perjudian merajalela di sana. Para bandar menyuap aparat negara. Mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah dipermainkan oleh para penguasa dunia hitam. Para aparat tidak bisa berbuat apa-apa karena berhasil disogok.

Medan agaknya menjadi ladang ujian buat Hoegeng yang dipercaya masih memiliki integritas sebagai polisi yang baik dan jujur. Apalagi sejak dari muda, Hoegeng sudah dikenal jujur, berani dan antikorupsi. Hoegeng juga tak mau menerima suap atau pemberian dalam bentuk apapun. Apalagi sebagai pejabat baru Medan, Hoegeng tak langsung mendapatkan rumah dinas, karena masih dipakai pejabat lama. Kondisi ini sangat rawan dimanfaatkan oleh para bandar judi

untuk menyogok Hoegeng.

Ternyata benar, begitu Hoegeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan bandar judi langsung mendekatinya. Ia menyampaikan selamat datang, sekaligus memberi tahu sudah tersedia mobil dan rumah untuk Hoegeng sebagai hadiah dari para pengusaha. Tetapi Hoegeng menolaknya dan dia memilih tinggal di Hotel De Boer sambil menunggu rumah dinas tersedia.

Keuletan para bandar untuk menyogok Hoegeng tidak berhenti sampai di situ. Setelah menunggu selama dua bulan, Hoegeng mendapati rumah dinas sudah siap, termasuk dengan berbagai perabot mewah. Rupanya barang-barang itu datang dari bandar yang disampaikan oleh utusan yang sama seperti saat ia tiba di pelabuhan Belawan.

Hoegeng sekali lagi menolak pemberian itu. Ia meminta barang-barang itu dikeluarkan. Tetapi setelah sekian lama tak kunjung dikeluarkan juga maka tanpa kompromi Hoegeng memerintahkan pembantunya mengeluarkan barang-barang itu. Dan, barang-barang itu kemudian diletakkan di luar rumah. Hoegeng menganggap cara itu lebih baik daripada melanggar sumpah.

Ketetapan hati Hoegeng untuk mengabdikan kepada negara sebagai polisi yang jujur dan tak mengenal kompromi rupanya membuat segelintir orang sangat membencinya. Puncaknya terjadi pada peristiwa yang dikenal dengan kasus pemerkosaan Sum Kuning di Jogjakarta.

Saat itu, sekitar awal 1970-an, terjadi pemerkosaan terhadap perempuan muda penjual telur ayam oleh sejumlah anak pejabat. Namanya adalah Sumarijem yang kemudian dikenal dengan nama Sum Kuning. Ia diculik dan diperkosa, kemudian ditinggalkan di pinggir jalan. Lalu, Sum melapor ke polisi. Tetapi ia malah dituduh membuat laporan palsu dan disidangkan.

Hoegeng sebagai Kapolri saat itu terus mengikuti persidangan kasus Sum Kuning hingga diputus tak bersalah. Ia kemudian membetuk Tim Pemeriksa Sum Kuning hingga akhirnya kasus Sum Kuning membesar bagaikan bola salju. Tetapi,



Kapolri Hoegeng Iman Santosa

sebelum kasusnya benderang, Presiden Soeharto turun tangan. Soeharto memerintahkan kasus ini ditangani Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtib. Hoegeng segera sadar kalau kasus ini melibatkan pejabat yang akan mengaburkan fakta sesungguhnya. Apalagi setelah itu, tepat 2 Oktober 1971, Hoegeng dipensiunkan sebagai Kapolri.

Pensiun dini terhadap Hoegeng dilakukan secara halus. Oleh Soeharto ia ditawarkan menjadi Duta Besar, tetapi Hoegeng menolak, dan memilih mundur. Lepas dari jabatan Kapolri, Hoegeng menyibukkan diri bermain musik tergagung dalam grup band *The Hawaiian Seniors*. Band ini sering tampil di televisi nasional TVRI.

Hoegeng meninggal pada 14 Juli 2004 dalam usia 82 tahun. Ia tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sesuai wasiatnya, Hoegeng tak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dan polisi jujur ini pun dikebumikan di Pemakaman Umum Giri Tama, Bogor. Semoga nama Hoegeng tetap dikenang dan menjadi teladan untuk semua. □

MBO



BEM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Saat Zulhasan
Dengarkan Pemikiran Mahasiswa
Mahasiswa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

LAZIMNYA, di setiap sosialisasi Empat Pilar MPR, Ketua MPR lah yang berbicara menyampaikan materi sosialisasi. Tetapi, pada saat Konferensi Kebangsaan dan Sosialisasi di hadapan pimpinan BEM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (1/3), Ketua MPR memilih mendengar-masukan yang disampaikan para ketua BEM. Zulkifli Hasan berdalih, MPR adalah Rumah Kebangsaan, jadi siapapun berhak berbicara di MPR, termasuk mahasiswa.

“MPR ini rumah rakyat, rumah besar untuk seluruh rakyat Indonesia. Di rumah rakyat ini, saya justru ingin mendengarkan saran, kritik, masukan, dan mungkin curhat rekan-rekan tentang masalah kebangsaan,” kata Zulhasan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan BEM UGM, UI, ITB, UIN, Unpad, STAN, UPH, Prasetya Mulya, Paramadina, BEM Perbanas,

BEM PNJ, dan Poltek AKA Bogor .

Oded Kresna, Presiden Mahasiswa BEM UGM, mendapat kesempatan pertama menyampaikan pemikirannya mengenai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Obed menyatakan, Pancasila adalah ideologi kolektif, bukan ideologi sekelompok orang. Ini sesuai dengan pengakuan Soekarno yang mengatakan bahwa dia bukanlah pencipta Pancasila. Ia hanya membangkitkan kembali nilai-nilai yang sudah sejak lama ada di bumi Indonesia, dan mewujudkannya dalam bentuk Pancasila.

“Karena itu, Pancasila jangan diklaim sebagai milik sekelompok orang, tapi Pancasila adalah ideologi kita semua. Mulai dari nelayan, petani, dan kita semua adalah Pancasila,” kata Oded. Karena itu, menurut Oded, ketika nilai-nilai Pancasila mulai luntur, patut dipertanyakan, ke



mana nilai-nilai yang dulu ada di bumi dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia itu.

Sementara itu, perwakilan Dewan Mahasiswa UIN Jakarta, Ahmad Nabil, menegaskan pentingnya kemandirian pangan. Sulit diterima akal sehat, kata Nabil, negara agraris seperti Indonesia ternyata melakukan impor berbagai bahan kebutuhan pangan. Padahal, bangsa Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangannya dari dalam negeri sendiri.

“Negeri kaya ini harusnya berdiri di atas kakinya sendiri. Soal pangan jangan lagi ada impor beras ketika petani kita justru sedang panen. Sebagai Ketua MPR, kami minta Pak

Zul suarakan ini pada pemerintah,” harap Ahmad Nabil.

Sementara itu, perwakilan BEM UI Idmand Perdana menegaskan, penolakannya terhadap revisi UU MD3 yang membuat DPR menjadi anti kritik. Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya terbuka dan mau memperbaiki diri dengan kritik dari masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan perwakilan BEM, Ketua MPR menyampaikan terima kasih. Mendengar kritik, analisa, masukan dan semangat teman-teman mahasiswa, Zulhasan optimistis masa depan Indonesia bisa jauh lebih baik.

Pada kesempatan itu Zulhasan mengajak aktivis pimpinan BEM untuk menjadi pelopor, sekaligus perekat persatuan dan menjahit kembali merah putih. “Ketika ada pihak yang terus mengadu domba umat beragama, saya minta mahasiswa untuk bersama-sama berada paling depan untuk menjaga dan merawat persatuan,” harap Zulhasan.

Sebagai bentuk komitmen bersama untuk merawat keberagaman, di akhir acara Zulkifli Hasan bersama pimpinan BEM menandatangani Deklarasi Aktifis Penjaga Kebangsaan. □

MBO

Kalimantan Timur

Mahyudin Sosialisasi Empat Pilar di Kutai Timur



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MENGISI libur panjang tahun baru Imlek, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin ST., MM., menyampaikan materi sosialisasi Empat Pilar di kalangan masyarakat Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada tiga kelompok masyarakat di dua kecamatan disinggahi Mahyudin untuk memberi sosialisasi, yaitu Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng.

Di kecamatan Muara Wahau, Mahyudin menyampaikan sosialisasi di hadapan masyarakat Desa Wahau Baru, dan siswa SLTA se Kecamatan Muara Wahau. Sedangkan di Kecamatan Kombeng, Mahyudin menyampaikan sosialisasi di hadapan masyarakat dayak Kayan.

Yang menarik, saat hendak masuk desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, Kutai Timur, tempat masyarakat Dayak Kayan tinggal, Jumat (16/2), Mahyudin mendapat sambutan yang sangat besar. Di depan pintu masuk desa, Wakil Ketua MPR dipersilakan naik ke atas kendaraan yang sudah didekorasi dengan ornamen masyarakat Dayak beserta beberapa alat tetabuhan. Kendaraan ini berjalan hingga 1 km menuju Desa Miau Baru.

Kemudian, ketika memasuki desa Miau Baru, Wakil Ketua MPR berganti kendaraan. Di tempat ini Mahyudin menerima pakaian dan topi adat dayak. Selanjutnya, Wakil Ketua MPR naik di atas perahu sepanjang hampir 20 meter. Ia duduk di atas perahu sembari dipayungi seorang wanita berpakaian adat Dayak. Perahu tersebut ditandu oleh lebih dari 50 pemuda Dayak hingga tiba di depan Lamén Adat Bilung Jau, atau rumah adat warga Dayak. Tiba di tempat tersebut, Mahyudin dipersilakan masuk ke rumah adat. Sesaat kemudian, kepada Wakil Ketua MPR dipersembahkan tarian perang yang dimainkan oleh pemuda dan pemudi Dayak.

Mengomentari penyambutan yang diberikan masyarakat, Mahyudin mengaku, sangat terharu. Menurut Mahyudin, tarian tersebut dimainkan penuh perasaan. Tidak seperti tari-tari serupa yang ditampilkan di tempat lain. "Tari ini sangat menarik karena dimainkan penuh perasaan. Sedangkan di tempat lain sekedar dilakukan para penarinya tidak mengerti makna tiap-tiap gerakan dalam tariannya", kata Mahyudin.

Karena itu, Mahyudin berharap, adat dan kesenian Dayak dijaga dan dipertahankan. Tak terkecuali rumah adat masyarakat Dayak. Karena rumah tersebut sangat berharga, baik secara moril maupun material.

"Saat ini sangat sulit mendapatkan kayu ulin sebesar itu. Walaupun ada harganya sangat mahal. Dengan mempertahankan rumah adat, berarti kita memberi pengetahuan kepada anak cucu agar mereka mengenal rumah adatnya sendiri", kata Mahyudin lagi.

Masyarakat Dayak Kayan di desa Miau Baru Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, merupakan salah satu komunitas Dayak terbesar di Indonesia. Lebih dari 5000 orang Dayak hidup di desa Miau Baru. Dayak Kayan di Miau Baru merupakan masyarakat dayak pindahan. Mereka berasal dari Apoyakan, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka berjalan kaki menyusuri hutan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya tiba di kecamatan Kombeng, sekitar tahun 1969. Mereka pergi dari daerah asalnya karena menyelamatkan diri dari



serangan penyakit mematikan. Kepergian mereka ke Kombeng adalah untuk menyelamatkan diri dan menemukan kehidupan yang baru, yang lebih menyenangkan.

Kerja Keras

Saat menyampaikan sosialisasi di hadapan warga Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Jum'at (16/2/2018), Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan kepada masyarakat agar tidak gampang putus asa dalam mencapai cita-cita. Karena, untuk mencapai cita-cita memang butuh perjuangan. Bahkan banyak juga yang gagal, meski sudah berjuang dan bekerja keras.

Pada acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Wahau Baru itu, Mahyudin mengingatkan, hanya orang yang mau berjuang dan bekerja keras sajalah, menurut Mahyudin, yang akan berhasil meraih cita-cita. Sedangkan yang malas, tidak mau

bekerja keras dan gampang putus asa. Mereka tidak akan pernah mencapai sukses.

Untuk menjadi Wakil Ketua MPR, lanjut Mahyudin, dirinya harus bekerja keras, tak kenal putus asa. Dia pernah jualan pisang goreng, dan diusir dari kos-kosan. Tetapi semua itu tak membuat dia berputus asa.

"Saya sempat tidak diterima di perusahaan batubara, tapi kemudian saya jadi Bupati Kutai Timur. Saat gagal jadi Bupati periode kedua, tetapi setelah itu saya malah jadi Wakil Ketua MPR," cerita Mahyudin.

Intinya, kata Mahyudin, untuk sukses manusia harus bekerja keras. Untuk maju, manusia tidak boleh berputus asa. "Berjuang dan bekerja keraslah, agar kita bisa sukses, mencapai cita-cita", katanya.

Pesan yang hampir sama disampaikan Mahyudin saat menyampaikan sosialisasi di kalangan siswa SLTA juga di Kecamatan Muara Wahau. Acara tersebut berlangsung di ruang pertemuan Kecamatan Muara

Wahau, Sabtu (17/2). Ikut hadir pada acara itu, Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi, serta Camat Muara Wahau Drs. Irang Ajang, M.Si. Sedangkan materi sosialisasi disampaikan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR Mohamad Rizal.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR RI antara lain meminta para siswa agar giat belajar dan tidak gampang minder, meski memiliki kekurangan. Selain itu, para siswa harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita.

"Orangtua saya hanya sekolah di SR. Waktu SMA, saya harus membantu orangtua membuat batu bata, lalu saat kuliah saya jual gorengan dan mengojek. Sedangkan kalian bisa belajar dengan baik dan tidak harus bekerja. Karena itu, satu hari nanti seharusnya kalian bisa lebih berhasil dibanding saya", kata Mahyudin.

Sementara itu, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR M. Rizal mengatakan, para siswa harus berhati-hati menggunakan media sosial (medsos), karena medsos bisa mengubah cara pandang seseorang. Karena itu, apa yang disampaikan medsos tidak boleh asal ditiru. Tetapi harus disaring dahulu, apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. "Jangan karena mengikuti medsos kita melawan etika dan tidak memperhatikan nilai-nilai Pancasila", kata M. Rizal.

Pada kesempatan itu, Rizal juga meminta para siswa agar pandai bergaul. Apalagi, Indonesia adalah negara yang beragam, sehingga harus mengutamakan saling menghormati. Kalau ada yang pernah tersakiti, mari saling menghormati, agar kita bisa tetap bersatu. □



MBO

Di Malang Ketua MPR

Serukan Pentingnya Kedaulatan Pangan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Zulkifli Hasan memulai tiga hari kunjungan kerjanya di Jawa Timur dengan singgah di markas Aremania, Fanatik 66, Jl. Rais No. 66 Malang, Jawa Timur, Senin (5/2). Kedatangan Zulhasan di Fanatik 66 disambut nyala flear, beserta teriakan yel-yel khas supporter Arema. Begitu tiba di Markas Aremania itu disambut pengalungan syal Arema oleh perwakilan Aremania Simon dan Fery Pay. Ikut serta dalam acara tersebut anggota

MPR Fraksi PAN Totok Daryanto dan Viva Yoga Mauladi.

Pada kesempatan itu, Fery Pay mewakili Aremania, memberikan kehormatan kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai Ebek (bapak) Aremania. Dengan gelar itu, Aremania berharap, Ketua MPR dapat mempersatukan Aremania yang ada di berbagai tempat, termasuk di luar negeri. "Aremania ada di seluruh jagad raya, mereka perlu dipersatukan agar dapat membantu sepakbola

Arema dan Indonesia", ujar Fery Pay.

Pemberian gelar Ebek oleh Aremania itu diterima secara antusias oleh Zulhasan. Apalagi, selama ini Zulhasan selalu mengikuti perkembangan sepakbola, termasuk Arema. Dengan pemberian gelar tersebut, Zulhasan menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah bagi seluruh Aremania di Jakarta.

"Dulu, sepakbola kita sangat maju, tetapi lambat laun prestasi itu menurun. Kita bisa dikalahkan oleh Thailand, Vietnam, Singapura, dan hanya bisa mengalahkan Timor Leste, serta Brunei Darussalam. Kita harus berusaha agar prestasi sepakbola Indonesia bangkit kembali, dan itu bisa dimulai dari Arema", tutur Zulhasan.

Usai menerima gelar Ebek Arema, Zulkifli Hasan menyampaikan sosialisasi di hadapan masyarakat Malang. Acara tersebut berlangsung di Gedung Kartini Imperial Ballroom, Malang, Jawa Timur, Senin (5/2).

Zulhasan menegaskan, kekhawatirannya terhadap nasib petani dan pertanian Indonesia. Di hadapan masyarakat Malang, Zulkifli Hasan kembali memprotes kebijakan impor yang dilakukan pemerintah. Impor beras yang saat ini dilaksanakan pemerintah, kata Zulhasan, bisa berdampak buruk bagi petani, karena saat ini para petani tengah panen padi. Dikhawatirkan, impor beras akan membuat harga gabah petani turun, dan membuat petani merugi.

"Kalau impor beras itu masuk Kota Malang, maka petani padi Malang pasti akan merugi, karena harga gabah akan turun, sehingga pendapatan petani berkurang", ujar Zulkifli Hasan. Dan, kalau impor pangan terus dilakukan maka kesejahteraan yang dicita-citakan tidak akan tercapai. Karena untuk mencapai kesejahteraan, bangsa Indonesia harus berdaulat terlebih dahulu, termasuk berdaulat dalam hal pangan.

"Bung Karno pernah berkata, agar bisa sejahtera kita harus berlaku adil, agar bisa berlaku adil kita harus berdaulat, agar bisa berdaulat kita harus bersatu, dan agar bisa bersatu kita harus merdeka", katanya. □

MBO



Makassar, Sulawesi Selatan

Empat Pilar Digaungkan di Tengah Para Pendekar Tapak Suci



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SAAT memberi Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada para anggota pencak silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Makassar, Sulawesi Selatan, 22 Februari 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan, ada yang ingin memecah belah, mengadu domba, serta ingin bangsa Indonesia pecah. Menghadapi hal demikian, Zulkifli Hasan mendorong agar Tapak Suci melawan gerakan-gerakan seperti itu. "Saya mengajak Tapak Suci untuk melawan gerakan memecah belah bangsa," ujarnya. "Tapak Suci tak boleh hanya menjadi penonton, namun harus ikut menjadi pelopor persatuan," tegasnya.

Zulkifli Hasan menaruh harapan pada organisasi otonom Muhammadiyah tersebut, sebab dalam soal implementasi Empat Pilar, Muhammadiyah sudah *khatam*. "Pendahulu Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Kahar Muzakhar, ikut melahirkan Pancasila," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan memberi contoh bahwa Muhammadiyah sudah melaksanakan Empat Pilar. Dia menyebut, perguruan tinggi Muhammadiyah

di Sorong, Papua Barat, 85% mahasiswa adalah non-Muslim. Demikian pula yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. "Jadi pendidikan Muhammadiyah untuk semua," paparnya. Tak hanya itu, rumah sakit milik Muhammadiyah juga tak pernah menolak siapapun. "Dalam soal kebhinekaan Muhammadiyah tak perlu diajari, tapi malah memberi contoh," ucapnya.

Contoh amalan Muhammadiyah tak hanya itu. Dalam soal memilih pemimpin, menurut Zulkifli Hasan, organisasi ini telah melaksanakan Sila IV Pancasila. "Kita memilih perwakilan, setelah ada perwakilan baru memusyawarahkan siapa pemimpinnya," ujarnya. Dari sinilah maka Muhammadiyah tak pernah gaduh atau pecah saat dan selepas muktamar. Menurut Zulkifli Hasan, dari sinilah maka ormas atau partai politik lain bisa belajar kepada Muhammadiyah. "Kalau semua meniru Muhammadiyah maka Indonesia berjaya," tambahnya.

Sebagai pihak tuan rumah, Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ambo Asse, mengatakan, muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi. Acara itu diharapkan selain untuk menetapkan kebijak-

an Tapak Suci juga sebagai ajang silaturahmi para anggota yang datang dari seluruh Indonesia. Menurut Ambo, banyak anggota perguruan silat ini yang belum pernah ke Makassar. Untuk itu, dia mengucapkan selamat datang di Makassar. "Selamat datang di Kota Anging Mamiri," ujarnya. "Kota yang indah, penuh dengan wisata kuliner," tambahnya.

Pria yang juga sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar itu menyebut, Tapak Suci merupakan organisasi otonom yang seharusnya menjadi benteng Muhammadiyah.

Ketua Tapak Suci M. Afnan Zamhari dalam sambutannya menyebutkan, muktamar memiliki arti penting dan strategis untuk mengevaluasi organisasi 5 tahun yang sudah dan mempersiapkan 5 tahun ke depan. Sebagai organisasi yang lahir pada 31 Juli 1963, Tapak Suci hadir untuk ikut melestarikan nilai-nilai luhur pencak silat. Tapak Suci sudah hadir di 34 provinsi, 264 kabupaten/kota, dan 11 cabang di luar negeri. "Tapak suci merupakan salah satu metoda dakwah Muhammadiyah," ujarnya. □

AWG

Ponpes Ummul Quro Bogor

Ketua MPR Zulkifli Hasan: Pendidikan Faktor Utama Kemajuan Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DALAM kunjungan kerjanya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/3/2018), Ketua MPR Zulkifli Hasan berkunjung dan memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada sekitar 4 ribu lebih santri, dan santriwati, serta para pengajar Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al Islami, Banyusuci Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Di acara tersebut, Zulkifli Hasan sangat mengapresiasi pengetahuan santri terhadap Pancasila. "Melihat ini saya menjadi makin yakin bahwa Indonesia ke depan akan semakin lebih baik, sebab generasi penerusnya memahami Pancasila," katanya.

Kepada para santri dan santriwati, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pendidikan, termasuk di pesantren, adalah salah satu elemen penting bagi kemajuan suatu bangsa. Sebab, melalui pendidikanlah bangsa ini kita akan menguasai pengetahuan yang akan membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

"Kalian mesti bersyukur bisa menempuh pendidikan di salah satu ponpes berkualitas di Indonesia. Caranya, belajar dengan sungguh-sungguh dan maksimalkan potensi kalian. Dengan upaya keras dan sungguh-

sungguh ditambah ibadah dengan kesungguhan hati maka kalian bisa menjadi apapun di negeri ini, bahkan bisa jadi Panglima atau Presiden. Satu lagi taati ibumu, sayangi ibumu, dan hormati ibumu jika mau sukses," ujarnya.

Zulkifli Hasan juga berpesan agar para santri mewaspadai fenomena negatif sekarang ini, yakni adanya upaya-upaya masif pihak-pihak yang ingin mengadu domba rakyat Indonesia. Saat ini, menurut Zulkifli Hasan, memang ada upaya agar Indonesia bisa terpecah belah, diadu agar terus berkonflik. "Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengatakan tidak kepada upaya-upaya seperti itu. Dan, saya mengajak para santri untuk menjadi pelopor menjahit kembali Merah Putih dan menjadi pelopor menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tandasnya.

Selain mesti mewaspadai upaya pemecah-belah bangsa, generasi muda di lingkungan pesantren juga harus mewaspadai bahaya narkoba yang sangat luar biasa. Saat ini, Indonesia masuk darurat narkoba, sebab beberapa waktu lalu aparat penegak hukum berhasil meng-gagalkan dan menyita upaya memasukkan berton-ton narkoba ke

wilayah Indonesia. Bayangkan jika berton-ton narkoba itu menyebar.

"Saya terang-terang bereaksi keras terhadap masuknya narkoba tersebut. Indonesia masuk darurat narkoba maka bandar narkoba harus ditindak tegas dengan ditembak mati saja. Ini sudah darurat, jangan ada toleransi lagi. Kalau perlu tembak, tembak, tembak itu semua bandarnya. Ini mengancam ketahanan nasional kita," tegasnya.

Zulkifli Hasan juga meminta agar pemerintah perlu mengingatkan negara yang oknumnya selundupkan narkoba ke Indonesia untuk memperketat pengawasan. "Perlu protes dan tindakan diplomatik yang tegas untuk negara yang oknumnya selundupkan narkoba jenis sabu sampai 100 ton lebih itu. Kalau tidak jera juga, perlu juga putus hubungan diplomatiknya," imbuhnya.

"Kita harus keras, karena narkoba mengancam sampai ke depan rumah kita, bahayanya mengancam keluarga. Penyebarannya juga sampai ke desa. Singkatnya, ini merusak ketahanan nasional kita. Tugas Kepala BNN baru dan kita semua seluruh rakyat Indonesia untuk hadapi serius darurat narkoba ini," tandasnya. □

DER

Hidayat Nur Wahid

Indonesia Ada, Juga Berkat Perjuangan Para Ulama

PONDOK Pesantren Baitul Hidayah, Desa Cikadut, Kecamatan Cimennyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, genap berusia Sewindu. Acara Milad Pondok Pesantren tersebut diselenggarakan pada 13 Maret 2018, dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Kehadiran Hidayat Nur Wahid di sana juga dalam rangka menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan ratusan santri pondok pesantren yang didirikan oleh Martono dan Upi — panggilan Agnes Diah Sri Suntari, seorang muallaf — pada 1999.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid memaparkan, sikap mencintai Indonesia perlu ditanamkan pada generasi muda. MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR adalah dalam rangka menanam sikap cinta Tana Air tersebut. Dengan sosialisasi, Hidayat Nur Wahid berharap, generasi muda paham mengenai Empat Pilar MPR, yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Ketetapan MPR RI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Ibarat pepatah mengatakan, 'Tak kenal maka tak sayang.' Nah, supaya sayang maka perlu kenal. Sosialisasi yang diselenggarakan ini, menurut Hidayat Nur Wahid, mengandung maksud agar generasi muda kenal atau paham tentang Empat Pilar MPR. Kalau sudah kenal dan paham akan Empat Pilar maka dapat menumbuhkan rasa cinta Tanah Air.

"Jadi, penting bagi santri untuk memahami Empat Pilar MPR," ungkap Hidayat Nur Wahid. Apalagi di era globalisasi ini, di mana bangsa Indonesia berada dalam ancaman mudarnya nilai-nilai moral warga bangsa dengan maraknya peredaran narkoba, pornografi, berita hoax, dan lain sebagainya, maka mengenal dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa dirasa menjadi wajib.

"Nilai-nilai luhur Ini harus kita pahami agar Indonesia tidak terkena berbagai dampak dari kondisi darurat tersebut," tegas Hidayat Nur Wahid. Oleh karena itu, Hidayat Nur Wahid berharap agar seluruh komponen masyarakat saling mengingatkan dan bisa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bekerjasama untuk kebaikan sehingga tidak terkena masalah tersebut.

Pondok Pesantren Baitul Hidayah didirikan di atas tanah wakaf seluas 1,5 hektar, berada pada ketinggian 950 meter di atas permukaan laut. Persisnya berdiri di daerah Bukit Panyandaan, Mandala Mekar, Desa Cikadut, Kecamatan Cimennyan, Kabupaten Bandung. Di sinilah para santri yang berjumlah 200 orang mengikuti berbagai program studi, seperti pendidikan Bahasa Arab, bahasa Inggris, agama dan pendidikan umum.

Pondok pesantren ini memiliki keunggulan *Ihya Alquran*, termasuk di dalamnya Tahfidz Alquran, dengan pola pengasuhan 24 jam. Pola pengasuhan di Baitul Hidayah ini berkiblat

pada Pondok Modern Darussalam Gontor), ditambah dengan cita-cita model eko-pesantren dan ramah lingkungan. Selain pelajaran akademik, santri juga mengikuti program life skill, seperti keterampilan ilmu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, teknologi ramah lingkungan dan ilmu kewirausahaan.

HNW berpesan agar Pondok Pesantren Baitul Hidayah melanjutkan perjuangan dan sejarah yang telah dituliskan oleh para kiai atau ulama terdahulu. Pesantren dan ulama, jelas Hidayat Nur Wahid, mempunyai peran nyata dalam kehidupan bangsa. "Indonesia ada karena perjuangan ulama dan umat Islam," katanya. □

EFP



Kalimantan Barat

Oso: Kerukunan di Kayong Utara Bisa Jadi Contoh Daerah Lain



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Oesman Sapta menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di kampung halamannya, di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Rabu (14/3/2018). Sosialisasi dihadiri 1.000 lebih peserta yang memadati Aula Kantor Bupati Kayong Utara.

Usai sosialisasi, Oesman Sapta menyebutkan Kayong Utara terdiri dari beragam suku, namun bisa hidup berdampingan dan rukun. Oso, sapaan akrab Oesman Sapta, bangga dengan kerukunan di Kayong Utara. "(Kerukunan) itulah yang membuat saya bangga. Dan, ini harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia," katanya.

Menurut Oso, jika ada pihak-pihak yang mengganggu kerukunan di Kayong Utara maka pihak-pihak itu sudah membuat desain untuk membuat huru-hara di Kayong Utara.

"Tapi hati nurani masyarakat Kayong Utara menolak. Mereka saling membantu. Itulah yang membuat saya rindu bertemu dan bersilaturahmi dengan mereka. Ini yang membuat saya bangga dengan Kayong Utara," kata Oso.

Oso menambahkan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR sangat penting. "Baik dilihat dari perspektif nasional, maupun keberagaman dan kepentingan umat. Karena itu Empat Pilar MPR harus terus disosialisasikan," ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR, lanjut Oso, adalah agar kita semua secara konsisten menjaga keseimbangan di antara kehidupan masyarakat. "Nilai-nilai yang ditanamkan adalah nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Sukadana

diikuti para kepala desa, kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dihadiri Bupati Kayong Utara Hildi Hamid serta menampilkan dua narasumber, yaitu Gde Pasek Suardika dan Dr. Delis (anggota MPR dari kelompok DPD).

Dalam sosialisasi, Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid, mengatakan, Empat Pilar MPR sangat penting untuk dipahami secara benar oleh kepala sekolah dan pendidik yang menjadi ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai kepada generasi penerus di sekolah. "Sehingga dapat menanamkan nilai Empat Pilar sejak dini. Yaitu, wawasan kebangsaan dan cinta bangsa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Secara khusus, lanjut Hildi Hamid, kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR ini menjadi pembangkit semangat untuk semakin

memahami Empat Pilar sebagai acuan memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta kerukunan di Kayong Utara. “Hidup rukun di Kayong. Meskipun berbeda suku dan agama tapi seperti pelangi,” katanya.

Berbicara tentang Empat Pilar, narasumber dr. Delis mengatakan, teladan pendiri bangsa pada masa lalu memberi pelajaran tentang bagaimana mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Contohnya, pada Sumpah Pemuda bukan bahasa Jawa yang mayoritas menjadi bahasa nasional, melainkan bahasa (melayu) Indonesia. Contoh lain, hilangnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan dan kesatuan bangsa.

lebih hebat. Contohnya, bangsa kita sudah bisa membuat kapal Phinisi yang berlayar hingga Madagaskar,” katanya.

“Anak-anak tidak diberikan informasi yang tepat tentang Indonesia. Pelajaran sejarah tidak lagi menjadi inti kurikulum. Padahal dari pelajaran sejarah muncul kebanggaan tentang Indonesia,” tutupnya.

Orang Bali Sangat Toleran

Usai menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Sukadana, Kayong Utara, Kalimantan Barat, Rabu (14/3/2018), Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengunjungi desa Sedahan Jaya, desa yang penduduknya berasal dari Bali.

Kedatangan Oesman Sapta disambut

dengar dari kepala desa. Warga Bali di desa ini memiliki toleransi yang luar biasa. Mereka tidak pernah menimbulkan keributan,” kata Oso.

Toleransi juga ditunjukkan masyarakat Sukadana. Tidak ada persoalan agama. Baik agama Hindhu maupun Islam yang mayoritas bisa hidup berdampingan dan rukun di Sukadana. “Mereka bisa menyatu padu dan hidup damai serta mengerjakan sesuatu secara bersama-sama,” ujar Oso.

Oso menegaskan, siapa saja yang mengganggu kerukunan di Sukadana akan berhadapan dengannya. “Awat, siapa saja yang mengganggu mereka (warga Bali) akan berhadapan dengan saya. Tidak boleh ada SARA di desa ini,” tandas Oso.



“Semangat itulah yang sekarang mulai hilang. Banyak yang mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan serta mengabaikan kepentingan yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tenggang rasa, saling menghormati juga mulai hilang. “Tidak perlu melakukan perang fisik untuk menghancurkan negara. Tapi hancurkan nilai-nilai luhur bangsa itu. Karena itulah jaga nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tenggang rasa, saling menghormati. Maka NKRI tetap berjaya,” ujar senator dari Sulawesi Selatan ini.

Sementara itu narasumber Gede Pasek Suardika mempersoalkan mental bangsa Indonesia. “Kita merasa inferior, rendah diri, merasa bangsa lain lebih besar. Padahal kita

dengan tarian Bali. “Saya tahu ada desa Bali di Sukadana. Makanya saya ajak Gede Pasek Suardika yang orang Bali,” kata Oso, sapaan akrab Oesman Sapta, di depan warga Bali Desa Sedahan Jaya.

Menurut Oso, orang Bali datang ke Sukadana tahun 1960-an, tepatnya ketika Gunung Agung di Bali meletus pada 1963. Para pendatang dari Bali ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat.

“Sama persis seperti kalau ke Bali kita menyesuaikan dengan adat istiadat setempat. Begitu juga dengan orang Bali melakukan penyesuaian di Sukadana, tepatnya di Desa Sedahan Jaya,” jelas Oso.

Oso bangga dengan toleransi yang ditunjukkan warga Bali di Sukadana. “Saya

Di Desa Sedahan Jaya tercatat sebanyak 126 kepala keluarga dengan jumlah 476 jiwa. Mereka adalah generasi kedua.

Sementara itu Gede Pasek melihat warga Bali di Desa Sedahan Jaya ini sudah betah tinggal di Sukadana. “Saya melihat mereka menikmati hidup di sini,” ujarnya.

“Tadi saya tanya apakah pernah pulang ke Bali atau tidak. Mereka pernah pulang tapi tetap ingin balik ke Sukadana. Ini menandakan mereka betah di sini,” sambungnya.

Anggota MPR dari Bali ini berharap warga Bali bisa terus berkembang bersama masyarakat setempat. “Bisa menjaga kerekatan persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan dengan masyarakat setempat,” ujarnya. □

BSC

Seminar Gerakan Ekonomi Umat

Islam dan Toleransi Indonesia Jadi Contoh untuk Dunia



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BAGI Zulkifli Hasan, Indonesia adalah negeri yang toleran, saling menghargai perbedaan. Karena itu ia menolak tegas siapapun yang menyebut masyarakat Indonesia sebagai radikal dan intoleran. “Di Indonesia hari libur semua agama jadi hari libur untuk semua. Harmoni ini terbangun bukan baru-baru ini saja, tapi sudah dari dulu, sejak Indonesia merdeka,” ujar Zulkifli Hasan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan hal itu saat membuka Seminar Nasional Gerakan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid dan Pesantren kerjasama MPR dan Badan Koordinasi Muballigh dan Ulama Indonesia (Bakomubin). Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR,

DPR dan DPD, Kamis (15/3).

Ikut hadir pada acara tersebut, antara lain: Ketua Dewan Syuro Bakomubin Dr. Anwar Sanusi, Ketua Dewan Muhtasyar H. Rhoma Irama, Ketua DPP Bakomubin Prof. Dr. Dedi Ismatullah, Sekjen Bakomubin Abdurrahman Tarjo, Wakil Duta Besar Belanda dan Turki, juga perwakilan dari Bank Indonesia.

Diam-diam, menurut Zulkifli Hasan, negara-negara lain turut mengamati Indonesia. Mereka kagum melihat bagaimana negara dengan mayoritas muslim bisa berdemokrasi. Karena itu kepada Mubaligh dan alim ulama yang hadir, Zulkifli Hasan mengajak untuk membangun kemandirian umat.

“Sekarang waktunya bagi Umat Islam

maju dengan ekonomi yang kokoh. Menjadi wirausaha itu mulia, itu yang dilakukan Rasulullah dan Islam hadir ke Indonesia dibawa saudagar,” ujar Ketua MPR lagi.

Selain itu, Ketua MPR juga mengingatkan, ada sekelompok orang yang berusaha mencitrakan bahwa Islam adalah agama yang buruk, pro terorisme, dikaitkan dengan bom bunuh diri dan segala bentuk kekerasan lainnya. Islam juga dicitrakan sebagai agama yang bisa dipecah belah dan diadu domba, sehingga muncul Islamphobia.

Pada hal itu, isu seperti itu tidaklah benar. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin (pembawa kesejahteraan bagi semesta alam). Umat Islam Indonesia adalah masyarakat yang sangat toleran. Bahkan, toleransi umat Islam di Indonesia tidak bisa ditemukan di negara lain. Kebenaran dan kewarasan itu, menurut Zulkifli, harus disampaikan kepada semua orang.

“Isu semacam ini sengaja disebar di tahun politik. Karena itu, kita harus berani melawannya. Sampaikan kepada semua orang bahwa tuduhan seperti itu tidak benar,” kata putera Lampung yang biasa disapa Zulhasan.

Di tahun politik, menurut Zulhasan, yang terpenting adalah pemilu menghasilkan pemimpin yang legitimate, dan anggota legislatif yang amanah. Umat Islam tak boleh tabu membicarakan dan terjun ke ranah politik. Karena politik bisa menentukan berbagai sisi kehidupan. Untuk itu, umat Islam harus berkontribusi menjadikan pemilu berkualitas, dan para wakil yang berkualitas pula.

Ketua Umum Bakomubin, Ustadz Deddy Ismatullah, menyebut, Zulkifli Hasan sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan kebaikan umat dan bangsa “Beliau berani suarakan untuk menolak perilaku LGBT. Bang Zul juga konsisten tolak peredaran minuman keras. Seluruh pengurus Bakomubin mendoakan beliau jadi pemimpin nasional di 2019,” tutupnya. □

MBO

Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan Tak Terpisahkan

Para ulama, baik dari NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, maupun partai-partai Islam lainnya berperan dalam ke-Indonesiaan.

WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memanfaatkan hari liburannya, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR bersamaan dengan pelantikan 543 pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dari 65 kelurahan se-Jakarta Selatan, di Aula Rumah Jabatan Anggota DPR, Kalibata, Jakarta, Minggu (18/3/2018). Dalam sosialisasi itu, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa ke-Islaman, ke-umatan, tidak terpisahkan dengan ke-Indonesiaan.

“Ke-Islaman dan ke-umatan dengan ke-

Mendengar azan, masyarakat keluar dari rumah masing-masing, kemudian masyarakat berbondong-bondong ke jalan dan menggagalkan kudeta. “Masjid bisa menjadi hal yang efektif untuk menyelamatkan negara dari kemungkinan terjadinya kudeta,” katanya.

Dalam konteks Indonesia dan hubungannya dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR, lanjut Hidayat, sesungguhnya ke-Islaman, keumatan, Ormas Islam, partai politik Islam, dengan ke-Indonesiaan adalah ibarat dua

Hasyim Asyhari mengumpulkan ulama di Jawa Timur dan Madura, untuk menyikapi penjajah Belanda yang mendompleng sekutu.

“Kalau saja para ulama acuh terhadap Indonesia, kalau saja para ulama tidak mempunyai peran dalam menyelamatkan Indonesia, KH Hasyim Asyhari tidak mungkin mengumpulkan ulama untuk menyampaikan fatwa jihad pada 20 Oktober yang sekarang menjadi Hari Santri,” katanya.

Hidayat menjelaskan fatwa Jihad itu ada



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Indonesiaan adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, saya ingin katakan bahwa kemasjidan, keulamaan, dengan ke-Indonesiaan merupakan satu hal yang melekat,” kata Hidayat.

Hidayat memaparkan peran masjid dan negara atau masjid dengan Indonesia. Dia memberi contoh atau menganalogkan dengan apa yang terjadi di Turki. Beberapa waktu lalu di Turki terjadi kudeta terhadap pemerintahan Erdogan. Para pelaku kudeta sudah menguasai TV, media, pesawat F-16, dan lainnya. Bagaimana Erdogan bisa selamat dari kudeta itu dan kudeta itu bisa gagal, salah satu di antaranya adalah karena peran masjid.

Pada waktu itu Erdogan memerintahkan agar masjid-masjid mengumandangkan azan di tengah malam, sekitar jam dua pagi.

sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

“Belakangan ada yang mencoba memisahkan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Pastilah mereka tidak mengakui apa yang Bung Karno katakan sebagai Jasmerah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi saya tambahkan, juga jashijau, jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama dan jasa umat. Karena melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini kita akan tahu persis bahwa para ulama kita, baik dari NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, termasuk dari partai-partai Islam (Partai Sarikat Islam, Partai Islam Indonesia), berperan dalam ke-Indonesiaan,” jelasnya.

Hidayat memberi contoh KH Hasyim Asyhari dalam melahirkan Resolusi Jihad. Fatwa jihad ini melahirkan lasykar Fisabilillah, Lasykar Hisbullah, Lasykar Mujahidin. KH

tiga poin. Pertama, mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda hukumnya adalah fardhu ain bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya, sedangkan bagi masyarakat di luar itu hukumnya adalah fardhu kifayah.

Kedua, siapa pun yang meninggal atau wafat karena melaksanakan fatwa ini membela Indonesia dari kemungkinan dijajah Belanda, hukumnya adalah sebagai syuhada, mati syahid. Ketiga, siapa pun yang berkhianat dan membantu penjajah asing maka dia boleh dihukum mati.

“Jadi saya ingin katakan bahwa kemasjidan, keulamaan, dengan ke-Indonesiaan merupakan satu hal yang melekat,” ujarnya. □

BSC

Medan, Sumatera Utara

Jika Masyarakat Berkualitas Akan Lahir Pemimpin Yang Baik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., berada di tengah-tengah pengurus daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi Sumatera Utara, Minggu 11 Maret 2018. Kehadiran Hidayat Nur Wahid di tengah sekitar 400 anggota KAMMI se Sumatera Utara yang berkumpul di Lantai II Aula Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, itu dalam rangka menyampaikan materi Empat Pilar MPR RI.

Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai pemateri didampingi oleh anggota MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) Ansory Siregar SE., MM., Pembina KAMMI Medan H. Musa Rajeckshah, Ketua PD KAMMI Sumatera Utara Mangaraja Harahap, M.Si. Dan, Arri Aliansyah Siregar, S.HI., Ketua KAMMI Medan.

Hidayat Nur Wahid dalam kesempatan itu menegaskan bahwa UUD Tahun 1945 telah mengalami perubahan sekali dalam empat tahap. Dari perubahan tersebut, jelas Hidayat Nur Wahid, maka di dalam UUD NRI Tahun 1945 sekarang ada 21 Bab, 77 Pasal, dan 170 Ayat. Sedangkan sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.

Dari perubahan UUD yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002 itu maka terjadi perubahan yang sangat mendasar. "Sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat," ujarnya. Dengan adanya pemilihan Presiden langsung, menurut HNW, UUD memberi kekuasaan tertinggi pada rakyat. "UUD memberi kekuasaan yang luar biasa pada rakyat," ujarnya. Oleh karena itu, kata HNW, masyarakat hendaknya cerdas dalam

menggunakan haknya. "Bila masyarakat berkualitas maka akan menghasilkan pemimpin yang baik," ujarnya.

Lebih lanjut HNW memaparkan, ketika Pancasila 22 Juni 1945 disepakati, ada pihak yang merasa keberatan dengan Sila I yang berbunyi, 'Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya.' Namun, utusan dari Indonesia Bagian Timur menyatakan keberatan dengan isi Sila I tersebut. Lalu, dengan berbesar hati tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam Panitia 9 yang berasal dari Muhammadiyah, MU, Syarekat Islam, dan kelompok Islam lainnya tak keberatan menghapuskan tujuh kata dalam Sila I itu, sehingga kemudian berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Meski tujuh kata itu dihilangkan, Sila I Pancasila itu masih menjelaskan ketauhidan agama Islam," papar HNW. Tapi, menurut HNW, tokoh Islam yang ada di Panitia 9 membuktikan, mereka mendahulukan kepentingan bangsa dari kepentingan kelompok atau golongan," ungkap HNW. Coba bayangkan, kata HNW, kalau waktu itu keberatan dari wakil Indonesia Timur itu ditolak oleh tokoh-tokoh Islam, apa yang terjadi. "Jadi, di sini menunjukkan ulama kita sangat toleran," katanya.

Dalam kesempatan itu, HNW juga menceritakan peran tokoh Islam, politisi Partai Masyumi Muhammad Natsir, dalam mengembalikan bentuk negara Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak 1946, di bawah tekanan Belanda, Indonesia tidak lagi NKRI namun berubah menjadi RIS. Muhammad Natsir pada 1950 tampil dengan Mosi Integral-nya yang menyatakan, RIS tidak sesuai dengan cita-cita 17 Agustus 1945. Ternyata, Mosi Integral M. Natsir ini mendapat dukungan dari Soekarno, Hatta, dan semua politisi, yang kemudian mengembalikan bentuk negara menjadi NKRI. "Dari sinilah tokoh Masyumi, partai Islam, berhasil menyelamatkan Indonesia," tegasnya.

Berdasarkan kenyataan itu, HNW ingin menyatakan bahwa antara Islam dan Indonesia tidak bertentangan. Tak betul Islam anti Pancasila karena buktinya, menurut HNW, para Ulama atau tokoh Islam pendahulu kita justru menyelamatkan NKRI. □

JAZ



Sulawesi Selatan

Zulhasan Pimpin Roadshow Gerakan “Kami Indonesia” ke Makassar

Gerakan “Kami Indonesia” sebagai inisiatif untuk merekat keberagaman di tengah banyak pihak yang ingin mengoyak Merah Putih.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SETELAH Bandung menjadi lokasi deklarasi gerakan “Kami Indonesia”, pada Sabtu (10/3/2018) Ketua MPR Zulkifli Hasan melanjutkan *roadshow* “Kami Indonesia” ke Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kampus Universitas Hasanuddin

Hadir bersama Ketua MPR dalam deklarasi “Kami Indonesia” tersebut adalah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, Anggota DPD Asri Anas, dan Anggota DPR 2009-2014 Dedi Gumilar alias Mi’ing

Ketua MPR yang akrab disapa Zulhasan ini menyebut, gerakan “Kami Indonesia” sebagai inisiatif untuk merekat keberagaman di tengah banyak pihak yang ingin mengoyak Merah Putih. “Apapun suku, agama, etnis, dan latar belakangmu Merah Putih kita sama. Inilah inti gerakan Kami Indonesia untuk menjahit kembali Merah Putih,” tegasnya.

Ia mengajak mahasiswa dan anak muda untuk melawan segala bentuk upaya adu domba, termasuk di antaranya dengan melawan gerakan penyebar *hoax*. “Kami In-

donesia mengajak anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam gerakan perbaikan ini. Pilihan boleh beda, tapi Merah Putih kita tetap sama,” katanya.

Anggota DPD dan aktivis gerakan “Kami Indonesia” Asri Anas menyebut, dukungan Ketua MPR Zulkifli Hasan sebagai motivasi bagi mahasiswa. “Untuk anak-anak muda ayo bersiaplah gabung di gerakan Kami Indonesia. *Roadshow* ini akan dilaksanakan terus ke seluruh Indonesia,” ujarnya.

Motivasi Mahasiswa

Dalam kesempatan bertemu mahasiswa di Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar, Zulkifli memotivasi mahasiswa. Di hadapan ribuan mahasiswa, Zulhasan mengajak mereka bersyukur karena bisa kuliah di kampus terbaik di Sulawesi Selatan. “Berapa banyak teman-teman kita yang tidak bisa kuliah karena alasan biaya. Atau teman-teman kita yang putus kuliah karena tak sanggup lagi bayar semester,” ujarnya.

Ia ceritakan masa-masa sulit untuk kuliah

selama 11 tahun sambil berdagang. “Saya anak rantau dari Lampung datang ke Jakarta tak punya saudara, bawa bekal seadanya. Modalnya pesan ibu, jangan menyerah,” tuturnya.

Untuk menyambung hidup, Zulhasan berdagang *warehouse* alat-alat kebutuhan rumah tangga dari satu rumah ke rumah lain. Akhirnya, nasib pertemukannya dipercaya pemodal. “Percaya nggak percaya di usia 20 tahun saya sudah bisa beli mobil dengan penghasilan bulanan Rp 500 juta, kalau sekarang. Itu tahun 1985 lho,” ungkapnya.

Satu hal yang diyakini Zulhasan sejak merantau ke Jakarta sampai sukses dalam bisnis adalah prinsip: “Dimana ada kemauan disitu ada jalan. Setiap perjuangan pasti buahnya keberhasilan. Hukum Tuhan itu bekerja bagi hambanya yang berusaha dan berdoa.”

“Kalau saya yang kuliah pas-pasan saja bisa jadi Anggota DPR, Menteri Kehutanan dan Ketua MPR maka yakinlah alumni Unhas dan UNM bisa lebih baik,” tutupnya. □

BSC

Kota Batu, Jawa Timur

Sebelum Menjalan Tugas, Anggota Badan Sosialisasi Mendapat Penyegaran

AHAD malam (11/3/2018) di The Singhasari Resort Kota Batu, Jawa Timur. Di sebuah ruang pertemuan di hotel ini, sejak malam itu, berlangsung kegiatan Penyegaran Pemahaman Materi Empat Pilar MPR. Peserta penyegaran ini adalah para pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi yang berjumlah 45 orang. Mereka ini, menurut istilah Ketua Badan Sosialisasi MPR Dr. Ahmad Basarah, adalah para sosialis atau anggota MPR yang telah mewakafkan dirinya untuk berjuang menyosialisasikan Empat Pilar MPR.

Di hadir para pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi, acara penyegaran ini dibuka secara resmi oleh Ketua Badan Sosialisasi MR Ahmad Basarah. Kegiatan penyegaran yang dilaksanakan di Kota “Wisata” Batu, Jawa Timur, ini sebagai realisasi dari keputusan Rapat Pleno Badan Sosialisasi yang dilaksanakan pada 6 Februari 2018. Ahmad Basarah menjelaskan, Rapat Pleno waktu itu memutuskan, diperlukan suatu forum yang bersifat refreshing (penyegaran) bagi anggota Badan Sosialisasi yang memang baru ditugaskan freksinya bergabung menjadi anggota Badan Sosialisasi.

Forum ini, menurut Ahmad Basarah, tujuannya untuk refreshing, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, atau penguatan dalam hal melaksanakan tugas-tugas sosialisasi, khususnya tugas yang dilaksanakan oleh 45 anggota Badan Sosialisasi MPR. Sedangkan narasumbernya, selain dari anggota Badan Sosialisasi, juga unsur senior anggota MPR yang dulu ikut menggagas program sosialisasi, atau anggota MPR yang terlibat langsung dalam perubahan UUD Tahun 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002.

Kegiatan penyegaran terbagi dalam lima sesi dengan narasumber sebagai berikut: Dr. Ahmad Basarah (Ketua Badan Sosialisasi), Prof. Dr. Haryono, MPd., (Deputi Advokasi UKP-PIP), Agun Gunandjar Sudarsa (Ketua Tim Kerja Sosialisasi Empat Pilar I), Dr. Ir. Bambang Sadono (anggota MPR kelompok DPD), Drs. Almuzzamil Yusuf (anggota Tim Kerja Sosialisasi), Drs. Zainut Tauhid Sa’adi (Wakil Ketua Badan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sosialisasi), Martin Hutabarat (anggota Tim Kerja Sosialisasi terdahulu), Hardisoesilo (anggota MPR Fraksi Golkar), dan Rambe Kamarul Zaman (mantan Ketua Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR).

Salain dari dalam, satu-satunya narasumber dari luar MPR, adalah Prof. Dr. Haryono, MPd., Deputi Advokasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang sejak 28 Februari 2018 telah berubah statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kalau sebelumnya (UKP-PIP) statusnya di bawah menteri atau setingkat eselon satu, setelah menjadi badan statusnya berubah menjadi setingkat menteri, atau di bawah presiden. Prof. Haryono, menurut informasi diterima Ahmad Basarah, akan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua BPIP, sedangkan ketuanya, Dr. Yudi Latif.

Ahmad Basarah menjelaskan, Prof. Haryono memang sengaja diundang sebagai narasumber pada acara penyegaran ini, dengan harapan dalam pemaparannya ia dapat memberikan gambaran menyangkut pola kerja antara UKP-PIP dan Badan Sosialisasi MPR. Karena kedua lembaga ini nantinya akan eksis melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR, dan kedua badan ini sama-sama memiliki payung hukum.

Badan Sosialisasi payung hukumnya UU No. 17 tentang MD3, sedangkan UKP-PIP (BPIP) payung hukumnya Perpres.

“Jadi, UKP-PIP (BPIP) dan Badan Sosialisasi MPR sama-sama memiliki legal standing,” kata Basarah. Maka, dia berharap, bagaimana caranya supaya terjadi sinergitas antara MPR dan UKP-PIP (BPIP). Artinya, keduanya bekerjasama menjalankan tugas-tugas membangun mental ideologi bangsa sesuai dengan prinsip yang diwariskan oleh Bapak Pendiri Bangsa dan Ibu Pendiri Bangsa.

Dalam diskusi sesi pertama, Ahad malam (11/3/2018), Prof. Haryono mengakui bahwa MPR, dalam hal ini Badan Sosialisasi MPR, adalah perintis atau yang melakukan babat alas dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar. Mengenai pola kerjasama antara kedua lembaga ini perlu ada pembicaraan lebih lanjut antara pimpinan UKP-PIP (BPIP) dan pimpinan MPR. Hanya saja Basarah meminta agar pertemuan antarpimpinan kedua lembaga tersebut juga melibatkan Badan Sosialisasi MPR.

Peserta tampak antusias

Setelah berlangsung dua hari penuh, Senin (12/3/2018), pukul 23.00 WIB, kegiatan penyegaran pemahaman materi Empat Pilar

MPR di The Singhasari Resort Kota Batu, Jawa Timur, berakhir. Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Ir. Alimin Abdullah didampingi Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Msi., yang juga Wakil Ketua Badan Sosialisasi, menutup kegiatan yang diselenggarakan Badan Sosialisasi MPR tersebut.

Kegiatan yang bertujuan menimba pengalaman untuk bekal buat anggota Badan Sosialisasi melaksanakan tugas-tugas sosialisasi Empat Pilar MPR. Para peserta tampak sangat antusias mengikuti

penyegaran ini. "Kegiatan ini berhasil bagus dan perlu ditambah," kata Alimin yang termasuk baru bergabung dalam tim sosialisasi Badan Sosialisasi MPR.

Sejumlah peserta mengaku banyak hal baru yang diperoleh dari para narasumber, terutama bagaimana cara penyampaian materi yang baik dan menarik. Dan, teknik penyampaian seperti itu dapat mereka peroleh dari narasumber yang memang cukup berpengalaman dalam kegiatan sosialisasi. Bahkan di antara narasumber

ini ada yang ikut merumuskan materi sosialisasi dan pernah bergabung dalam tim kerja sosialisasi periode sebelumnya.

Alimin menyatakan, apa yang diperoleh selama mengikuti penyegaran ini akan menjadi bekal untuk melaksanakan tugas sosialisasi. Seperti kata ketua Badan Sosialisasi Ahmad Basarah ketika membuka acara ini, Sabtu (11/3), dengan penyegaran ini diharapkan terjadi penguatan dalam hal sosialisasi Empat Pilar MPR. □

SCH

Palembang, Sumatera Selatan

Zulhasan Bertemu Komunitas Medsos dan Literasi Jalanan

MENGAKHIRI kegiatan Safari Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Rabu (7/3), bertemu dengan komunitas penggiat media sosial dan aktivis Literasi Jalanan di Palembang. Pertemuan tersebut berlangsung di Kedai Tiga Nyonya, Palembang.

Pada kesempatan tersebut Zulkifli Hasan berharap, generasi muda milenial harus memperkuat identitas untuk bisa bersaing di dunia global. Menurut lelaki yang kerap disapa Zulhasan ini, untuk bisa memperkuat identitas, anak-anak muda harus memahami budaya dan nilai-nilai lokal. "Paham budaya lokal akan memperkuat identitas dan akan mampu bersaing," katanya.

Generasi milenial, menurut Zulhasan, harus paham lingkungan sosial sekitarnya. Politisi Partai Amanat Nasional ini kemudian mengajukan pertanyaan pada seorang audiens: Dari mana asalnya? "Apa kamu tahu berapa jumlah penduduk, jumlah orang miskin, dan pengangguran di daerahmu," tanya Zulhasan. Ketika ia menjawab tidak tahu, Zulhasan menyergah, seraya berucap: "Bagaimana bisa punya identitas yang kuat dan bisa memperjuangkan daerah," kata Zulhasan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pendidikan dan penguasaan teknologi informasi supaya bisa bersaing dengan bangsa lain. Karena itu, Zulhasan meminta agar generasi muda fokus pada pendidikan dan jangan lupa memahami teknologi informasi.

Pada kesempatan itu, Ketua MPR kembali



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengingatkan, Pilkada serentak 2018 harus berjalan aman dan lancar. Tidak boleh menimbulkan keributan, apalagi sampai memakan korban. Karena sesungguhnya Pilkada merupakan kontestasi sesama anak bangsa, antarsaudara. "Pilkada adalah adu ide dan gagasan di antara anak bangsa. Jadi, yang diutamakan adalah program", ungkap Zulkifli Hasan.

Karena itu, menurut Zulkifli, Pilkada tidak boleh menghalalkan segala macam cara, seperti mengadu domba, fitnah atau menjelekkan kelompok lain. Karena cara-cara seperti itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. "Setelah pilkada berlangsung kita harus hidup normal, rukun kembali seperti sedia kala, harus menerima apapun hasilnya", harap Zulhasan.

Dalam Pilkada, kata Zulkifli, beda pilihan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak

diperbolehkan adalah menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilihan. Apalagi sampai membawa SARA, menjelek-jelekkan, dan menfitnah. "Semua cara yang membuat kita terpecah tak boleh digunakan. Sekali lagi, pilkada itu persaingan gagasan dan ide jangan saling mencaci, kalau pilkada selesai maka kembali bersatu," katanya.

Karena itu, Zulkifli mengajak kita semua untuk kembali ke nilai-nilai Pancasila, dan jangan sampai meninggalkan Pancasila dan menerima nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Indonesia.

Di akhir pertemuan, Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan semangat kepada anak muda. "Siapkan diri hai anak muda, jangan lupa karena kalian adalah generasi masa depan, baik buruknya masa depan bangsa ini ditentukan pemuda," begitu ajakan Zulhasan. □

MBO

Seminar Nasional Hari Perempuan Internasional 2018

Evert Ernest Mangindaan: Kepada Rakyat Miskin Jangan Hanya Peduli, Tapi Juga Solusi

Jumlah rakyat miskin di Indonesia akan berkurang jika seluruh rakyat Indonesia terjun melakukan aksi memberi kesempatan berusaha kepada mereka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

JIKA diminta memilih, tidak ada yang mau memilih hidup dalam kemiskinan. Namun, kondisi kemiskinan yang dialami sebagian rakyat Indonesia adalah sesuatu yang ada dan fakta, terutama kaum perempuan dan penyebarannya hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi seperti ini perlu uluran tangan pemerintah dan rakyat Indonesia bagi mereka yang kurang beruntung. Jangan sampai lingkaran kemiskinan terus saja berputar tanpa ada upaya meminimalisirnya.

Wakil Ketua MPR RI Evert Ernest Mangindaan mengungkapkan masih banyak rakyat Indonesia, terutama kaum perempuan yang masih hidup miskin bahkan di bawah garis kemiskinan. Untuk itu perlu kepedulian seluruh elemen bangsa Indonesia terhadap masalah tersebut. Kepekaan masyarakat Indonesia adalah implementasi dari Pancasila, yakni toleransi, gotong royong, dan rasa saling peduli.

Hal itu diungkapkan Mangindaan, usai

menghadiri Opening Ceremony Seminar Nasional dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2018 dengan tema 'Mengurangi Kemiskinan Perempuan Menuju Ekonomi Yang Kuat dan Berkeadilan', di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Presiden RI ke -6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan istri, Pimpinan Fraksi Demokrat MPR dan DPR RI, serta beberapa ormas perempuan Indonesia dan ratusan mahasiswa se Jabodetabek.

Soal kemiskinan yang diangkat menjadi tema utama seminar sangat diapresiasi oleh Letnan Jenderal (Purn) TNI ini. "Itu menunjukkan kepedulian kepada perempuan Indonesia. Saya apresiasi dan setuju

dengan temanya, yakni kemiskinan. Kemiskinan memang harus dikurangi dan yang miskin harus diangkat. Kita harus bantu dengan memberikan solusi, tidak hanya peduli saja tapi beri solusi untuk mereka sehingga bisa bangkit," katanya.

Dalam seminar tersebut, lanjut Mangindaan, diharapkan muncul gagasan-gagasan dan masukan-masukan baru dari para narasumber yang tentunya menguasai bagaimana caranya mengurangi kemiskinan, terutama kaum perempuan.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam keynote speech-nya mengatakan, solusi menghadapi kemiskinan yang masih membayangi sebagian rakyat Indonesia adalah dengan kepedulian rakyat lainnya. "Bantulah mereka, carilah solusi untuk mereka. Beri mereka kail jangan melulu diberikan ikan sehingga mereka bisa bangkit dengan martabat," ucapnya. □

DER

Sesjen MPR RI Ma'rif Cahyono

“Generasi Muda Harus Memiliki Ketahanan Ideologi”

SEKRETARIS Jenderal (Sesjen) MPR RI Ma'rif Cahyono, SH., MH., menegaskan pentingnya warga bangsa memiliki ketahanan ideologi. Dengan ketahanan ideologi, menurut Ma'rif Cahyon, kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. “Dengan demikian kita bisa menggunakan media sosial untuk kepentingan lebih produktif, kepentingan yang mampu mengembangkan demokrasi dan nilai-nilai ideologi kita,” jelas Ma'rif Cahyono.

Oleh karena itu, lanjut Ma'rif, kita harus

generasi muda dalam gerakan reformasi yang terjadi pada 1998,” katanya.

Reformasi 1998, kata Ma'rif Cahyono lebih lanjut, adalah momentum kenegaraan, sejarah ketatanegaraan, yang sangat luar biasa. Saat ada lompatan sejarah dari masa Orde Baru ke Orde Reformasi, dan hal penting yang harus menjadi catatan kita semua. Karena keberhasilan reformasi saat itu juga karena peran sangat besar dari generasi muda.

Oleh karena itu peran generasi muda dalam

internal maupun eksternal itu,” kata Ma'rif Cahyono seraya menyebutkan salah satu jatidiri bangsa Indonesia adalah religius.

Seorang pemuda atau remaja, menurut Ma'rif Cahyono, harus memiliki jiwa religius, memiliki jiwa yang humanis, harus terus bersatu, memiliki nasionalisme. Semuanya itu dalam kerangka demokrasi. “Seorang pemuda harus memahami demokrasi, dan seorang pemuda harus bersama-sama membangun bangsa untuk menciptakan kesejahteraan sosial,” ujar Ma'rif Cahyono.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terus meneruskan memperjuangkan agar ideologi bangsa bisa dilaksanakan, karena ideologi bangsa itulah sesungguhnya cita-cita kita bersama. “Ideologi bangsa yang di dalamnya ada yang namanya jatidiri bangsa, karakter bangsa, identitas nasional kita,” ujar Ma'rif. “Kalau generasi muda tidak paham atau tidak tahu hal itu lalu siapa lagi yang akan memperjuangkan cita-cita bangsa,” katanya.

Sesjen MPR Ma'rif Cahyono menyatakan hal itu ketika memberi sosialisasi Empat Pilar MPR di depan sekitar 500 peserta Konferensi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se Jawa Timur di aula Hotel Surya Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu siang (3/3/2018). “Kita bisa duduk bersama di sini, seperti ini, karena peran

membangun demokrasi Indonesia, tentu, sangat besar. Karena generasi muda adalah penerus bangsa, penerus estafet perjuangan bangsa, dan tentunya juga mengisinya supaya sesuai dengan cita-cita bangsa.

Selanjutnya, Ma'rif Cahyono mengingatkan bahwa tantangan kita sekarang ini begitu besar, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk menghadapi tantangan yang besar itu, menurut Ma'rif Cahyono, generasi muda harus memiliki ketahanan ideologi. “Ideologi adalah jatidiri bangsa kita. Ideologi adalah karakter bangsa kita,” katanya.

“Jadi, kalau seorang pemuda Indonesia tidak memiliki ke-Indonesiaan yang namanya jatidiri, tentu, kita akan sulit untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan itu, baik

“Mengingat tantangan yang kita hadapi, internal dan eksternal, yang begitu kuat maka peran pemuda sangat diperlukan dalam pembangunan demokrasi,” ujar Ma'rif.

Reformasi yang digaungkan oleh pemuda, antara lain adalah membangun kehidupan bangsa yang demokratis. Kondisi saat ini, menurut Ma'rif, tentu banyak kelebihan yang telah kita capai, banyak indikator positif yang kita nikmati, tapi sebagai suatu proses, dinamika, yang harus disesuaikan terus dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. “Demokrasi kita sekarang tentu memerlukan perbaikan-perbaikan. Jadi, tidak ada suatu sistem yang sempurna dalam satu waktu, karena yang ada adalah perbaikan dan perubahan,” kata Ma'rif. □

SCH

Perlu Moratorium Pembangunan Infrastruktur Layang

Sigit Sosiantomo
Anggota MPR Fraksi PKS

Dalam beberapa bulan terjadi kecelakaan beruntun dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Kecelakaan mengakibatkan jatuh korban dari pihak pekerja dan masyarakat. Tentu hal ini sungguh memprihatinkan. Agar kejadian yang tidak diinginkan itu tak terulang maka perlu dilakukan evaluasi. Moratorium merupakan jeda waktu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Meski moratorium, cepat atau lambat, dicabut namun jeda waktu yang ada membuat semua pihak untuk mengevaluasi diri, baik dari tinjauan cara kerja, keselamatan pekerja dan pengguna, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Perlu Dipertanyakan Sertifikasinya

UNTUK memastikan terpenuhinya prosedur keamanan dan keselamatan pekerjaan konstruksi, Komisi V DPR menyambut baik keputusan pemerintah menghentikan sementara seluruh pekerjaan tol layang (*elevated*) di Indonesia. Komisi V juga meminta pemerintah mengevaluasi ulang sertifikasi seluruh BUMN Karya dan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tol layang.

Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh proyek tol layang di Indonesia, namun kami juga mendesak agar pemerintah tidak hanya mengevaluasi prosedur keamanan dan keselamatan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan undang-undang, tetapi juga mengevaluasi sertifikasi BUMN Karya untuk memastikan bahwa BUMN Karya kita memang memiliki kemampuan sebagai badan usaha konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya.

Insiden berulangnya kecelakaan kerja, khususnya proyek tol layang, mengindikasikan adanya permasalahan profesionalitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena itu,

perlu dilakukan evaluasi ulang atas sertifikasi yang sudah diberikan pemerintah kepada BUMN Karya yang terlibat dalam pengerjaan proyek tol layang.

Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi. Kalau proyek yang dikerjakan badan usaha ini sering bermasalah, berarti ada masalah dalam sertifikasinya. Jangan-jangan hanya formalitas. Karena itu, perlu dievaluasi ulang. Karena ini juga menyangkut kredibilitas kita di mata dunia. BUMN Karya kita kan banyak juga yang mengerjakan proyek di luar negeri.

Tak hanya sertifikasi badan usaha yang harus ditinjau ulang, sertifikasi kompetensi kerja juga harus dievaluasi. Termasuk mengevaluasi lisensi lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja.

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Kalau hasil kerjanya seperti sekarang, banyak kelalaian dan seluruh kecelakaan kerja yang terjadi sekarang karena faktor *human error* maka sertifikasinya patut kita pertanyakan. Termasuk lembaga profesi yang mengeluarkan sertifikasinya. Kalau *human error* selalu berulang, berarti ada yang salah. Tidak memenuhi kompetensi atau sertifikasinya abal-abal.

Untuk itu kami meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera membenahi masalah sertifikasi tersebut dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya pada badan usaha, tetapi juga sertifikasi kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh lembaga profesi. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

AWG

Arif Budimanta

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dan Anggota Lembaga Pengkajian MPR

Kehilangan Produktifitas Bila Ada Moratorium

PERLU diapresiasi langkah pemerintah melakukan moratorium pekerjaan konstruksi jalan layang. Langkah pemerintah ini menunjukkan pentingnya terhadap keselamatan kerja. Keselamatan kerja di sini, baik untuk pekerja yang terlibat dalam proyek itu sendiri maupun untuk masyarakat yang kelak akan memakai dan menggunakan infrastruktur itu. Untuk itu, keputusan pemerintah perlu diapresiasi, sebab keselamatan adalah faktor utama.

Meski demikian kita harus memerhatikan lebih lanjut terhadap langkah pemerintah tersebut, sebab hal itu pastinya akan memberi pengaruh dan dampak terhadap rencana dan target penyelesaian proyek yang telah ditentukan. Untuk itu, sebaiknya moratorium perlu mempertimbangkan secara komprehensif ketepatan waktu pelaksanaan proyek agar sesuai dengan target. Saya berpendapat perlunya dilihat apakah karena struktur dari bangunan itu sendiri, kesalahan saat proses konstruksi, atau karena tata kelola yang tidak tepat.

Saya menilai, langkah pemerintah melakukan moratorium akan berdampak dan berpengaruh kepada pembayaran pekerjaan sehingga kontraktor harus membayar bunga pembiayaan yang lebih besar kepada investor. Selain itu juga akan membuat terjadinya *loss of productivity* akibat berhentinya proyek, karena manfaat dari infrastruktur tidak bisa dirasakan segera oleh masyarakat untuk menciptakan efisiensi ekonomi. Saya beranggapan semua dampak dari pemberhentian ini akan berpengaruh pada perekonomian nasional.

Moratorium itu akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintah. Ada beberapa proyek yang akan dihentikan untuk sementara, seperti *mass rapid transport (MRT)*, *light rail transit (LRT)*, dan Jalan Tol Cikampek Elevated. Proyek itu merupakan proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek itu termuat dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 Tentang



Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ada 247 proyek, terdiri dari jalan, pelabuhan, bandar udara, bendungan, irigasi, kereta api, energi, pengolahan air, proyek smelter, perumahan, pos lintas batas negara, kelautan, tanggul laut, kelistirikan, dan industri pesawat. Kebijakan ini, menurut saya, terkait erat dengan kredibilitas pemerintah dan juga perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek tersebut.

Dampak moratorium, saya nilai, akan menurunkan kredibilitas pemerintah dan perusahaan konstruksi, juga akan memberi sinyal negatif sebab kajian proyek dan rekomendasi yang dibuat oleh kementerian terkait kepada presiden belum matang.

Pemberhentian sementara ini dilakukan untuk melakukan evaluasi. Jika seandainya nanti ditemukan hasil tidak dilanjutkan ini sangat disayangkan. Bila ini terjadi, maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional karena dibatalkannya proyek-proyek tersebut.

Kami mengkhawatirkan sektor tenaga kerja akan terkena imbas dari kebijakan pemerintah itu. Moratorium pekerjaan konstruksi layang akan memberikan implikasi

pada penyerapan tenaga kerja. Di samping itu juga akan membuat pemerintah tidak perlu lagi melakukan hal serupa dan belajar dari kejadian pembatalan proyek monorel di Jakarta, meskipun dengan alasan yang berbeda. Saya menganggap pemerintah sudah pernah mengalami ini dan seharusnya tidak terulang.

Untuk itu diharapkan pembangunan proyek infrastruktur, baik yang ada dalam Proyek Strategis Nasional atau di luar, tidak harus memperhitungkan dampak yang dapat diberikan, bukan seberapa banyak proyek harus dibangun.

Bagi kami hadirnya infrastruktur harus memberi manfaat bagi rakyat. Hadirnya infrastruktur sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga dapat untuk mengentaskan kemiskinan.

Saya berkesimpulan, pembangunan infrastruktur kita jadikan cara untuk mendorong pemerataan ekonomi antar-wilayah hingga memperkecil ketimpangan pendapatan. Target menciptakan keadilan sosial inilah yang sejatinya menjadi indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur yang inklusif. □

AWG

Dr. Mumuh Muhsin Zakaria, M.Hum.

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad)

Pancasila Sudah Menjauh dari Masyarakat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SAAT ini berbagai elemen masyarakat mengkhawatirkan Pancasila dan masyarakat makin menjauh. Bukan Pancasila yang menjauhi masyarakat, melainkan masyarakatlah yang makin lama makin menjauh dari Pancasila. Bahkan perilaku dari bangsa ini, terutama anak-anak sampai remaja, banyak yang tidak lagi mencerminkan Pancasila.

Saya rasa segala upaya dalam mengembalikan pemahaman Pancasila kepada masyarakat sehingga mereka menjadi peduli lagi kepada Pancasila haruslah didukung. Seperti Sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan MPR adalah salah satu upaya besar dalam mengembalikan Pancasila ke hati setiap warga negara Indonesia.

Saya rasa perlu dikembangkan lagi upaya-upaya semacam itu agar Pancasila tetap ada di hati dan tidak menjauh. Pancasila sangat penting, karena menjadi perekat persatuan bangsa Indonesia.

Berbagai macam tantangan bangsa, seperti permasalahan karena perbedaan (SARA), sebenarnya bisa diatasi dengan memaknai Pancasila secara utuh, karena di dalam Pancasila semuanya ada dan lengkap.

Melihat begitu pentingnya Pancasila maka masyarakat Indonesia semestinya dengan kesadaran sendiri berupaya memahami dan mengimplementasikan Pancasila, minimal di lingkungannya. □

DER

Dr. Titin Nurhayati Makmun

Ketua Prodi Sastra Arab Universitas Padjadjaran (Unpad)

Membangun Rasa Nasionalisme serta Menjaga Kebhinnekaan



PEMAHAMAN soal nilai-nilai luhur bangsa, seperti Pancasila, sangat penting untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia agar menjadi baik. Pancasila bisa menjadi benteng untuk memilah mana pengaruh yang baik dan mana yang buruk.

Maka itu menjadi sangat penting agar setiap anak bangsa mengenal, mencintai, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini bangsa kita digempur habis-habisan oleh pengaruh negatif yang datang dari luar dan berpotensi merusak persatuan di Indonesia. Simaklah, masih banyak kasus persekusi yang terjadi belakangan ini.

Untuk itu Pancasila perlu diinternalisasikan agar masyarakat dapat lebih bersemangati untuk membangun rasa nasionalisme, serta menjaga kebhinnekaan yang kita miliki selama ini.

Namun, upaya dalam pemantaban Pancasila kepada generasi muda bangsa, tidak hanya kerja MPR atau hanya mengandalkan pemerintah misalnya, tapi semua elemen masyarakat harus berperan. Misalnya, kampus sebagai institusi intelektual harusnya berada di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai luhur bangsa.

Membangun rasa nasionalisme itu berbanding lurus dengan menjaga kebhinnekaan. Untuk itu semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga seluruh rakyat hendaknya saling bahu membahu untuk terwujudnya esensi serta intisari Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. □

DER

Penandatanganan MoU Antara Setjen MPR dengan BPKP

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dr. Ardan Adiperdana, di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Penandatanganan disaksikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Setjen MPR dan BPKP. Melalui penandatanganan MoU ini, Sekretariat Jenderal MPR berkomitmen melakukan upaya perbaikan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya di bidang sistem pengawasan internal.

Usai penandatanganan, Ma'ruf Cahyono mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan inisiatif kedua lembaga, yakni Setjen MPR dan BPKP. "Penandatanganan ini menjadi hal yang strategis supaya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk sistem pengawasannya akan semakin baik," katanya.

Selama ini, Ma'ruf mengungkapkan, Setjen MPR juga memiliki unit pengawasan internal, yaitu bagian pengawasan. Ke depan, menurut Ma'ruf, bagian pengawasan itu akan ditingkatkan statusnya menjadi Inspektorat. "Memang fungsinya sama, tapi paling tidak dengan statusnya sebagai Inspektorat, secara kelembagaan akan lebih mampu menampung misi dari pengawasan yang diharapkan lebih bagus lagi," tandasnya. □

DER



Bazar Kuliner dan Fashion di Lingkungan Setjen MPR

DALAM menyambut 1 dekade atau 10 tahun Partai Gerindra di gelar acara bazar kuliner dan fashion di lingkungan MPR RI, tepatnya di lobi Gedung Nusantara IV MPR RI Jakarta. Bazar yang digelar selama 3 hari, yakni 7 hingga 9 Maret 2018, ini menampilkan berbagai macam produk fashion dan kuliner hampir dari semua daerah.

Sekitar 50 UKM dari berbagai daerah menampilkan dan menjajakan berbagai produk, mulai dari kerajinan tangan, baju, kain, batik serta berbagai jenis kuliner dengan harga yang sangat terjangkau.

Pegawai dan tamu di lingkungan MPR sangat antusias menyambangi bazar dan membeli berbagai macam produk UKM yang sangat terjangkau. □

DER





Mohammad Toha, Anggota Komisi III DPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ada yang Ingin Mengganggu Pemerintah

AWALNYA hanya peristiwa kejahatan biasa. Namun, beberapa waktu kemudian terjadi peristiwa serupa di beberapa tempat. Korbannya sama, yaitu ulama atau pemuka agama. Pelakunya juga sama, diidentifikasi sebagai orang gila. Itulah rangkaian penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama yang terjadi sejak Januari lalu.

Kasus pertama, penganiayaan terhadap KH. Umar Basri, pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayat Cicalengka, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (27/1/2018). Kiai Umar menjadi korban penganiayaan seusai shalat Subuh di masjid. Pelaku diidentifikasi sebagai orang gila. Setelah itu muncul kasus lain yang lebih sadis lagi, menyebabkan kematian. Korban itu adalah Komando Brigade PP Persis, Ustadz Prawoto, diserang dan dianiaya hingga meninggal dunia pada Kamis (2/2/2018). Pelakunya lagi-lagi seseorang yang dinyatakan mengalami gangguan jiwa.

Kemudian peristiwa penyerangan seorang pastur di Gereja Katolik Santa Lidwina, Sleman, Jogjakarta, pada Ahad (11/1/2018). Penyerangan ini menyebabkan Pastur Romo Karl Edmund Prier sempat dirawat di Rumah Sakit akibat serangan senjata tajam oleh Suliyono yang belakangan tengah diselidiki keterkaitannya dengan jaringan teroris.

Belakangan di Jawa Timur, pengelola Pondok Pesantren Karangasem, di Paciran, Lamonga, KH. Hakam Mubarak juga mengaku diserang pada Minggu (18/2/2018). Dia diserang oleh orang yang menurut polisi "mengalami gangguan jiwa." Terakhir penganiayaan terhadap mantan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jateng, K.H. Ahmad Zaenuri, dan menantunya, pada Sabtu (17/3/2018).

Bermunculannya kasus penyerangan terhadap ulama dan pemuka agama ini bisa menimbulkan keresahan. Untuk mengupas persoalan ini, wartawan Majelis

mewawancarai anggota MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mohammad Toha. Berikut petikan wawancara dengan anggota Badan Sosialisasi MPR yang juga anggota Komisi III DPR itu.

Penyerangan terhadap ulama sampai sekarang masih terjadi. Setelah kasus penganiayaan terhadap Kiai Umar Basri, pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayat Cicalengka, Kabupaten Bandung, berlanjut ke penganiayaan yang menyebabkan kematian ustad Prawoto. Terakhir penyerangan terhadap K.H. Ahmad Zaenuri, ulama Nahdlatul Ulama, di Kendal, Jawa Tengah. Para pelaku diidentifikasi sebagai "orang gila". Bagaimana Bapak melihat rentetan kejadian itu?

Ya, saya tidak tahu persis kasus-kasus penganiayaan terhadap ulama atau pemuka agama. Tapi, pelakunya dikatakan orang gila. Ya, namanya juga orang gila. Sudahlah,

ketika kasus terakhir di Kendal Jawa Tengah itu, ada perintah dari Kapolri kepada Kapolda untuk melakukan pengawasan lebih intensif lagi terhadap perilaku orang gila atau “digilakan” itu.

Kalau melihat peristiwa yang seolah-olah beruntun mulai di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, dan terakhir di Jawa Tengah serta hampir memiliki persamaan, yaitu penyerangan terhadap pemuka agama atau ulama dan dilakukan orang yang diidentifikasi gila, apakah Bapak melihat ada modus di balik peristiwa itu?

Menurut saya itu sebuah fenomena.

gila beneran. Skenarionya sudah gila.

Kalau memang seperti itu maka penyerangan terhadap ulama dan pemuka agama bisa dibilang menjadi peristiwa yang akan berulang terus?

Nah pola dan modusnya ini yang kita belum mengetahui. Tapi pasti ada satu kepentingan di balik peristiwa-peristiwa itu. Semoga saja tidak seperti peristiwa pada waktu dulu di Banyuwangi. Pada waktu itu terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi pada 1998. Kasus dukun santet di Banyuwangi juga memakai pola orang gila juga. Karena pelaku orang gila maka tidak bisa diusut dan

besar Pemilu dan Pilpres pada tahun depan?

Saya tidak tahu juga. Saya pikir mungkin tidak ada kaitannya. Menurut saya, secara umum peristiwa-peristiwa itu hanya untuk mengganggu pemerintah saja.

Bukankah sekarang ini merupakan tahun politik?

Memang, kalau kita mau kait-kaitkan bisa juga ke sana. Sebenarnya mengganggu pemerintah berarti juga mengganggu Pilkada, Pemilu atau Pilpres. Ada yang melakukan gangguan-gangguan seperti itu supaya terkesan tidak aman. Saya kira seperti itu.

Artinya, memang ada orang-orang



Yaitu, fenomena dari orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan tertentu.

Maksudnya bagaimana? Apakah peristiwa-peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama atau ulama yang dilakukan “orang gila” itu merupakan sebuah desain dari orang-orang tertentu itu?

Ya kita tidak tahu. Menurut saya, mungkin kepolisian sudah mengetahui (di balik penyerangan ulama atau pemuka agama), tapi belum teridentifikasi kepentingan dan maksud di balik peristiwa-peristiwa itu. Kenapa yang diserang para ulama. Ini khan gila. Ulama itu sangat bermanfaat bagi umat. Kenapa malah mengalami penyerangan seperti itu. Kenapa kok yang diserang bukan koruptor, buruan narkoba, atau pelaku kriminal lainnya. Kenapa memilih menyerang para ulama atau pemuka agama. Ini sudah

kasusnya tiba-tiba hilang begitu saja.

Dari pandangan Bapak, kira-kira apa di balik penyerangan terhadap ulama dan pemuka agama yang beberapa kali terjadi?

Lah, paling kejadian-kejadian seperti itu untuk menggoyang pemerintah saja. Sekarang khan pemerintah sudah berjalan baik seperti ini, tapi kemudian dicarilah cara-cara yang kira-kira bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dengan kejadian itu diharapkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Menurut saya baru seperti itu yang saya lihat.

Apakah ada kaitan antara peristiwa penyerangan ulama yang dilakukan oleh “orang gila” itu dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Pilkada serentak pada Juni 2018 ini dan hajatan

atau pihak-pihak yang ingin mengganggu pemerintah?

Ya. Ada yang ingin mengganggu pemerintah.

Bagaimana dengan penanganan yang dilakukan kepolisian, apakah kasus-kasus penyerangan terhadap ulama dan pemuka agama itu bisa terungkap dengan jelas?

Menurut saya kepolisian harus lebih intens lagi untuk mengungkap kasus-kasus penyerangan ulama itu. Tentu kita bersama-sama juga bisa ikut membantu pengungkapan kasus-kasus itu. Kepolisian harus lebih detil lagi untuk mengidentifikasi para pelaku penyerangan. Kepolisian juga sudah melakukan tindakan pencegahan, seperti operasi untuk mengawasi atau menangkap orang gila atau orang yang dianggap gila. □

Seniman Juga Pancasila *Sejati*



Indah Dewi Pertiwi

ARTIS penyanyi cantik Indah Dewi Pertiwi (IDP) tampak antusias hadir memenuhi undangan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (21/2/2018). "Wow.gitu loh.. saya rasa luarbiasa ya pejabat seperti Ketua MPR sudi bersama kita ngobrol bareng tanpa jarak. Yang kita omongin ya soal Pancasila, dan persoalan bangsa sekarang ini," ujar pelantun tembang *Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa* ini.

Dara cantik kelahiran Bogor, 30 Januari, ini mengatakan, persoalan bangsa seberat apapun jika dibicarakan bersama-sama pasti akan ada jalan keluarnya. Intinya, bermusyawarah. "Seperti bunyi Pancasila kan. Saya harap silaturahmi antara pejabat dan pelaku seni seperti ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan," harap IDP.

IDP tidak sendiri, dia datang bersama sederet rombongan artis lainnya, antara lain: Glen Fredly, Dwiki Dharmawan, Ita Purnamasari, Ray Sahetapy, Marcella Zalianty, Ramzy, Andy Ayunir, HIVI, Tri Souls, dan Aden Satria Dharma.

Di akhir sesi diskusi dengan Ketua MPR, saat sesi makan siang, IDP dadakan didaulat ke atas panggung membawakan beberapa lagu, salah satunya lagu Dewa 19 'Kangen'. □

DER

Terimakasih Atas Apresiasi Film Nasional

SUTRADARA muda berbabat **Hanung Bramantyo** hadir dalam acara nonton bareng film 'Benyamin Biang Kerok' artis dan komedian ibukota bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Plaza Senayan, Selasa (13/3/2018).

Hanung sutradara film 'Benyamin Biang Kerok' mengaku agak terkejut ketika diundang nonton bareng film yang disutradarainya bersama seorang pejabat tinggi negara. "Saya sangat berterimakasih banyak atas apresiasinya terhadap film saya. Film ini untuk menghormati seorang seniman besar Betawi, Benyamin S. atau Bang Ben, tentu banyak sekali pesan-pesan moral yang ada dalam film ini dan keluar dari sosok Pengky yang diperankan Reza," katanya.

Saat ini, lanjut Hanung, dunia perfilman nasional sedang bergairah melahirkan karya-karya sinema yang mengangkat tokoh-tokoh nasional dan ikon-ikon daerah, seperti Bung Karno, Agus Salim, KH, Ahmad Dahlan, dan lain-lain.

"Saya rasa sangat baik sekali bangkitnya kembali dunia perfilman Indonesia, dan masyarakat pun mengapresiasi ini timbal balik yang baik," ujarnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hanung Bramantyo



Haruka Nakagawa

Bangga Menjadi Duta Persahabatan Dua Negara

NASIONALISME dan cinta Indonesia bisa muncul dari mana saja dan dari siapa saja, **Haruka** salah satunya. Mantan anggota girl band J-Pop Jepang terkenal AKB 48 dan saat ini menjadi anggota girl band Indonesia JKT48 mengaku, sangat cinta Indonesia dan mengaku lebih betah tinggal di Indonesia ketimbang pulang kampung.

"Di sini semua baik-baik orangnya, dan keberagaman daerahnya sangat banyak dan indah-indah semua. Saya rasa saya akan senang tinggal di Indonesia," katanya.

Luar biasanya sosok imut dan centil ini, selain masih wara-wiri di dunia selebritas juga tengah sibuk dengan kegiatan barunya sebagai Duta Persahabatan pada 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang.

"Bangga banget lah menjadi Duta Persahabatan, gak nyangka juga ya.. Tugasnya ya menjembatani hubungan baik antara dua negara sesuai dengan profesi saya. Paling menjembatani hubungan baik antara anak muda Indonesia Jepang," terangnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Gonggong

KALAU Anda mengunjungi kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau maka salah satu yang tidak bisa dilewatkan adalah mengunjungi Gedung Gonggong. Letaknya tidak jauh dari pelabuhan kota itu. Berada di bibir pantai, di depan rumah dinas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang megah dan menghadap laut. Gedung itu masih baru, berdiri setahun lalu.

Gedungnya indah. Berwarna warni. Dikelilingi taman yang tertata rapi. Dari arah laut tampak menonjol. Menjadi Pusat Informasi Pariwisata yang kini sedang digalakkan di daerah yang indah ini. Walau tidak termasuk 10 destinasi wisata nasional, daerah ini sesungguhnya memiliki wisata yang banyak dan bervariasi.

Gedung Gonggong menjadi ikon kota Tanjung Pinang. Umumnya pengunjung akan menyempatkan diri berfoto dengan latar belakang gedung ini. Pada saat pergantian tahun lalu, Gedung Gonggong menjadi pusat

keramaian menjelang detik detik pergantian tahun. Tidak hanya hiburan musik dari siang sampai malam hari, juga penyajian video mapping pertama kali ditampilkan di Tanjung Pinang. Tentu saja ramai didatangi pengunjung.

Apa sesungguhnya Gonggong yang gedungnya dijadikan ikon kota ini? Tak lain dari salah satu jenis biota laut. Semacam

siput. Umumnya berwarna putih, kuning sampai kecoklatan. Namanya dalam Bahasa Latin (nama ilmiahnya) adalah *Laevistrombus canarium*. Disebut juga *Strombus canarium*. Termasuk keluarga Gastropoda atau kerang kerangan.

Hidupnya diluar. Ukurannya sekitar 3 s/d 7 sentimeter. Dapat berusia antara 2 sampai 2





½ tahun. Cangkang Gonggong biasa dijadikan sebagai hiasan. Dagingnya yang berada di dalam cangkang itu mengandung banyak protein, termasuk kolesterol. Sesungguhnya tidak hanya ditemukan di Kepulauan Riau. Juga dibagian lain Nusantara. Bahkan menyebar dari India, Srilangka, Thailand, Malaysia, sampai Australia, Melanesia dan di selatan Jepang.

Namun, di daerah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan Tanjung Pinang, Gonggong menjadi salah satu kuliner andalan. Biasa disajikan di restoran dan banyak dicari wisatawan. “Sudah makan gonggong belum?,” tanya seorang teman yang mengetahui saya sedang berada di Tanjung Pinang. Ketika berkunjung ke Pulau Penyengat, di dalam daftar menu masakan juga ditemukan Gonggong. “Tapi sedang tidak

tersedia Bu!,” kata pemiliknya.

Rasa penasaran membuat saya kembali mencari gonggong di Tanjung Pinang. Setelah mengunjungi dua restoran yang khusus menyajikan masakan Melayu, akhirnya bertemu di sebuah restoran di Pulau Dompok, yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Pemilik yang sekaligus pengelola rumah makan ini, Jhoni, menyediakan beberapa jenis makanan laut yang masih hidup. Persediaan itu dipelihara di dalam keramba di tengah-tengah rumah makan yang menjorok ke laut itu. Di akuarium tersedia ikan kerapu dan kepiting bakau hidup. Sedang di keramba beberapa jenis bahan hidangan laut lainnya seperti kerang putih dan gonggong tadi.

Karena hanya ingin mencoba Gonggong,

saya cuma memesan Gonggong sekilogram. Tidak lama, tersedia Gonggong rebus di atas piring beserta bumbunya. Juga tusuk gigi, yang digunakan menarik daging Gonggong dari cangkangnya. Tapi cara itu dilakukan, kalau kaki Gonggong tidak menyembul keluar. Kalau menyembul, tinggal menariknya saja, yang kemudian diikuti dagingnya yang terasa sedikit lebih kenyal dari daging kerang bulu.

Karena kandungan kolesterolnya yang tinggi, konon makannya tidak boleh banyak-banyak. Lagi pula, makan 5–6 ekor Gonggong terasa sudah cukup. Sisanya tinggal dibawa pulang. Sekilogram Gonggong beserta sambalnya dikenai Rp 82.000. Rasanya seimbang dengan lenyapnya rasa penasaran. □

Dedes Erlina

Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA.

Mengagumi Bung Karno

Sejak Kecil



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DIA adalah sosok langka di ranah legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Badannya agak kurus sempurna dan punya kebiasaan mengenakan peci, membuat sosok ini mudah dikenali dibanding yang lain. Itulah sosok seorang Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA., anggota Fraksi PDI Perjuangan di MPR yang juga Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi sayap Partai besutan Hj. Megawati Soekarnoputri.

Bagi Hamka, mengenakan peci seperti sebuah kebutuhan. Karena itu, praktis sangat sulit melihat penampilannya tanpa memakai peci. Apalagi kebiasaan itu sudah tertanam sejak lama, karena dia memang sudah lama berkecimpung di berbagai organisasi Islam. Antara lain, Dewan Pakar Daru Dakwah Wal Irsyad Sulawesi Selatan

sejak 1996 hingga sekarang. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (1991 – 2010), Penasihat MUI Pusat sejak 2010, dan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia dari 2007 sampai sekarang.

Sebagai Ketua Umum Bamusi, Hamka patut bersyukur karena organisasi yang dipimpinnya itu mampu mengeliminir pandangan orang terhadap partai berlambang Banteng moncong putih. Sebelum Bamusi lahir, tersirat pendapat bahwa PDI Perjuangan adalah partai kaum sekuler dan abangan. Tetapi sejak Bamusi berdiri, tepatnya 29 Maret 2007, anggapan itu berangsur pudar. Apalagi, sejak Baitul Muslim Indonesia berdiri makin banyak tokoh muslim yang bergabung dengan PDI Perjuangan, baik menjadi anggota struktur pengurus partai maupun sebagai caleg.



Bagi PDI Perjuangan, Hamka bukanlah sosok kemarin sore. Ia bergabung dengan PDI Perjuangan setelah melewati proses panjang. Jauh sebelum PDI Perjuangan ada, Hamka sudah terlebih dahulu menjadi pengagum Bung Karno. Semenjak kecil ia sudah mengenal sosok sang Proklamator melalui berbagai gambar, tulisan, pidato-pidato dan buku-buku yang membahas soal Soekarno dan pemikirannya.

Saat masih kecil Hamka sering membaca surat kabar Muhammadiyah "Mercury Suar" yang salah satu rubriknya adalah *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Sedangkan buku tentang Soekarno yang sempat dibaca saat ia masih muda adalah *Di Bawah Bendera Revolusi*, berisi kumpulan tulisan Bung Karno sejak 1920-an.

Tetapi pada 1966 kecintaannya terhadap Soekarno sempat

terkoreksi, lantaran peristiwa G-30-S. Provokasi politik Soeharto yang menjelekkan Soekarno membuatnya sedikit jauh dari pemikiran dan idealisme Bung Karno. Tidak hanya itu, Hamka pun sempat terseret arus besar kebencian terhadap Soekarno yang dihembuskan Orde Baru. Tetapi itu tak berlangsung lama. Ibunya, yaitu Hj. Siti Hawa memberi peringatan agar Hamka tidak larut dalam kebencian terhadap Soekarno. Bagaimanapun, sebagai pemimpin bangsa, Soekarno memiliki jasa tidak sedikit terhadap bangsa dan negara.

Sejak itu, kecintaannya terhadap Soekarno muncul kembali. Malah, rasa cinta Hamka terhadap Soekarno terbawa hingga ke alam bawah sadarnya. Pada satu malam, dalam tidurnya, Hamka bermimpi bertemu dengan Soekarno. Dalam mimpi itu Hamka melihat Soekarno bangkit



lagi setelah dijatuhkan Soeharto. Begitu girangnya, sampai-sampai dalam mimpi tersebut ia berteriak kepada warga kampung untuk mengabarkan bahwa Soekarno telah bangkit kembali.

Anak Didik NU dan Muhammadiyah

Sebelum masuk jajaran elit PDI Perjuangan, Gurubesar Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar ini sempat berkiprah di Golkar. Tetapi, persinggungannya dengan Golkar tidak berlangsung karena keterpaksaan. Itu terjadi pada kurun 1976 – 1993 atau saat ia bekerja sebagai PNS di Departemen Agama Sulsel. Ia ikut menjadi anggota Golkar, karena saat itu setiap anggota PNS wajib setia pada Golongan Karya.

Termasuk ketika menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia dan harus berbaik-baik dengan Golkar. Semua dilaluinya dengan penuh kepatuhan.

Meski dengan terpaksa dan berat hati, tetapi Hamka mampu menahan perasaannya untuk tidak memberontak. Ia berusaha menerima kenyataan, meskipun melihat tokoh yang dipujinya, yaitu Soekarno dan pemikirannya dipinggirkan oleh penguasa saat itu.

Tetapi, pada 1997 kesetiannya terhadap Golongan Karya mulai goyang. Diawali oleh penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan, Hamka melihat arogansi dan kemarahan Golkar tidak bisa ditolerir, dan tidak bermoral.

Sejak itu, Hamka makin dekat dengan gerakan pro Mega di Makassar. Ia melakukan interaksi dan diskusi-diskusi dengan warga PDI Perjuangan. Hamka juga menemukan tantangan baru, karena ia merasa bisa bergaul dan diterima di PDI Perjuangan. Padahal, sebelumnya ia lebih sering berinteraksi dengan institusi eksklusif Islam, baik sebagai dosen IAIN Alauddin Makassar maupun Sekretaris Umum MUI Sulsel.

Kesesuaian pemikiran Hamka dengan PDI Perjuangan makin erat, terbukti pada 2004 ia sudah menjadi caleg DPR RI dari PDI Perjuangan. Kemauannya menjadi caleg didukung oleh satu keinginan mulia. Yaitu, membantu memperbaiki sistem pendidikan, yang dianggapnya masih jauh dari sempurna.

Perjalanan Hamka di PDI Perjuangan adalah kesetiaan tanpa batas antara seorang kader dengan partainya. Ia sadar, sukses yang diraihinya kini adalah hasil usaha, jerih payah, dan kerja keras. Hamka sadar untuk meraih sukses dibutuhkan ikhtiar dan pengorbanan. Beruntung ia tidak pernah mengeluh apalagi mengaduh dengan semua perjuangannya. Karena Hamka adalah sosok pekerja keras. Ia pantang menyerah dalam menggapai cita-citanya. Karena itu, wajar jika saat ini ia meraih berbagai keberhasilan.

Saat masih kecil misalnya, pria kelahiran Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada 18 Oktober 1953 atau bertepatan dengan 10 Safar 1373 H., ini kehilangan waktu bermainnya karena harus belajar.

Karena sejak dini, anak pasangan K.H Abdul Qadir dan Hj. Siti Hawa ini sudah dituntut untuk belajar, baik pagi maupun sore hari.

Pagi hari Hamka kecil yang biasa dipanggil Mengka atau La Mengka belajar di Sekolah Rakyat, sorenya ia belajar di Sekolah Arab. Padahal, umumnya anak-anak saat itu, bisa beristirahat, bermalas-malasan, dan bermain-main, mulai dari pulang sekolah hingga sore hari. Sementara Hamka tidak memiliki kesempatan, seperti anak-anak sebayanya lantaran harus belajar.

Kewajiban seperti ini berlangsung hingga Hamka duduk di bangku SLTP. Saat di sekolah lanjutan tingkat pertama, sore hari ia harus belajar di Muallimin Muhammadiyah, kemudian sorenya ia belajar PGA Attaufiq NU.

Pada zaman itu anak-anak bermain dengan mainan buatan sendiri. Seperti mobil-mobilan dari kulit limau, kuda-kudaan dari pelepah pisang, dan pitol-pistol dari kayu. Tetapi Hamka harus mengorbankan sebagian waktu bermainnya untuk belajar.

Hamka adalah anak yang patuh kepada orangtuanya. Ia melakukan tugas dari orangtuanya untuk belajar dengan baik. Bahkan Hamka selalu bersemangat, karena ingin menjadi anak yang lebih baik dari anak-anak seusianya. Acap kali ia membuat mainan yang belum pernah dilihat teman-temannya, meskipun mainan itu ia tiru dari orang lain yang tinggal di kota.

Mainan-mainan itu dibuat sendiri oleh Hamka tanpa bantuan orangtuanya. Apalagi, K.H Abdul Qadir, ayah Hamka, tergolong keras dan tegas, seperti umumnya orangtua di zaman itu. Karena itu, Hamka selaku anak kedua dari empat bersaudara sangat segan terhadap orang tuanya. Mereka hanya berkumpul dengan kedua orangtuanya di waktu tertentu saja. Seperti saat sholat, dan makan bersama, selebihnya ia hampir tidak pernah bercanda dengan mereka.

Bagi Hamka, antara dunia pendidikan yang pernah dia geluti dan ranah politik yang sekarang ia terjun, sama-sama memberi kesenangan dan kenangan. Sebagai dosen dan gurubesar ia merasa banyak mendapat penghargaan dari masyarakat akademis, para



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pecinta ilmu agama di tengah masyarakat. Dan, dielu-elukan jika berkunjung ke suatu acara keagamaan. Sedangkan menjadi politisi, apalagi menjadi pimpinan partai terbesar, juga punya kesan yang mengasyikkan.

“Saya dapat berhubungan dengan semua lapisan masyarakat dari segala macam jenis profesi dan strata sosial. Dari mantan presiden hingga ke tukang batu, penjual sayur dan pengemis di pinggir jalan. Dari ulama hingga para pendosa dan mantan nara pidana, bahkan mereka yang masih berada dalam penjara”, tutur Hamka Haq.

Sebagai politisi, Hamka berharap bisa terus mengabdikan kepada Tuhan, bangsa dan negara. Seperti saat ia mengabdikan di jalur pendidikan. Karena itu, kalau suatu saat nanti ada posisi yang bisa meningkatkan pengabdianya, ia siap menjalaninya semaksimal mungkin, sesuai kondisi dan kemampuannya.

Sebagai anggota Badan Sosialisasi, Hamka berharap sosialisasi Empat Pilar MPR bisa menjangkau segenap lapisan masyarakat. Tugas tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab MPR, tapi harus dilakukan oleh segenap aparat pemerintah. Karena itu, MPR harus melatih banyak tenaga yang bisa menjangkau segala segmen masyarakat. Mulai dari komunitas seni budaya, pebisnis, petani, nelayan, dan berbagai profesi lainnya. □

MBO



Oleh:
Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI



Dalam Perjalanan, Pancasila Melampaui Berbagai Dimensi

PERLU saya sampaikan bahwa Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Suatu kondisi yang tidak dapat ditawar-tawar oleh pihak manapun. Pilihan menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa, karena nilai-nilai Pancasila pada dasarnya bukan hal yang baru, tetapi sudah lama hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai akar budaya bangsa Indonesia.

Atas dasar ikatan kebangsaan yang kuat itulah Pancasila sebagai landasan filosofis telah mampu melewati ruang dan waktu, dari generasi ke generasi dalam beberapa orde pemerintahan dengan karakteristik kekuasaannya menjadi pemandu arah kehidupan kebangsaan Indonesia yang besar dan majemuk.

Pancasila adalah maha karya yang luar biasa hebatnya, mengandung prinsip-prinsip dasar bernegara yang universal yang mampu mempertahankan eksistensinya dalam ruang yang syarat dengan berbagai entitas kebangsaan, yang secara faktual tumbuh di tengah suburnya eksklusifisme karena perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya.

Sejarah mencatat, selama lebih dari tujuh puluh dua tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah pula mampu melampaui berbagai dimensi perubahan sosial, bahkan multidimensi persoalan bangsa, dan tetap kokoh menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi seperangkat nilai yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, bersifat final, dan tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkannya.

Salah satu misi besar kita adalah melanjutkan pembangunan

bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Kita harus memiliki tekad dan keyakinan yang kuat bahwa kita dapat membangun kehidupan bangsa yang maju, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam kerangka pencapaian itu semua, bangsa Indonesia harus menyadari sepenuhnya bahwa dalam menghadapi setiap dinamika dan tantangan kebangsaan, setiap manusia Indonesia perlu dipersiapkan menjadi individu yang handal, cerdas dan berkepribadian. Mereka harus memiliki semangat dan cita-cita perjuangan bangsa yang berketuhanan, berkeadilan, besatu, rasa cinta tanah air, toleransi, dan menghormati kemajemukan.

Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang terejawantahkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral, serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.

Semangat keindonesiaan tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di masa kini maupun di masa akan datang. Segala bentuk keberagaman bukanlah penghalang bagi kita untuk tetap bersatu, keberagaman itulah yang menjadi faktor penting masih berdiri dan bersatunya Indonesia.

Saya meyakini dengan semangat yang sama untuk maju bersama, berbagai ketertinggalan bangsa ini dapat kita atasi bersama, dan secara bergotong-royong mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekali layar terkembang, surut berpantang, tentu dengan tekad dan ikhtiar kita bersama seluruh komponen bangsa, Indonesia akan semakin membuktikan dirinya menjadi bangsa dan negara yang besar, kuat, berdaulat, serta berkemajuan. □